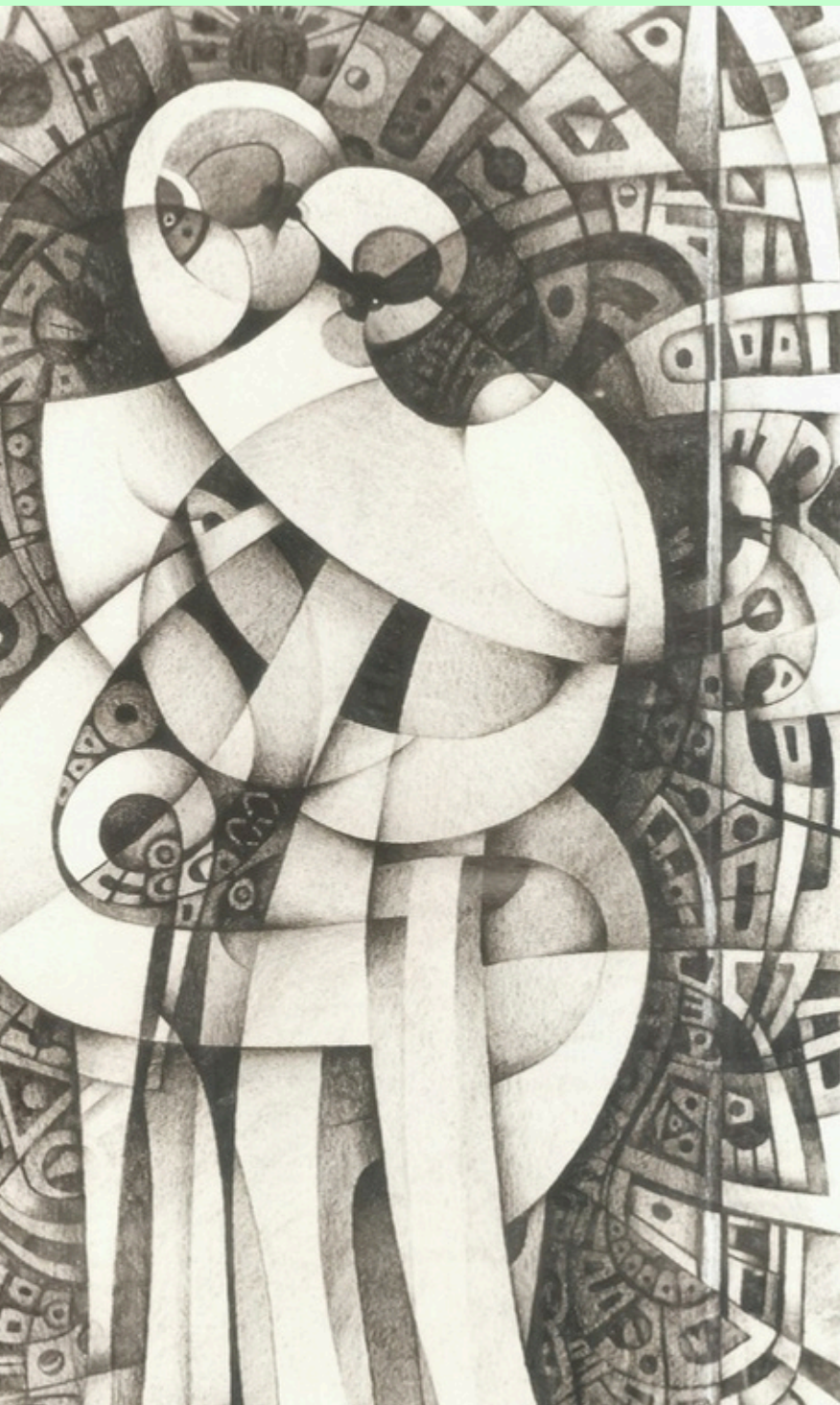


# MENALAR KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

**Dinamika Ekonomi Politik Indonesia**



**Riza Primahendra  
Tri Adi Sumbogo**



**Perkumpulan  
AMERTA**

# **MENALAR KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA**

**Dinamika Ekonomi Politik Indonesia**

**Riza Primahendra  
Tri Adi Sumbogo**

---

MENALAR KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA: Dinamika Ekonomi  
Politik Indonesia

Perkumpulan Amerta

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All Rights Reserved

Cetakan 1, 2026

Penulis: Riza Primahendra, Tri Adi Sumbogo  
Desain Sampul dan Tata Letak: Tri Adi Sumbogo

Ukuran: ...cm x ...cm

Halaman:

ISBN: xxxx-xxxx-xxxx

Penerbit:

Perkumpulan Amerta, Jalan Pulo Asem Utara A.20, Kel, Jati, Kec,  
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Jakarta, 13210

Telpon: 021-4719005

Email: perkumpulan.amerta@gmail.com

Website: www.amerta.or.id

# RATA PENGANTAR

**Buku** Menalar Kebijakan dan Tata Kelola (Dinamika Ekonomi Politik Indonesia) disusun sebagai upaya Perkumpulan Amerta untuk berkontribusi dalam memperkaya ruang refleksi publik mengenai arah pembangunan Indonesia. Di tengah dinamika politik, tekanan ekonomi global, serta perubahan sosial yang cepat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai kebijakan penting yang dampaknya tidak selalu langsung terlihat, namun sangat menentukan masa depan bangsa.

**Buku** ini tidak ditulis untuk menyalahkan, menghakimi, atau mempromosikan kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, kami berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang sadar, kritis, dan terinformasi, serta pemerintah yang terbuka terhadap masukan berbasis analisis dan data.

**Berbagai** tulisan dalam buku ini merupakan refleksi kritis atas isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia pada periode 2025 mulai dari kebijakan fiskal dan utang negara, daya beli masyarakat dan nasib kelas menengah, risiko pembusukan politik dan populisme predatoris, tantangan deindustrialisasi dan bonus demografi, hingga persoalan kedaulatan pangan, energi, dan tata kelola sumber daya alam.

**Kami** menyadari bahwa isu-isu tersebut sering kali disajikan secara teknokratis, elitis, atau terfragmentasi. Oleh karena itu, buku ini berupaya menjembatani analisis kebijakan dengan bahasa publik, agar dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang—akademisi, pembuat kebijakan, aktivis, pelaku usaha, mahasiswa, maupun warga negara yang ingin memahami arah bangsanya secara lebih utuh.

**Perkumpulan** Amerta berharap buku ini dapat: *Pertama*, Mengembangkan kesadaran kritis publik terhadap pilihan-pilihan kebijakan yang diambil negara. *Kedua*, Mendorong diskusi yang rasional dan berbasis fakta, bukan sekadar polarisasi opini. *Ketiga*, Memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

**Kami** meyakini bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu kebijakan atau satu rezim, melainkan oleh kemampuan bangsa ini untuk belajar, mengoreksi diri, dan membangun kebijakan yang adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan publik jangka panjang.

**Akhir** kata, kami mengundang para pembaca untuk tidak hanya membaca buku ini sebagai bunga rampai tulisan refleksi secara kronologis waktu, namun juga sebagai ajakan untuk berdialog dan berpikir bersama demi Indonesia yang lebih demokratis, berdaulat, dan berkeadilan.

Perkumpulan Amerta  
Jakarta, 2026

# PROLOG

Buku ini memotret Indonesia pada sebuah persimpangan penting. Di satu sisi, Indonesia masih menunjukkan stabilitas makroekonomi dan memiliki potensi besar—bonus demografi, sumber daya alam melimpah, serta pasar domestik yang luas. Di sisi lain, berbagai gejala struktural mengindikasikan risiko jangka menengah hingga panjang yang tidak bisa diabaikan.

## Refleksi Kritis dalam Buku Ini

**Pertama**, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kehilangan daya dorong sosialnya. Konsumsi rumah tangga melemah, kelas menengah menyusut, dan UMKM tertekan, meskipun stimulus fiskal dan likuiditas perbankan terus digelontorkan. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan kekurangan dana, melainkan tersumbatnya sirkulasi ekonomi produktif.

**Kedua**, utang negara meningkat cepat tanpa dampak sosial yang sebanding. Banyak belanja publik dan proyek pembangunan gagal menciptakan nilai tambah lokal, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan yang merata. Beban pembayaran utang justru mempersempit ruang fiskal di masa depan.

**Ketiga**, ketergantungan pada ekonomi ekstraktif dan komoditas mentah membuat Indonesia rentan terhadap guncangan global. Pengalaman negara-negara Amerika Latin menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, kekayaan alam justru dapat menjadi sumber krisis ekonomi dan sosial. Keempat, demokrasi Indonesia menghadapi risiko pembusukan dari dalam. Populisme predatoris, pelemahan institusi, normalisasi konflik kepentingan, serta menurunnya kepercayaan publik menjadi sinyal peringatan serius bagi keberlanjutan demokrasi.

**Keempat**, bonus demografi bukan jaminan kemajuan. Tanpa penciptaan lapangan kerja produktif, industrialisasi bernilai tambah, dan investasi besar pada manusia, bonus ini berisiko berubah menjadi beban sosial dan politik.

# PROLOG

## Arah Rekomendasi Kebijakan

Buku ini menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki ruang koreksi. Rekomendasi kebijakan yang diajukan berfokus pada:

- Perbaikan struktur ekonomi, dengan memperkuat industrialisasi, ekonomi kompleksitas, dan nilai tambah domestik.
- Reformasi fiskal dan belanja negara, agar lebih adil, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan jangka panjang.
- Penguatan demokrasi dan supremasi hukum, untuk mencegah pembusukan politik dan konsentrasi kekuasaan.
- Perlindungan kelas menengah dan pekerja, sebagai fondasi stabilitas sosial dan ekonomi.
- Kedaulatan pangan dan energi, sebagai pilar ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.

## Pesan Utama

Pesan utama buku ini sederhana namun mendasar: krisis tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan melalui kebijakan yang tampak rasional di permukaan, tetapi mengabaikan keadilan, keberlanjutan, dan tata kelola. Sebaliknya, masa depan yang lebih baik juga tidak akan lahir dari satu kebijakan populis, melainkan dari keberanian melakukan reformasi struktural secara konsisten.

Buku ini diharapkan menjadi rujukan reflektif—bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, bagi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi, dan bagi publik luas dalam memahami bahwa arah pembangunan Indonesia adalah tanggung jawab bersama.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar - i

Prolog - iii

Daftar Isi - iv

Menuju Indonesia (C)Emas: Ketika Kenaikan PPN Mengancam Kelas Menengah - 01

Utang Negara dan Janji Pembangunan Sosial: Mengapa Hasilnya Tidak Sebanding? - 07

Belajar dari Amerika Latin: Tiga Krisis, Tiga Peringatan bagi Indonesia - 13

BPI Danantara di Persimpangan Jalan: Belajar dari Keberhasilan Temasek dan Kegagalan IMDB - 23

Pembusukan Politik di Indonesia: Gejala, Risiko, dan Jalan Keluar - 31

Ekonomi Indonesia di Tengah Perang Tarif Dunia: Pelemahan Daya Beli, Tekanan Global, dan Pilihan Kebijakan - 41

Kedaulatan Pangan Indonesia: Antara Potensi Besar dan Hambatan Struktural - 49

Bonus Demografi Indonesia: Peluang Emas atau Bencana yang Ditunda? 57

Terjebak di Tengah: Deindustrialisasi dan Ancaman Middle Income Trap Indonesia 65

# DAFTAR ISI

Populisme Predatoris: Ancaman Tersembunyi bagi Demokrasi Indonesia - 73

Ekonomi Komplek-sitas: Jalan Alternatif Indonesia Keluar dari Jebakan Ekonomi Sederhana - 81

Data Pribadi, Perdagangan, dan Kedaulatan Digital Indonesia - 89

Memaknai Kembali Kemerdekaan Indonesia di Era Digital dan Masyarakat YANG Cair - 97

Pertumbuhan dan Pemerataan: Mencari Jalan Tengah Pembangunan Indonesia - 105

Apakah Gerakan Sosial Akan Kembali Terjadi di Indonesia? - 113

Menalar Reformasi Kepolisian Indonesia: Dari Krisis Kepercayaan Menuju Institusi yang Akuntabel - 121

Menjajaki Kedaulatan Energi Indonesia: Dari Ketergantungan Fosil Menuju Transisi yang Berdaulat dan Adil - 127

Menilik “Jejak Hitam” Orde Baru: Pelajaran Penting bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia - 135

Banjir dan Longsor Sumatra: Ketika Hujan Mengungkap Kegagalan Tata Kelola - 143

Indonesia di Persimpangan 2026: Ketika Stimulus Gagal Menghidupkan Ekonomi Rakyat - 153

Epilog 161



# MENUJU INDONESIA (C)EMAS: KETIKA KENAIKAN PPN MENGANCAM KELAS MENENGAH

JANUARI 2025

*Gagasan “Indonesia Emas” kerap dibingkai sebagai masa depan pertumbuhan tinggi, bonus demografi, dan kelas menengah yang kuat. Namun dibalik narasi optimistis tersebut, kebijakan fiskal yang diambil hari ini justru berpotensi mengantar Indonesia ke arah sebaliknya: Indonesia Cemas—sebuah kondisi ketika tekanan biaya hidup meningkat, kelas menengah menyusut, dan fondasi pertumbuhan jangka panjang melemah.*



*Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menjadi titik krusial perdebatan. Kebijakan ini lahir dari ruang fiskal yang menyempit, rasio pajak yang stagnan, serta beban pembiayaan program populis dan proyek mercusuar. Namun pertanyaan utamanya adalah: siapa yang menanggung beban penyesuaian fiskal ini, dan apa dampaknya bagi struktur ekonomi dan sosial Indonesia?*

# MENGAPA PEMERINTAH MENDORONG KENAIKAN PPN 12%?

Kenaikan PPN bukan kebijakan spontan. Ia merupakan respons terhadap tiga tekanan utama:

1. Menyempitnya ruang fiskal, akibat kewajiban cicilan utang yang meningkat tanpa diimbangi kenaikan pendapatan negara.
2. Kegagalan meningkatkan rasio pajak, yang membuat negara kembali “berburu di kebun binatang”—memungut pajak dari basis yang sama dan relatif patuh
3. Pembiayaan program populis dan proyek besar, yang menjadi komitmen politik namun tidak selalu menghasilkan multiplier effect ekonomi yang memadai.

Secara formal, PPN 12% diklaim hanya menambah inflasi sekitar 0,2%. Namun analisis sistemik menunjukkan bahwa dampak riilnya jauh melampaui angka statistik jangka pendek.

## DAMPAR EKONOMI MAKRO: EFEK DOMINO YANG MENGKHAWATIRKAN

### INFLASI DAN DAYA BELI

PPN bersifat regresif. Kenaikannya langsung menaikkan harga barang dan jasa, menekan daya beli rumah tangga—terutama kelas menengah dan kelompok rentan yang tidak sepenuhnya terlindungi oleh skema pembebasan PPN kebutuhan pokok.

### PERTUMBUHAN EKONOMI

Konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung PDB Indonesia. Ketika konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi ikut tertahan, terutama dalam jangka pendek hingga menengah.

### IKLIM INVESTASI

Kenaikan PPN meningkatkan biaya transaksi dan biaya investasi. Dalam konteks global yang kompetitif, hal ini berisiko: 1) memperburuk iklim investasi, 2) mendorong relokasi industri, 3) mempercepat deindustrialisasi, dan 4) menaikkan pengangguran serta informalitas.

*Efek-efek ini saling menguatkan dalam lingkaran setan ekonomi yang sulit diputus.*

## DAMPAK SOSIAL: MENYUSUTNYA KELAS MENENGAH



Data menunjukkan indikasi kuat penurunan kelas menengah di Indonesia:

1. Proporsi kelas menengah turun dari 23% (2018) menjadi 18,8% (2023).
2. Kelompok aspiring middle class meningkat, menandakan kerentanan sosial.
3. Serapan tenaga kerja sektor formal anjlok drastis, sementara UMKM tumbuh dalam kondisi rapuh.

Fenomena “mantab” (makan tabungan)—menurunnya saldo tabungan rumah tangga—menjadi sinyal bahwa kelas menengah tidak lagi memiliki bantalan keuangan. Kontribusi konsumsi kelas menengah terhadap PDB juga terus menurun, sementara porsi belanja pangan meningkat—indikator klasik tekanan ekonomi rumah tangga.

Jika tren ini berlanjut, bonus demografi akan memendek dan berisiko berubah menjadi bencana demografi, ketika penduduk usia produktif tidak terserap dalam pekerjaan bermartabat.

## AKAR MASALAH: LEBIH DARI SEKADAR PAJAK

Kenaikan PPN memperparah masalah yang sudah ada:

- kebijakan investasi yang berbiaya tinggi dan tidak pasti,
- kenaikan biaya hidup (energi, pendidikan, perumahan),
- hancurnya industri padat karya akibat kebijakan impor yang distortif,
- serta fenomena “Chilean Paradox”: kekayaan alam dinikmati elit, bantuan diarahkan ke kelompok bawah, sementara kelas menengah menanggung beban pajak dan biaya paling besar.

Dalam konteks ini, PPN 12% menjadi solusi fiskal jangka pendek yang menimbulkan masalah struktural jangka panjang.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENCEGAH INDONESIA CEMAS

## 1. BATALKAN ATAU TUNDA KENAIKAN PPN 12%

Kenaikan PPN berisiko mempercepat penyusutan kelas menengah dan melemahkan konsumsi. Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih adil dan berdampak sistemik.

## 2. OPTIMALKAN PENDAPATAN NEGARA DARI SUMBER ALTERNATIF

Beberapa sumber alternatif pendapatan negara di antaranya: *Pertama* penyitaan aset likuid dari kasus mega-korupsi dan kejahatan ekonomi. *Kedua*, Penindakan tegas bandar judi daring dan ekonomi ilegal. *Ketiga*, Audit dan perampasan aset pejabat publik yang tidak dapat menjelaskan asal-usul kekayaannya. Pendekatan ini tidak hanya menambah penerimaan, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.

## 3. PANGKAS BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK PRODUKTIF

Pemangkasan ini diantaranya dapat dilakukan melalui beberapa inisiatif kebijakan di antaranya: *Pertama*, pemerintah perlu mengurangi belanja rutin dan program yang tidak menghasilkan *multiplier effect* signifikan. *Kedua*, meninjau ulang proyek mercusuar dan program populis berbasis analisis Social Return on Investment (SROI).

## 4. PERBAIKI IKLIM INVESTASI SECARA SERIUS

Perbaikan iklim investasi dapat dilakukan diantaranya melalui: *Pertama*, penyederhanaan perizinan pusat-daerah. *Kedua*, *penghapusan* pungutan informal dan biaya politik. *Ketiga* penegakan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Ketuganya memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal yang menjadi fondasi kelas menengah.

## 5. TINJAU ULANG KEBIJAKAN IMPOR DAN EKSPOR

Penginjauan kebijakan impor dan ekspor ini perlu mendorong inisiatif struktural dari negara berupa: menghentikan regulasi yang distortif dan berbasis rente serta penyalarsan kebijakan perdagangan dengan strategi penguatan kapasitas industri nasional.

## 6. LINDUNGI DAN PERKUAT KELAS MENENGAH

Upaya perlindungan dan memperkuat kelas menengah dapat dilakukan melalui perancangan kebijakan fiskal yang lebih progresif, pengurangan beban biaya hidup di sektor energi, transportasi, pendidikan, serta mendorong transisi UMKM ke sektor formal dengan insentif yang nyata.

## 7. EVALUASI PROGRAM POPULIS SECARA KRITIS

Pemerintah perlu menguji dampak jangka panjang program-program populis. Pemerintah perlu mengingat bahwa program sosial negara bukan sekadar popularitas politik jangka pendek.

## PENUTUP

Indonesia Emas tidak akan tercapai tanpa kelas menengah yang kuat, percaya diri, dan memiliki daya beli. Kebijakan fiskal yang menggerus kelas menengah sama artinya dengan melemahkan mesin utama pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Rencana kenaikan PPN 12% adalah momen refleksi: apakah Indonesia akan memilih jalan pintas fiskal yang berisiko, atau melakukan reformasi struktural yang lebih adil dan berkelanjutan. Pilihan hari ini akan menentukan apakah masa depan Indonesia bercahaya—atau justru cemas.



# UTANG NEGARA DAN JANJI PEMBANGUNAN SOSIAL: MENGAPA HASILNYA TIDAK SEBANDING?

JANUARI 2025

*Selama satu dekade terakhir, utang pemerintah Indonesia meningkat sangat pesat. Dari sekitar Rp 2.600 triliun pada 2014, jumlah utang melonjak menjadi lebih dari Rp 8.400 triliun menjelang akhir 2024. Kenaikan ini kerap dibenarkan sebagai strategi pembangunan: membangun infrastruktur, memperluas bantuan sosial, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.*

*Namun pertanyaan kunci yang perlu diajukan publik adalah: apakah lonjakan utang tersebut benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat?*

*Telaah ini menunjukkan bahwa jawabannya cenderung tidak proporsional.*



*Secara sederhana, utang seharusnya menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas negara membiayai pelayanan publik. Namun data menunjukkan bahwa selama periode 2014–2024, laju pertumbuhan utang pemerintah rata-rata jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar sekitar 5 persen per tahun.*

*Akibatnya, rasio utang terhadap pendapatan negara meningkat tajam. Beban pembayaran bunga dan pokok utang—yang tercermin dalam Debt Service Ratio—mendekati 40 persen pada 2024. Artinya, hampir separuh pendapatan negara terserap untuk membayar kewajiban masa lalu, bukan untuk kebutuhan masa kini.*

**UTANG TUMBUH LEBIH CEPAT DARI EKONOMI**

## DAMPAK SOSIAL YANG MINIM

Utang tidak selalu buruk jika utang digunakan secara efektif. Dampak dari utang seharusnya dapat terlihat dari perbaikan yang signifikan pada indikator kesejahteraan. Namun kenyataannya di Indonesia terlihat beberapa indikator yaitu:

1. Tingkat kemiskinan hanya turun sekitar 1,9 persen dalam sepuluh tahun.
2. Ketimpangan sosial (rasio Gini) menurun sangat tipis.

Dengan kata lain, dengan kenaikan utang ribuan triliun rupiah namun hanya menghasilkan perbaikan sosial yang terbatas. Situasi ini sebenarnya menunjukkan adanya masalah serius bukan pada jumlah utang, melainkan pada bagaimana utang dikelola dan digunakan dalam sistem keuangan dan kebijakan negara.

## KE MANA PERGINYA UTANG?

Analisis menunjukkan **tiga pola utama penggunaan utang yang bermasalah.**

### 1.

Pembangunan infrastruktur berbiaya mahal yang tidak direncanakan dengan baik. Banyak proyek tidak menciptakan ungkitan ekonomi lokal maupun nasional yang memadai. Infrastruktur dibangun, tetapi tidak terhubung dengan penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

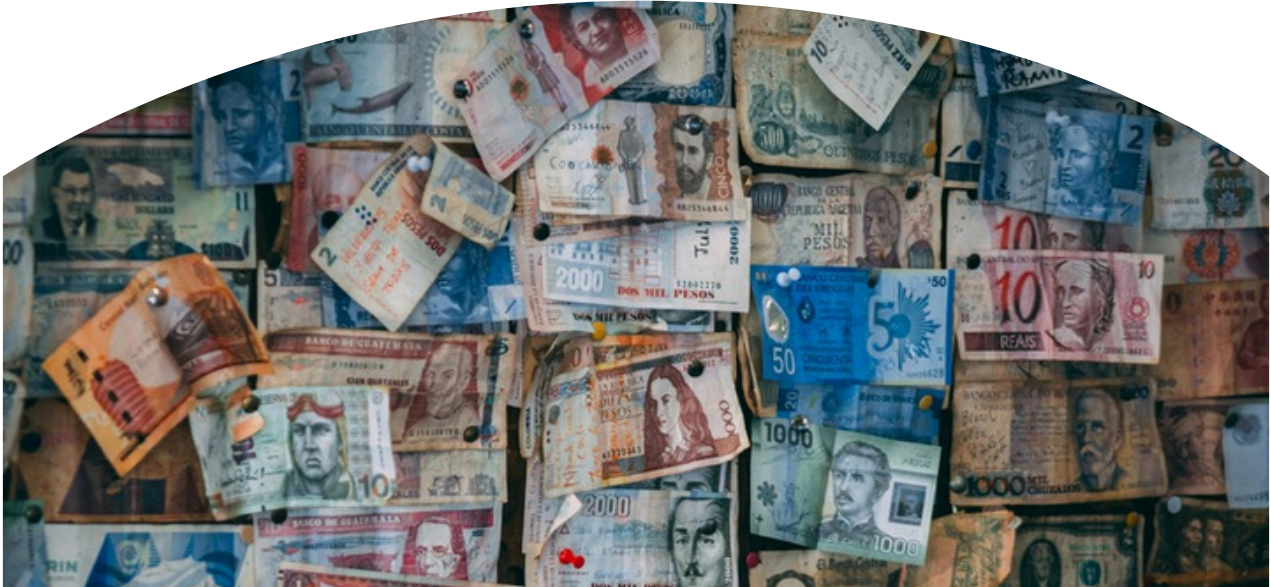
### 2.

Bantuan sosial dan transfer tunai yang berbasis data tidak akurat dan sering sarat kepentingan politik. Program semacam ini membantu konsumsi jangka pendek, tetapi tidak memperkuat mata pencaharian produktif.

### 3.

Terjadinya korupsi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sejak tahap kebijakan, konsesi, hingga pelaksanaan, sebagian utang “bocor” dan lebih banyak dinikmati oleh elit dan kroni, bukan masyarakat luas.

# RETIKA UTANG MENJADI BEBAN PEMBANGUNAN



Pengelolaan utang yang tidak efektif tidak hanya gagal membantu kondisi pembangunan sosial, tetapi justru menciptakan risiko baru di masyarakat. Beban pembayaran utang yang besar mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, ketika anggaran tersedot untuk membayar bunga, kualitas layanan publik akan menurun, terutama bagi kelompok rentan. Risiko ini perlu terus dimitigasi oleh penyelenggara negara.

Dalam jangka panjang, kondisi ini memicu fenomena **debt overhang**. Kondisi ini akan memiliki konsekuensi bahwa investor enggan menanamkan modal karena khawatir keuntungan ekonomi akan “dipajaki” oleh otoritas pemerintah setempat untuk membayar utang. Dalam pendekatan sistem, negara pun akan berisiko terjebak dalam siklus utang dengan mengambil utang baru untuk menutup utang lamanya.

**Lebih jauh, ketergantungan pada pemberi pinjaman dapat menggerus kedaulatan ekonomi dan politik, karena kebijakan nasional menjadi sangat rentan terhadap tekanan eksternal.**

# DAMPAK SOSIAL YANG TIDAK TERLIHAT

Ketika belanja publik ditekan akibat kewajiban utang, pembangunan sosial akan terhambat. Akses warga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar akan menurun kualitasnya. Dalam situasi seperti ini, angka dan situasi kemiskinan dan ketimpangan struktural bukan hanya sulit diturunkan, tetapi berpotensi meningkat kembali di masa mendatang. Ironisnya, di Indonesia utang yang awalnya diambil atas nama pembangunan sosial justru dapat memperlebar jarak antara janji kebijakan dan realitas kesejahteraan.

## APA YANG PERLU DIUBAH?

Telaah ini menegaskan bahwa solusi bukan sekadar mengurangi atau menambah utang, melainkan mengubah tata kelola keuangan dan prioritas program pembangunan.

Beberapa langkah kunci meliputi:

1. **Perampingan birokrasi.** Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya rutin dan mengurangi peluang penyimpangan penggunaan anggaran.
2. **Peninjauan ulang prioritas program.** Prioritas program berfokus pada kegiatan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang terukur.
3. **Membuka keterlibatan sektor swasta secara luas,** Keterlibatan sektor swasta akan memberikan tuntutan tata kelola yang transparan dan bukan hanya dikuasai oleh kelompok kroni.
4. **Pelibatan masyarakat sipil dalam layanan sosial,** Masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dasar berdasarkan prinsip subsidiaritas.
5. **Pertumbuhan ekonomi berbasis luas,** Pertumbuhan ekonomi yang luas dapat memanfaatkan potensi lokal dan tidak hanya memusatkan manfaat pada segelintir aktor.

## PENUTUP

Dalam pengelolaan keuangan negara, utang bukanlah musuh pembangunan. Namun, utang yang dikelola tanpa akuntabilitas, disertai perencanaan yang matang, dan orientasi kesejahteraan justru dapat menjadi penghambat pembangunan sosial.

Tantangan bagi pemerintah Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga rasio utang, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah penggunaan utang benar-benar bekerja dan didedikasikan untuk masyarakat.

Menjadi pengingat untuk para aparat penyelenggara negara dalam level apapun (dari pusat hingga desa), bahwa tanpa adanya perubahan mendasar dalam tata kelola, utang akan terus bertambah. Sementara itu kesejahteraan hanya bergerak di tempat dan tidak nampak dampaknya.





# BELAJAR DARI AMERIKA LATIN:

## TIGA KRISIS, TIGA PERINGATAN BAGI INDONESIA

FEBRUARI 2025



*Amerika Latin sering disebut sebagai laboratorium kebijakan pembangunan bagi negara berkembang. Di kawasan ini, kita menemukan contoh negara yang runtuh akibat salah urus sumber daya, negara yang tumbuh tetapi memicu kemarahan sosial, serta negara yang mencoba melakukan koreksi ekstrem terhadap krisis fiskal dan sosial.*

*Telaah atas pengalaman Venezuela, Chile, dan Argentina memberikan pelajaran penting bagi Indonesia: pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola secara inklusif dan berkelanjutan, dapat berubah menjadi sumber krisis sosial dan politik.*

## VENEZUELA: KETIKA KERAYAAN ALAM MENJADI KUTURAN

Venezuela adalah contoh klasik ketergantungan berlebihan pada satu komoditas. Lebih dari 90 persen pendapatan ekspor negara ini berasal dari minyak. Ketika harga minyak dunia jatuh pada 2014, fondasi fiskal negara runtuh.

Masalah Venezuela bukan hanya harga minyak, tetapi juga salah urus yang kronis. Nasionalisasi industri, kontrol harga yang ketat, dan lemahnya tata kelola perusahaan minyak negara menyebabkan penurunan produksi bahkan sebelum krisis harga terjadi.

Pemerintah menutup defisit dengan mencetak uang, memicu hiperinflasi yang mencapai jutaan persen.

Dampaknya meluas: kelangkaan pangan dan obat, runtuhnya layanan kesehatan dan pendidikan, serta migrasi keluar lebih dari tujuh juta warga. Infrastruktur energi memburuk, lingkungan rusak, dan ekonomi lokal yang bergantung pada pertanian ikut terpuruk.

### **Pelajaran utama:**

kekayaan sumber daya alam tanpa tata kelola yang transparan dan berkelanjutan justru mempercepat kehancuran ekonomi dan sosial.



## CHILE: PERTUMBUHAN TINGGI, KETIDAKPUASAN SOSIAL

Berbeda dengan Venezuela, Chile sering dipuji sebagai kisah sukses ekonomi Amerika Latin. Pertumbuhan stabil, kemiskinan menurun, dan institusi relatif kuat. Namun pada 2019, protes sosial besar-besaran meledak dan mengejutkan dunia.

Fenomena ini dikenal sebagai Chilean Paradox: keberhasilan makroekonomi yang berjalan berdampingan dengan ketimpangan struktural dan rasa ketidakadilan yang mendalam.

Reformasi berorientasi pasar sejak era 1970-an memang mendorong efisiensi, tetapi juga memprivatisasi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pensiun.

Banyak warga bekerja, tetapi tetap merasa tidak aman secara ekonomi. Upah stagnan, biaya hidup tinggi, dan akses terhadap layanan publik bergantung pada kemampuan membayar. Kekayaan dari tembaga dan sumber daya lain lebih banyak dinikmati perusahaan besar dan investor, sementara masyarakat menanggung dampak lingkungan dan sosial.

**Pelajaran utama:** pertumbuhan tanpa keadilan sosial akan menciptakan krisis legitimasi, meskipun indikator ekonomi tampak sehat.





# BENANG MERAH DARI TIGA NEGARA



Dari ketiga kasus berbasis negara tersebut, muncul pola yang konsisten:

1. **Ketergantungan pada sumber daya alam** membuat ekonomi rentan terhadap guncangan harga.
2. **Privatisasi tanpa pengawasan** menciptakan oligopoli dan memperlebar kesenjangan.
3. **Program sosial yang tidak mendorong mobilitas** justru menimbulkan ketergantungan.
4. **Birokrasi yang besar dan lamban** menguras anggaran tanpa memperbaiki pelayanan.

**Masalah-masalah tersebut di atas bukan khas Amerika Latin. Mereka adalah risiko yang juga dihadapi Indonesia jika kebijakan pembangunan tidak dikoreksi sejak dini.**

## **APA RELEVANSINYA BAGI INDONESIA?**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan pasar domestik besar. Namun pengalaman Amerika Latin memperingatkan bahwa:

- SDA harus dikelola secara inklusif dan berkelanjutan, bukan dikonsentrasikan pada segelintir kelompok.
- Hilirisasi perlu memastikan distribusi nilai tambah ke pelaku ekonomi lokal, bukan hanya korporasi besar.
- Bantuan sosial harus dirancang untuk membuka jalan mobilitas sosial, bukan sekadar menjaga konsumsi.
- Reformasi birokrasi dan otomatisasi pelayanan publik mutlak agar negara responsif dan efisien.

### **CATATAN**

Venezuela, Chile, dan Argentina menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan melalui kebijakan yang tampak rasional di awal, tetapi mengabaikan keberlanjutan, keadilan, dan tata kelola.

Bagi Indonesia, pelajaran ini adalah peringatan dini. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan angka tanpa memperhatikan distribusi manfaat dan kualitas institusi berisiko menciptakan krisis di masa depan. Belajar dari pengalaman negara lain bukan untuk meniru, tetapi untuk menghindari kesalahan yang sama.

## **SIMULASI SKENARIO RISIKO BAGI INDONESIA: PELAJARAN DARI VENEZUELA, CHILE, DAN ARGENTINA**

Untuk memahami risiko ke depan, lembaga kami menyusun simulasi tiga skenario bagi Indonesia. Setiap skenario merepresentasikan jalur kebijakan yang masuk akal secara politik, tetapi berpotensi menimbulkan krisis struktural bila tidak dikoreksi sejak dini.

# SKENARIO 1 “JALUR VENEZUELA”: RUTUKAN SUMBER DAYA DAN KERUNTUHAN BERTAHAP

## PEMICHU UTAMA

- Ketergantungan berlebihan pada ekspor komoditas mentah (batubara, nikel, sawit).
- Hilirisasi terbatas pada ekstraksi dan smelter, tanpa penguasaan teknologi, riset, dan manufaktur lanjut.
- Penerimaan negara sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.
- Korupsi dan konsesi sumber daya terkonsentrasi pada elit dan kroni.

## DINAMIKA RISIKO

- Harga komoditas global turun → penerimaan negara anjlok.
- Defisit fiskal meningkat → utang bertambah cepat.
- Infrastruktur dan bansos tetap dipertahankan tanpa basis produktif → pembiayaan makin rapuh.
- Tekanan fiskal → pemotongan layanan publik atau pencetakan utang baru.

## DAMPAK SOSIAL EKONOMI

- Daya beli runtuh secara tiba-tiba.
- Layanan kesehatan, pendidikan, dan energi menurun kualitasnya.
- Migrasi tenaga kerja meningkat (brain drain).
- Ketidakpercayaan publik terhadap negara.

## INDIKATOR DINI

- Rasio utang terhadap penerimaan negara melonjak cepat.
- Penurunan tajam belanja sosial per kapita.
- Konsentrasi konsesi SDA pada segelintir kelompok usaha.

## Risiko Utama

**Krisis fiskal dan sosial yang cepat dan sulit dipulihkan.**

## SKENARIO 2 “PARADOKS CHILE”: STABIL SECARA MAKRO, GUNCANG SECARA SOSIAL

### PEMICU UTAMA

- Pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan inflasi terkendali.
- Privatisasi dan komersialisasi layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pensiun).
- Ketimpangan pendapatan dan kekayaan tidak tertangani secara struktural.
- Kelas menengah tumbuh, tetapi rentan dan penuh utang.

### DINAMIKA RISIKO

- PDB tumbuh, tetapi biaya hidup naik lebih cepat dari upah.
- Layanan publik berkualitas hanya bisa diakses kelompok tertentu.
- Ekspektasi masyarakat meningkat, sementara mobilitas sosial stagnan.
- Ketidakpuasan menumpuk → ledakan protes sosial.

### DAMPAK SOSIAL EKONOMI

- Demonstrasi besar dan krisis legitimasi politik.
- Tekanan pada institusi demokrasi.
- Investor menghadapi ketidakpastian sosial jangka menengah.

### INDIKATOR DINI

- Utang rumah tangga meningkat.
- Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan.
- Penurunan kepercayaan publik pada institusi negara.

### Risiko Utama

**Stabilitas semu yang berujung pada krisis legitimasi dan konflik sosial.**

# SKENARIO 3 “JALUR ARGENTINA”: KOREKSI FISKAL KERAS DAN RISIKO GEJOLAK

## PEMICU UTAMA

- Defisit fiskal kronis dan utang tinggi.
- Tekanan pasar dan investor untuk disiplin fiskal ekstrem.
- Reformasi dilakukan cepat dan top-down.

## DINAMIKA RISIKO

- Pemangkasan subsidi dan belanja sosial secara drastis.
- Perampangan birokrasi dan pengurangan peran negara.
- Penyesuaian upah dan pensiun di bawah inflasi.
- Ketimpangan jangka pendek meningkat sebelum manfaat reformasi terasa.

## DAMPAK SOSIAL EKONOMI

- Lonjakan kemiskinan sementara.
- Protes sosial dan resistensi politik.
- Reformasi berisiko dibatalkan sebelum matang.

## INDIKATOR DINI

- Pemotongan subsidi tanpa mekanisme kompensasi.
- Penurunan tajam belanja sosial.
- Meningkatnya konflik industrial dan sosial.

**Risiko Utama**  
**Stabilisasi ekonomi dicapai dengan biaya sosial dan politik yang tinggi.**

## RINGKASAN PERBANDINGAN SKENARIO

SKENARIO	RISIKO EKONOMI	RISIKO SOSIAL	RISIKO POLITIK	SIFAT KRISIS
<b>Jalur Venezuela</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Runtuh Sistemik
<b>Paradoks Chile</b>	Sedang	Tinggi	Sedang - Tinggi	Ledakan Legitimasi
<b>Jalur Argentina</b>	Sedang	Sedang - Tinggi	Tinggi	Guncangan Transisi

### SKENARIO ALTERNATIF YANG DISARANKAN: “JALUR KOREKSI INDONESIA”

Berdasarkan tiga kasus tersebut, jalur paling rasional bagi Indonesia adalah menghindari ketiganya sekaligus, dengan strategi berikut:

1. Mengelola SDA sebagai basis industri dan inovasi, bukan sekadar ekspor.
2. Menjaga disiplin fiskal bertahap, bukan kejut (shock therapy).
3. Memperkuat layanan publik universal agar kelas menengah tidak rapuh.
4. Mendesain bansos sebagai jembatan mobilitas sosial, bukan subsidi permanen.

Membatasi konsentrasi ekonomi dan rente, agar legitimasi politik terjaga.

## PENUTUP

Simulasi ini menunjukkan bahwa krisis bukanlah peristiwa mendadak, melainkan akumulasi keputusan kebijakan. Indonesia masih memiliki ruang untuk memilih jalur yang lebih stabil dan adil—tetapi ruang itu akan menyempit jika koreksi ditunda. Belajar dari Amerika Latin bukan soal meniru kebijakan mereka, melainkan menghindari lintasan kegagalan yang sudah terbukti.

# BPI DANANTARA DI PERSIMPANGAN JALAN: BELAJAR DARI KEBERHASILAN TEMASEK DAN KEGAGALAN 1MDB

MARET 2025



*Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menandai babak baru dalam pengelolaan kekayaan negara Indonesia. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk mengonsolidasikan aset negara, meningkatkan efisiensi investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.*

*Namun, sejarah internasional menunjukkan bahwa lembaga sejenis dapat menjadi mesin pembangunan nasional atau justru berubah menjadi episentrum krisis dan korupsi. Pengalaman dua negara tetangga—Singapura dengan Temasek Holdings dan Malaysia dengan 1MDB—memberikan pelajaran yang sangat kontras bagi Indonesia.*

# APA ITU SOVEREIGN DEVELOPMENT FUND DAN POSISI DANANTARA?



Sovereign Development Fund (SDF) adalah dana investasi milik negara yang bertujuan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan finansial jangka pendek. Berbeda dengan sovereign wealth fund yang murni berorientasi stabilisasi atau tabungan, SDF memiliki mandat pembangunan: industrialisasi, infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Danantara dibentuk dengan misi yang ambisius: mengelola kekayaan negara secara profesional, menjadi katalis investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Secara normatif, mandat ini selaras dengan Pasal 33 UUD 1945. Namun, tantangan utama Danantara bukan terletak pada visi, melainkan pada tata kelola dan konteks politik-ekonominya.

## KONTEKS RISIKO: MENGAPA PUBLIK WAJAR KHAWATIR?

Pembentukan Danantara berlangsung dalam konteks yang tidak netral. Sejumlah kasus besar seperti Jiwasraya, ASABRI, dan mega-korupsi di BUMN strategis menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan. Selain itu:

- Modal awal Danantara tidak berasal dari surplus fiskal, melainkan dari “efisiensi” yang berdampak langsung pada fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur.
- Banyak BUMN infrastruktur menanggung utang besar dan mengalami gagal bayar.
- Penanganan kasus korupsi BUMN belum sepenuhnya diikuti reformasi tata kelola yang mendasar.

Tidak mengherankan jika pasar merespons pembentukan Danantara dengan hati-hati, bahkan negatif, tercermin dari pelemahan IHSG, tekanan nilai tukar, dan pergeseran dana dari bank BUMN ke bank swasta.

## DUA MODEL YANG BERTOLAK BELAKANG: TEMASEK VS 1MDB



### PELAJARAN DARI TEMASEK HOLDINGS

Keberhasilan Temasek bukan terjadi karena kebetulan. Ia dibangun di atas fondasi:

- Tata kelola yang kuat: dewan independen, audit ketat, dan akuntabilitas jelas kepada Kementerian Keuangan.
- Transparansi tinggi: laporan tahunan terbuka, strategi dan kinerja dikomunikasikan ke publik.
- Fokus jangka panjang dan diversifikasi: investasi lintas sektor dan negara, dengan manajemen risiko disiplin.
- Kepemimpinan profesional dan etis: minim intervensi politik dalam keputusan investasi.

### PELAJARAN PAHIT DARI 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD (1MDB)

Sebaliknya, 1MDB menjadi contoh kegagalan SDF yang paling ekstrem:

- Tata kelola lemah dan penuh intervensi politik.
- Transparansi minim, laporan keuangan bermasalah.
- Investasi spekulatif dan terkonsentrasi, dibiayai utang besar.
- Budaya organisasi yang tertutup dan sarat konflik kepentingan.

Skandal 1MDB tidak hanya merugikan keuangan negara Malaysia, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan reputasi internasional.

### Hasilnya,

Temasek konsisten menciptakan nilai, memperkuat cadangan nasional, dan menjaga kepercayaan publik.

## DI MANA POSISI DANANTARA HARI INI?



Danantara berada di persimpangan antara dua model kelembagaan dan tata kelola yang dikembangkan dan dipraktikkan di Temasek Singapura dan IMDB Malaysia. Tanpa koreksi yang serius, risiko yang dihadapi bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga meliputi beberapa aspek risiko:

- **Moral hazard sistemik** muncul ketika Danantara dipersepsikan akan selalu diselamatkan negara, sehingga disiplin pengelolaan risiko melemah. Implicit sovereign guarantee mendorong pengambilan keputusan berisiko tinggi, melemahkan uji kelayakan investasi, dan menormalisasi kegagalan sebagai beban publik di masa depan, bukan sebagai tanggung jawab manajerial.
- **Penangkapan institusi oleh elit dan kroni** terjadi ketika Danantara kehilangan independensinya dan alokasi investasi dipengaruhi kepentingan politik serta jejaring kekuasaan. Ketidakjelasan mandat, kepemimpinan politis, dan minimnya transparansi membuka ruang bagi proyek strategis yang lebih melayani kepentingan kelompok tertentu daripada penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.
- **Beban fiskal tersembunyi di masa depan** timbul dari kewajiban implisit yang tidak tercatat dalam APBN namun berpotensi ditanggung negara saat proyek gagal. Melalui skema off-balance sheet dan keterkaitan dengan BUMN atau sektor keuangan, risiko Danantara dapat berubah menjadi tekanan fiskal mendadak yang membebani keuangan negara dan generasi berikutnya.

Dengan kata lain, Danantara dapat menjadi Temasek versi Indonesia—atau IMDB dengan skala yang lebih besar.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENJAGA DANANTARA TETAP DI JALUR PEMBANGUNAN

Berikut rekomendasi kebijakan yang disusun agar Danantara berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional, bukan sumber risiko baru.

## 1. MEMPERKUAT TATA KELOLA DAN PENGAWASAN SEBAGAI PRIORITAS UTAMA

Rekomendasi ini akan mewajibkan audit independen tahunan tanpa pengecualian, bagi siapapun yang memegang otoritas pada lembaga Danantara. Langkah ini diikuti dengan memastikan dewan pengawas dan direksi secara mayoritas berasal dari profesional yang independen, bukan representasi politik sebagai balas jasa. Rekomendasi ini disertai dengan penghapusan atau revisi aturan-aturan yang membatasi akses audit publik dan parlemen. Tata kelola dan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah moral hazard dan mengunci akuntabilitas sejak awal pendirian lembaga.

## 2. TRANSPARANSI SEBAGAI FONDASI KEPERCAYAAN PUBLIK

Rekomendasi kedua adalah mendorong kewajiban publikasi secara terbuka laporan tahunan dengan terperinci baik portofolio, risiko, kinerja, dan remunerasi). Manajemen harus memastikan tersedianya mekanisme komunikasi publik yang proaktif dan rutin. Pelaporan adalah hilir dari upata transparansi kelembagaan, untuk itu penerapan standar pelaporan harus setara atau lebih tinggi dari Temasek. Transparansi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pasar, publik, dan investor internasional.

## 3. TEGASKAN FOKUS STRATEGIS DAN BATASAN INVESTASI

Rekomendasi ketiga adalah membatasi investasi spekulatif dan proyek mercusuar berisiko yang tinggi. Pengelola Danantara harus memprioritaskan sektor dengan *multiplier effect* yang tinggi dan nilai tambah domestik yang terukur. Sejalan dengan ini maka perlu penerapan diversifikasi portofolio di lintas sektor dan kewilayahan. Fokus kelembagaan yang strategis ini bertujuan untuk menghindari jebakan investasi jangka pendek dan konsentrasi risiko ala IMDB.

## 4. LINDUNGI DANANTARA DARI INTERVENSI POLITIK

Rekomendasi keempat adalah memisahkan secara tegas proses pengambilan keputusan investasi dari agenda politik jangka pendek. Pemerintah dan pengelola harus menetapkan *firewall institusional* antara Danantara, BUMN, dan elite kekuasaan. Kebijakan ini perlu pula disertai dengan pelarangan penggunaan Danantara sebagai alat penutup defisit atau *bailout* politik. Perlindungan Danantara dari intervensi politik bertujuan untuk menjamin independensi dan keberlanjutan jangka panjang siapapun rezim yang berkuasa di negeri ini.

# REKOMENDASI KUNCI

## MEMBANGUN BUDAYA ETIKA DAN KEPEMIMPINAN PROFESIONAL



Etika ketatanegaraan berjalan seiring dengan etika bisnis yang mendasari proses bisnis Danantara. Untuk itu kami menyampaikan rekomendasi budaya etika dalam tata kelola lembaga Danantara. Budaya etika ini tidak berdiri sendiri dalam sistem institusi Danantara, ia berjalan seiring dengan penguatan kepemimpinan profesional,

Rekomendasi kunci ini berupa penerapan standar integritas, kebijakan anti konflik kepentingan, dan regulasi sanksi yang ketat terkait dengan etika bisnis.

Langkah konkritnya adalah perekrutan pimpinan dengan **rekam jejak** internasional dan kredibilitas tinggi.

Penerapan **sistem whistleblower** yang harus melindungi pelapor saat terjadi pelanggaran di institusi.

**Budaya etika dan kepemimpinan profesional** ini bertujuan untuk mencegah terjadinya budaya “toxic” yang menjadi akar kegagalan TMDB.

## PENUTUP

Danantara bukan sekadar lembaga investasi; ia adalah cerminan arah tata kelola negara. Jika dibangun di atas transparansi, profesionalisme, dan disiplin institusional, Danantara dapat menjadi katalis transformasi ekonomi Indonesia. Namun jika dilepas tanpa pengawasan dan dibajak kepentingan jangka pendek, risikonya akan ditanggung oleh generasi mendatang. Pilihan tersebut sedang dibuat hari ini—dan tidak bisa ditunda.



# A QUESTION OF CONTROL



JOHN BULL: Hullo, what are you doing with my dog?  
LANSDOWNE | Please, Sir, we're taking care that he's always under control.  
BALFOUR  
JOHN BULL: Oh, really! Then I'll thank you to leave him alone—I see I shall have to take away those chains.  
The dog's a good dog, he only does what I tell him, and I really will NOT have him "controlled" by a couple of dismissed  
Tory Ministers.

704.

Printed and Published by The Associated Press, Ltd., 11, Abchurch Lane, London, E.C. 4.

# PEMBUSUKAN POLITIK DI INDONESIA: GEJALA, RISIKO, DAN JALAN KELUAR

APRIL 2025



*Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia semakin sering mempertanyakan arah demokrasi dan kualitas pemerintahan. Di tengah pemilu yang rutin, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, dan pembangunan infrastruktur yang masif, muncul kegelisahan yang lebih mendasar: apakah institusi politik kita masih bekerja untuk kepentingan publik, atau justru mengalami pembusukan dari dalam?*

*Istilah pembusukan politik merujuk pada kemerosotan fungsi dan legitimasi lembaga-lembaga politik—ketika hukum tidak lagi ditegakkan secara adil, kekuasaan dipertahankan melalui relasi personal dan rente, serta kepercayaan publik terus menurun. Proses ini jarang terjadi secara tiba-tiba; ia berlangsung perlahan, sering kali dibungkus oleh prosedur formal yang tampak sah.*

# APA ITU PEMBUSUKAN POLITIK?



Situasi ini terjadi di masyarakat demokratis, di mana pembusukan politik terjadi ketika institusi demokrasi mengalami kegagalan dalam menjalankan peran dasarnya, penyalahgunaan lembaga politik untuk kepentingan elit, serta lembaga politik kehilangan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat.

Gejalanya tidak selalu berupa kudeta atau pembubaran parlemen. Justru sebaliknya, pembusukan sering terjadi di dalam sistem demokrasi itu sendiri, melalui manipulasi aturan, pelemahan pengawasan, dan normalisasi praktik tidak etis.

# GEJALA UTAMA YANG PERLU DIWASPADAI

## **1. Penyalahgunaan Lembaga dan Proses Politik**

Institusi seperti pemilu, pengisian jabatan publik, dan perumusan kebijakan dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan jangka pendek elit. Rekrutmen pejabat tidak lagi berbasis merit dan kompetensi, melainkan relasi keluarga, loyalitas politik, dan transaksi kekuasaan.

## **2. Erosi Supremasi Hukum**

Hukum diterapkan secara selektif. Kasus korupsi besar dapat diproses secara prosedural tanpa keadilan substantif, sementara pelaku yang dekat dengan kekuasaan menikmati impunitas. Penegakan hukum berubah dari instrumen keadilan menjadi alat politik.

## **3. Hilangnya Kepercayaan Publik**

Ketika publik melihat bahwa aturan tidak berlaku sama untuk semua, kepercayaan terhadap negara dan lembaga politik menurun. Partisipasi politik melemah, sementara sinisme dan apatisme meningkat.

## **4. Populisme dan Polarisasi**

Isu identitas, SARA, dan sentimen emosional dieksploitasi untuk meraih dukungan politik. Program, gagasan, dan rekam jejak dikesampingkan. Polarisasi ini merusak kohesi sosial dan norma demokrasi.

## **5. Ketimpangan Politik dan Ekonomi**

Kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit yang saling melindungi. Kebijakan publik cenderung melayani kepentingan mereka, sementara mayoritas warga hanya menjadi objek kebijakan.

## **BAGAIMANA PEMBUSUKAN POLITIK TERJADI? (1/1)**

**01**

**Korupsi,  
kronisme,  
dan  
nepotisme  
yang  
merusak  
institusi dari  
dalam.**

Pertama, pembusukan politik berakar pada korupsi, kronisme, dan nepotisme yang merusak institusi dari dalam. Praktik-praktik ini mengubah lembaga publik dari instrumen pelayanan menjadi alat distribusi rente dan kekuasaan. Ketika loyalitas dan kedekatan personal lebih menentukan daripada integritas dan kapasitas, institusi negara kehilangan fungsi rasional dan legitimasi sosialnya.

**02**

**Pelemahan  
masyarakat  
sipil**

Kedua, pelemahan masyarakat sipil mempercepat pembusukan politik secara sistemik. Pembatasan ruang publik, kooptasi organisasi masyarakat, serta kriminalisasi kritik membuat mekanisme kontrol warga terhadap negara menjadi tumpul. Dalam situasi ini, kritik tidak lagi dipandang sebagai koreksi demokratis, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.

**03**

**Oligarki  
politik**

Ketiga, oligarki politik memperdalam pembusukan ketika hampir seluruh kekuatan politik berbagi kepentingan dan kekuasaan. Absennya oposisi substantif menjadikan proses politik kehilangan kompetisi ide dan visi alternatif. Politik kemudian beroperasi sebagai kartel elite, di mana konflik disimulasikan, sementara konsensus sesungguhnya terletak pada perlindungan kepentingan bersama kelompok berkuasa.

# BAGAIMANA PEMBUSUKAN POLITIK TERJADI? (1/2)

01

## Erosi norma demokrasi

Keempat, erosi norma demokrasi menandai tahap lanjut dari pembusukan politik. Manipulasi hukum, tekanan terhadap media, dan intervensi terhadap lembaga independen merusak prinsip checks and balances. Demokrasi tetap dipertahankan secara prosedural, tetapi dikosongkan dari substansi akuntabilitas dan kebebasan.

02

## Ketimpangan Ekonomi

Kelima, ketimpangan ekonomi menjadi fondasi material yang menopang pembusukan politik. Konsentrasi kekayaan memungkinkan kekuatan modal mengendalikan arah kebijakan melalui pendanaan politik, lobi, dan pengaruh struktural lainnya. Akibatnya, negara lebih responsif terhadap kepentingan pemilik modal dibandingkan kebutuhan mayoritas warga.

**Salah satu contoh krusial adalah manipulasi penanganan korupsi. Ketika korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, dan lembaga pengawas dilemahkan, maka sistem kehilangan mekanisme koreksi internalnya.**

# MENGAPA PEMBUSUKAN POLITIK INI BERBAHAYA?

Konsekuensi pembusukan politik sangat serius, berikut beberapa catatan kami:

**Pertama, pembusukan politik memicu ketidakstabilan politik dan gejolak sosial.**

Ketika institusi tidak lagi dipercaya dan kebijakan dipersepsikan melayani kepentingan sempit, potensi konflik horizontal dan vertikal meningkat. Ketidakpuasan publik mudah bermetamorfosis menjadi protes sosial, polarisasi, dan instabilitas yang mengganggu tata kelola negara.

**Kedua, pembusukan politik berkontribusi pada krisis ekonomi melalui hilangnya kepercayaan investor dan publik.**

Ketidakpastian hukum, praktik rente, dan kebijakan yang tidak konsisten membuat iklim usaha rapuh. Dalam jangka menengah, kondisi ini menekan investasi, memperlambat pertumbuhan, dan memperbesar biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat luas.

**Ketiga, legitimasi pemerintah melemah ketika pembusukan politik menjadi fenomena struktural.**

Pemerintah tetap berkuasa secara formal, tetapi kehilangan dukungan moral dan kepercayaan rakyat. Rendahnya legitimasi ini membatasi kapasitas negara dalam menjalankan kebijakan publik, karena setiap keputusan cenderung dipandang dengan kecurigaan dan resistensi.

**Keempat, pembusukan politik membuka jalan bagi kemunduran demokrasi dan munculnya otoritarianisme terselubung.**

Atas nama stabilitas dan efisiensi, pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan institusi demokratis sering dilegitimasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya mencerminkan pemerintahan yang buruk, tetapi menjadi ancaman serius terhadap persatuan nasional dan keberlanjutan negara.

Dalam jangka panjang, pembusukan politik bukan hanya soal pemerintahan yang buruk, tetapi ancaman terhadap persatuan dan keberlanjutan negara.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENCEGAH DAN MEMBALIK PEMBUSUKAN POLITIK

Berikut rekomendasi kebijakan yang disusun agar Indonesia dapat menghentikan—dan membalik—proses pembusukan politik secara sistemik.

## 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

Rekomendasi pertama adalah penerapan proses rekrutmen pejabat publik yang terbuka, berbasis merit dan kompetensi. Negara harus meninjau ulang regulasi yang membuka ruang oligarki berkuasa dan terjadinya konsentrasi/sentralisasi kekuasaan. Pembagian kewenangan antar-lembaga harus dipertegas untuk memastikan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*). Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi institusi sebagai pelayan kepentingan publik, bukan sekadar alat kekuasaan.

## 2. PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN DAN BEBAS INTERVENSI

Rekomendasi kedua berkaitan dengan penegakan hukum secara setara tanpa pandang bulu, terutama terhadap elit-elit politik. Negara harus memastikan korupsi tetap diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa. Perkuat lembaga-lembaga anti rasuah yang beroperasi di Indonesia. Perlu juga adanya perlindungan terhadap independensi lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan. Penegakan hukum ini bertujuan mengakhiri budaya impunitas dan memulihkan kepercayaan publik.

## 3. TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN PROSES POLITIK

Rekomendasi ketiga tentang transparansi dan keterbukaan proses politik. Kebijakan tentang kewajiban keterbukaan dalam pengambilan kebijakan publik dan legislasi harus diperkuat. Salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan adalah memperluas akses publik terhadap data, anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Transparansi bukan sekadar jargon, namun praktik ketatanegaraan yang utama. Peran parlemen dan audit publik perlu diperkuat untuk terus mengawasi proses politik. Transparansi dan keterbukaan proses politik ini bertujuan untuk memastikan pengawasan masyarakat berjalan secara efektif.

#### **4. PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL**

Rekomendasi keempat mencakup penguatan dan perlindungan masyarakat sipil. Negara harus menjamin adanya kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi. Tindakan tegas penggunaan kelompok paramiliter atau kekerasan untuk menekan warga. Negara perlu mencegah terjadinya polarisasi dan mobilisasi politik berbasis SARA. Tujuan jangka panjang pembentukan sistem politik yang partisipatif di mana menjadikan masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan korban politik.

#### **5. PERLINDUNGAN KEBEBASAN AKADEMIK DAN PERS**

Rekomendasi kelima meliputi perlindungan kebebasan akademik di kampus untuk melakukan beragam riset yang memajukan praktik-praktik kelembagaan politik di Indonesia. Lembaga riset harus dihormati kebebasannya dan bukan sekadar alat legitimasi kebijakan publik pemerintah. Lembaga politik harus mendukung praktik jurnalisme yang independen dan beretika. Pers harus diposisikan sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi pengawasan. Negara harus menjamin penghentian praktik kriminalisasi terhadap kritik ilmiah dan pekerja serta karya jurnalistik. Tujuan utama dalam perlindungan kebebasan akademik dan pers adalah menjaga terciptanya ruang-ruang rasional dan berbasis pengetahuan dalam berdemokrasi.

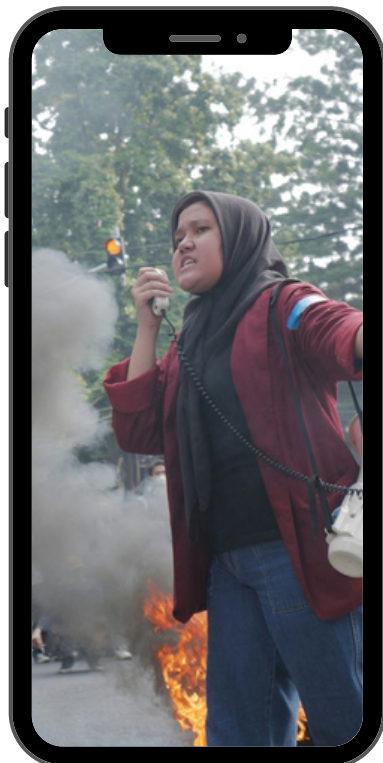
#### **6. KONSOLIDASI NILAI DEMOKRASI DAN PANCASILA**

Rekomendasi kelima berhubungan dengan falsafah dasar dalam pengembangan dan praktik lembaga politik di Indonesia. Negara dan lembaga politiknya harus menjadikan Pancasila sebagai rujukan etika politik, bukan sekadar simbol. Pancasila perlu terefleksikan dalam berbagai platform kebijakan politik yang berpihak pada warga. Negara harus mengintegrasikan pendidikan demokrasi, antikorupsi, dan kewargaan kritis dalam kebijakan publik baik di level pendidikan formal maupun non-formal. Konsolidasi nilai demokrasi dan Pancasila ini bertujuan untuk membangun fondasi moral dan sosial demokrasi yang berkelanjutan.

## PENUTUP

Pembusukan politik bukanlah takdir. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan dan pembiaran yang berulang. Indonesia masih memiliki modal sosial, institusional, dan konstitusional untuk membalik arah ini—tetapi waktu dan ruang koreksi tidak tak terbatas.

Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia membusuk perlahan, hingga suatu hari publik menyadari bahwa prosedur masih ada, tetapi keadilan dan kepercayaan telah hilang. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai peringatan dini—dan sebagai peta jalan untuk mencegahnya



# UNFAIR COMPETITION



*Agriculturist:* There they go to market,  
Tax Free. What's the use of a "Small  
Holding" to me without

**TARIFF REFORM?**

# EKONOMI INDONESIA DI TENGAH PERANG TARIF DUNIA: PELEMAHAN DAYA BELI, TEKANAN GLOBAL, DAN PILIHAN KEBIJAKAN

APRIL 2025



*Lebaran 2025 menjadi penanda penting kondisi ekonomi Indonesia. Alih-alih menjadi puncak perputaran uang seperti tahun-tahun sebelumnya, Lebaran kali ini justru memperlihatkan gejala pelemahan daya beli. Jumlah pemudik menurun tajam, okupansi hotel merosot, dan pusat perbelanjaan ramai oleh pengunjung yang “melihat-lihat” tanpa membeli.*

*Fenomena ini bukan semata anomali musiman. Ia mencerminkan tekanan ekonomi yang lebih dalam, yang bersumber dari kombinasi pelemahan daya beli domestik, iklim usaha yang tidak kondusif, serta guncangan global akibat perang tarif dan perang dagang.*

# LEBARAN YANG SUNYI SEBAGAI SINYAL DINI



Penurunan jumlah pemudik hingga sekitar seperempat dibanding tahun sebelumnya, rendahnya tingkat hunian hotel di berbagai daerah, serta mengecilnya nilai transaksi ritel menunjukkan satu hal: rumah tangga Indonesia sedang menahan konsumsi.

Kondisi ini dipengaruhi oleh:

- kenaikan biaya hidup,
- meningkatnya ketidakpastian kerja dan PHK,
- serta melemahnya pendapatan riil, khususnya di sektor informal dan industri padat karya.

Lebaran yang biasanya menjadi “stimulus alami” bagi ekonomi daerah kini gagal menjalankan peran tersebut. Ini adalah sinyal dini bahwa bantalan konsumsi domestik—yang selama ini menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia—mulai rapuh.

# PERANG TARIF GLOBAL DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Kebijakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global. Bagi Indonesia, dampaknya bersifat langsung dan tidak langsung.

## DAMPAK LANGSUNG

Produk ekspor utama Indonesia seperti tekstil, alas kaki, karet, dan elektronik berisiko kehilangan daya saing di pasar AS. Dalam industri yang sangat sensitif terhadap harga, sedikit kenaikan tarif dapat mengalihkan pesanan ke negara pesaing seperti Vietnam atau Bangladesh.

Selain itu, banyak industri Indonesia terintegrasi dalam rantai pasok global sebagai pemasok komponen atau barang setengah jadi. Gangguan rantai pasok akibat tarif berpotensi menurunkan produksi dan lapangan kerja.

## DAMPAK TIDAK LANGSUNG

Tekanan tidak berhenti di pasar ekspor. Negara-negara produsen yang kehilangan akses ke pasar AS berpotensi mengalihkan produknya ke pasar lain, termasuk Indonesia. Tanpa pengawasan ketat, banjir produk impor murah dapat menekan industri domestik—baik usaha besar maupun menengah dan kecil.

Dalam situasi daya beli masyarakat yang melemah, produk murah cenderung disambut pasar. Namun konsekuensinya adalah hilangnya pasar bagi produsen dalam negeri di rumah sendiri.



## **SEKTOR PADAT KARYA DALAM TEKANAN**

Sektor-sektor yang paling berisiko—tekstil, pakaian jadi, kelapa sawit, serta komponen elektronik dan otomotif—merupakan penyerap tenaga kerja utama. Tekanan ekspor dan persaingan impor berpotensi mempercepat gelombang PHK yang sudah mulai terlihat sejak akhir 2024.

Berbeda dengan krisis sebelumnya, PHK kali ini tidak hanya terjadi di kawasan industri perkotaan, tetapi juga di wilayah perkebunan dan pedesaan. Akibatnya, ekonomi pedesaan yang selama ini menjadi jaring pengaman sosial ikut melemah.

## **KOMPLIKASI YANG MEMPERDALAM RISIKO**

Tekanan ekonomi di sektor riil dan padat karya ini berpotensi memicu rangkaian masalah lanjutan:

- Tekanan pada pasar keuangan, termasuk IHSG dan nilai tukar.
- Penurunan investasi, akibat risiko usaha yang meningkat, regulasi tumpang tindih, dan ekonomi biaya tinggi.
- Meningkatnya ketergantungan pada layanan sosial, di tengah efisiensi anggaran pemerintah yang justru menurunkan kualitas layanan tersebut.
- Ancaman pengangguran struktural, yang dapat mengubah bonus demografi menjadi beban demografi.
- Posisi tawar dagang Indonesia yang lemah, akibat ketergantungan pada impor pangan dan bahan baku industri.

Jika perang tarif berkembang menjadi perang dagang global, risiko inflasi, gangguan rantai pasok, dan perlambatan ekonomi dunia akan semakin memperumit pemulihan nasional.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENGHADAPI TEKANAN GLOBAL DAN MEMPERKUAT FONDASI DOMESTIK

Menghadapi situasi ini, Indonesia membutuhkan respons kebijakan yang terintegrasi, berjangka menengah–panjang, dan berani menyentuh akar masalah.

## 1. AKSELERASI KEDAULATAN EKONOMI

Rekomendasi ini mempercepat peningkatan produktivitas dan diversifikasi pertanian melalui investasi teknologi, infrastruktur, dan pembiayaan yang terjangkau. Pemerintah harus mengembangkan bauran energi berbasis potensi wilayah untuk menekan ketergantungan impor dan biaya energi yang tinggi & tidak efisien. Sebagai prasyarat, kebijakan ini harus dijamin dengan penegakan hukum secara konsisten terhadap mafia impor-ekspor, mafia pangan, mafia tanah, dan praktik ilegal yang mendistorsi pasar. Tujuan dari akselerasi ini adalah untuk mengurangi kerentanan struktural terhadap guncangan global dan memperkuat basis ekonomi domestik.

## 2. STRATEGI DAGANG YANG ADAPTIF DAN PROAKTIF

Rekomendasi kedua adalah pengembangan strategi dagang global yang efektif dan proaktif dengan memperluas perjanjian perdagangan bilateral dan regional dengan negara-negara yang produknya bersifat komplementer. Negara melalui lembaga terkait perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor ke Amerika Latin, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Timur. Otoritas Negara melalui lembaga kementerian dan non-kementerian perlu mencari dan amankan alternatif pemasok bahan baku strategis untuk mengurangi ketergantungan tunggal. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dan menghindari ketergantungan pada pasar tertentu.

## 3. PERLINDUNGAN INDUSTRI DAN TENAGA KERJA DOMESTIK

Rekomendasi berkaitan dengan industri dan tenaga kerja domestik perlu menerbitkan kebijakan yang memperketat pengawasan impor untuk mencegah praktik *dumping* dan banjir produk murah dari pasar global Asia maupun non-Asia. Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan industri yang melindungi sektor padat karya. Untuk memberikan peluang kerja yang memadai bagi SDM lokal maka pemerintah wajib menyiapkan program transisi tenaga kerja melalui pelatihan ulang dan penciptaan lapangan kerja baru. Tujuan dari proteksi industri dan tenaga kerja lokal ini untuk menahan laju PHK dan menjaga stabilitas sosial.

## **4. REFORMASI BIROKRASI DAN IKLIM USAHA**

Rekomendasi pada sektor pemerintahan dan pembuat regulasi adalah reformasi birokrasi dengan menggabungkan kementerian/lembaga dengan fungsi yang masih tumpang tindih. Negara perlu menjamin adanya penyederhanaan proses perizinan dan regulasi melalui teknologi informasi dan digitalisasi yang disertai reformasi proses bisnis internal. Penerapan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik dan penghentian praktik nepotisme serta kronisme akan mendukung terciptanya tata birokrasi yang melayani dan membangkitkan iklim usaha. Tujuan besar dari pengelolaan birokrasi dan iklim tata usaha adalah untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan daya saing investasi di pasar global.

## **5. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEBIJAKAN EKONOMI**

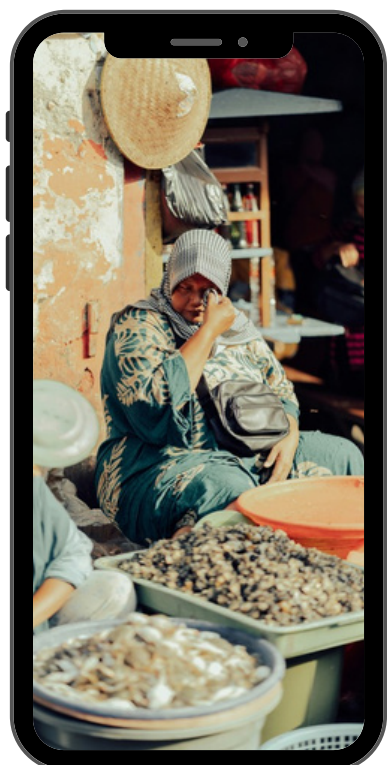
Rekomendasi untuk isu transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi adalah melalui penerapan kebijakan *open data* dalam perdagangan, subsidi, dan fiskal. Negara melalui kementerian dan lembaga non-kementerian harus memperkuat mekanisme audit, pelaporan, dan perlindungan pelapor pelanggaran. Mekanisme ini harus dapat diakses oleh publik dan memberikan ruang bagi publik untuk turut mengawasinya. Partisipasi pelaku usaha dapat dilakukan melalui pelibatan publik dari kalangan pelaku usaha dalam proses evaluasi kebijakan-kebijakan strategis negara terkait dengan tata kelola ekonomi. Tujuan dari transparansi dan akuntabilitas ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan.

## PENUTUP

Pelemahan ekonomi di tengah perang tarif global bukan sekadar soal eksternal. Ia memperlihatkan kerentanan struktural ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya dibenahi. Tanpa reformasi mendasar, tekanan global akan terus diterjemahkan menjadi pelemahan domestik.

Namun krisis juga membuka ruang koreksi. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjadikan periode ini sebagai momentum memperkuat kedaulatan ekonomi, melindungi tenaga kerja, dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih tahan guncangan.

Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah pelemahan ini bersifat sementara—atau menjadi awal dari krisis yang lebih panjang.





# KEDAULATAN PANGAN INDONESIA: ANTARA POTENSI BESAR DAN HAMBATAN STRUKTURAL

MEI 2025



*Indonesia sering disebut sebagai negara agraris dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun di balik citra tersebut, Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan strategis seperti gandum, kedelai, gula, dan daging sapi. Ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: **apakah Indonesia benar-benar berdaulat atas pangannya sendiri?***

*Untuk menjawab pertanyaan ini, penting membedakan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan menekankan ketersediaan dan akses pangan —termasuk melalui impor.*

*Sementara kedaulatan pangan menekankan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri, dengan mengutamakan produksi lokal, keadilan akses sumber daya, keberlanjutan ekologi, dan kesesuaian budaya.*

*Dari perspektif ini, tantangan pangan Indonesia bukan soal kurangnya sumber daya, melainkan masalah struktural dalam tata kelola agraria, kebijakan perdagangan, dan relasi kuasa dalam sistem pangan.*

# PRINSIP KUNCI KEDAULATAN PANGAN



Kedaulatan pangan bertumpu pada beberapa prinsip utama:

- Kontrol lokal atas sistem pangan,
- Agroekologi dan keberlanjutan lingkungan,
- Distribusi sumber daya yang adil,
- Kesesuaian budaya pangan,
- Ketahanan terhadap guncangan global.

Prinsip-prinsip ini menempatkan petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek kebijakan.

# MENGAPA REDAULATAN PANGAN SULIT DICAPAI?

01

## **Ketimpangan Penguasaan Lahan**

Sebagian besar lahan subur dikuasai oleh perkebunan skala besar—terutama kelapa sawit, karet, dan hutan tanaman industri—melalui skema perizinan jangka panjang. Petani kecil dan masyarakat adat sering kehilangan akses atas tanah, sehingga tidak mampu memproduksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Akibatnya, desa-desa penghasil pangan berubah menjadi kantong kemiskinan, sementara produksi pangan nasional justru stagnan atau menurun.

02

## **Ketergantungan Tinggi pada Impor Pangan**

Indonesia mengimpor hampir seluruh kebutuhan gandum dan sebagian besar kedelai, gula, dan daging. Kegagalan target swasembada bukan hanya akibat faktor alam, tetapi juga: tata niaga yang buruk, harga impor yang ditekan murah, lemahnya kelembagaan petani, serta pergeseran pola konsumsi masyarakat ke pangan berbasis impor. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global dan konflik geopolitik.

03

## **Kebijakan yang Bias pada Agribisnis Besar**

Banyak kebijakan pertanian lebih menguntungkan korporasi agribisnis dibanding petani kecil. Subsidi input, akses pembiayaan, dan proyek besar seperti food estate cenderung mendorong pertanian monokultur industri, sering kali dengan dampak ekologis dan sosial yang serius—termasuk konflik lahan dan kegagalan produksi.

# MENGAPA REDAULATAN PANGAN SULIT DICAPAI?

04

**Krisis Lingkungan dan Perubahan Iklim**

Deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, serta perubahan iklim memperburuk produktivitas pertanian. Banjir, kekeringan, dan pola hujan tak menentu membuat sistem pangan berbasis monokultur semakin rapuh, sementara sistem pertanian tradisional yang adaptif justru terpinggirkan.

05

**Kontrol Korporasi atas Benih dan Input**

Petani semakin bergantung pada benih hibrida, pestisida, dan pupuk kimia yang diproduksi korporasi besar. Varietas lokal menurun, biaya produksi meningkat, dan petani kehilangan otonomi. Indonesia juga menjadi salah satu pengguna pestisida terbesar di Asia, dengan dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan.

06

**Lemahnya Sistem Pangan Lokal**

Pasar tradisional terdesak oleh ritel modern, infrastruktur pascapanen buruk menyebabkan kehilangan hasil hingga 30 persen, dan kebijakan pangan cenderung berpihak pada konsumen kota jangka pendek daripada keberlanjutan petani desa.

07

**Korupsi dan Kartel Pangan**

Mafia impor dan konflik kepentingan elit politik menghambat reformasi pangan. Penegakan hukum lemah membuat praktik perampasan lahan, manipulasi harga, dan rente impor terus berulang.

08

**Pergeseran Sosial dan Budaya**

Generasi muda menjauhi pertanian karena dianggap tidak menjanjikan. Pengetahuan lokal memudar, sementara budaya konsumsi pangan cepat saji berbasis impor semakin dominan.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: JALAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN INDONESIA

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, diperlukan perubahan kebijakan yang menyentuh akar struktural, bukan sekadar program teknis jangka pendek.

## 1. REFORMASI AGRARIA DAN AKSES LAHAN

Reformasi agraria diwujudkan melalui redistribusi lahan kepada petani kecil dan masyarakat adat baik di Jawa maupun luar Jawa. Pemerintah melalui kementerian terkait melakukan audit dan peninjauan ulang konsesi perkebunan besar. Negara mendorong penguatan model pertanian kolektif dan koperasi. Reformasi agraria ini bertujuan untuk memastikan petani memiliki basis produksi yang adil dan berkelanjutan sebagai pemasok produk-produk pertanian dan pangan.

## 2. PERALIHAN KE AGROEKOLOGI

Agroekologi mendorong pengalihan subsidi dari pertanian kimiawi ke pertanian berbasis agroekologis. Transformasi ini dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan pestisida berbahaya dan benih transgenik. Negara bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani lokal harus menghidupkan kembali pengetahuan dan praktik pertanian tradisional. Transformasi pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan produksi sekaligus menjaga ekosistem lingkungan alam yang menjadi elemen utama terjadinya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

## 3. PERLINDUNGAN PASAR DAN SISTEM PANGAN LOKAL

Kebijakan perlingungan pasar dapat melalui penerapan kebijakan perdagangan yang melindungi petani lokal dari impor murah. Negara harus memperkuat pasar petani, koperasi pangan, dan skema *community-supported agriculture*. Negara tidak boleh absen dalam mengatur monopoli dalam ritel dan pengolahan pangan. Perlindungan pasar dan sistem pangan lokal ini bertujuan untuk memastikan pasar domestik yang berpihak pada produsen lokal. Visi besarnya adalah pembangunan sistem pangan lokal yang berpihak pada petani lokal yang memenuhi kebutuhan pangan lokal.

## 4. KEDAULATAN BENIH

Benih tanaman pangan merupakan elemen vital dalam membangun sistem pangan lokal. Negara harus memiliki kebijakan dan strategi agar pembatasan pematenan benih dan kriminalisasi pertukaran benih antarpetani dapat ditanggulangi. Negara perlu membangun database dan mengembangkan bank benih lokal dan nasional yang dapat diakses oleh seluruh petani di berbagai daerah. Negara harus hadir dan melindungi plasma nutfah lokal dari eksploitasi dan ekspansi korporasi. Kebijakan perbenihan yang berpihak pada petani lokal ini bertujuan mengembalikan otonomi petani atas produksi pangan.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: JALAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN INDONESIA

## 5. TATA KELOLA PANGAN YANG DEMOKRATIS

Demokratisasi tata kelola pangan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal dan nasional. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi kedaulatan pangan nasional dengan memprioritaskan pengadaan pangan lokal untuk sekolah, rumah sakit, dan program sosial yang berdampak luas. Pemerintah perlu menginisiasi pembentukan dewan pangan yang melibatkan petani, masyarakat adat, dan pekerja pangan. Dewan pangan bukan hanya terdiri atas elit politik dan elit bisnis Indonesia. Tata kelola pangan yang demokratis ini bertujuan untuk menjadikan kebijakan pangan semakin partisipatif dan akuntabel.

## 6. PENGURANGAN KETERGANTUNGAN GLOBAL

Kontestasi global akan mengarah pada isu pangan, energi, dan air. Untuk itu, maka pemerintah harus berupaya menyusun kebijakan yang implementatif dengan membangun cadangan pangan strategis nasional. Kebijakan ini mendorong diversifikasi pangan berbasis lokal seperti sagu, singkong, dan umbi-umbian. Pemerintah harus memiliki inisiatif untuk mengembangkan industri pengolahan pangan domestik yang memiliki *multiplier effect*. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap krisis global.

## 7. PEMBERDAYAAN PETANI DAN MASYARAKAT ADAT

negara harus memposisikan petani sebagai subjek utama ketahanan pangan. Untuk itu pemberdayaan petani lokal merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan ketahanan pangan yang handal dan berkelanjutan. Negara perlu memberikan jaminan atas perluasan akses pembiayaan dan literasi keuangan bagi petani kecil. Negara harus mengakui dan melindungi hak tanah adat. Perempuan memiliki peran sentral dalam proses pertanian lokal, untuk itu negara perlu memperkuat peran perempuan dalam kepemilikan dan produksi pangan lokal. Pelibatan petani secara partisipatif dalam pengambilan keputusan kebijakan akan mendorong dan menjadikan petani sebagai subjek utama pembangunan pangan.

## 8. PEMBATASAN DOMINASI KORPORASI PANGAN

Sistem pangan lokal tidak dapat terlepas dari dinamika rantai pasok pangan global. Untuk itu negara harus hadir dan meninjau ulang perjanjian dagang yang merugikan pangan nasional. Negara perlu lebih tegas dalam melawan kartel impor dan rente politik yang justru menghambat upaya-upaya menuju ketahanan pangan. Jika diperlukan, perkuat peran negara dalam sektor pangan strategis nasional yang berhubungan langsung dengan rantai pasok pangan global dan korporasi. Ini semua bertujuan mencegah neokolonialisme pangan dan ketergantungan jangka panjang.

## PENUTUP

Kedaulatan pangan bukan sekadar soal produksi beras atau angka swasembada. Ia adalah fondasi kedaulatan bangsa, yang menentukan ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, dan martabat negara. Indonesia memiliki semua prasyarat alam dan sosial untuk mencapainya, tetapi keberhasilan sangat bergantung pada keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural.

Tanpa itu, ketergantungan pangan akan terus menjadi titik lemah strategis. Dengan itu, kedaulatan pangan dapat menjadi pilar masa depan Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan berdaulat.



# BONUS DEMOGRAFI INDONESIA: PELUANG EMAS ATAU BENCANA YANG DITUNDA?

MEI 2025



*Indonesia sedang berada dalam periode yang kerap disebut sebagai bonus demografi—saat jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Secara teori, kondisi ini dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial.*

*Namun bonus demografi bukanlah hadiah otomatis. Ia hanya menjadi “bonus” jika penduduk usia kerja terserap dalam aktivitas produktif. Jika gagal, kondisi ini justru berubah menjadi bencana demografi: pengangguran massal, gejolak sosial, instabilitas politik, dan beban fiskal jangka panjang.*

***Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki bonus demografi, melainkan apakah Indonesia mampu memanfaatkannya sebelum jendela peluang ini tertutup.***

# APA YANG DIASUMSIKAN OLEH BONUS DEMOGRAFI?



Bonus demografi hanya bekerja jika beberapa prasyarat terpenuhi:

- pertumbuhan ekonomi stabil,
- tersedianya lapangan kerja dalam jumlah besar,
- pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar,
- serta tidak adanya krisis ekonomi berkepanjangan.

Tanpa prasyarat ini, lonjakan penduduk usia kerja justru menciptakan tekanan besar pada ekonomi dan negara.

## APA ARTINYA BONUS DEMOGRAFI BAGI INDONESIA?

Indonesia memiliki konteks berbeda: demokrasi multipartai, ekonomi yang lebih terbuka, serta struktur sosial yang beragam. Namun pelajaran utamanya relevan: tanpa penciptaan lapangan kerja dan investasi serius pada manusia, bonus demografi akan berubah menjadi beban nasional.

# BAHAYA UTAMA JIKA BONUS DEMOGRAFI GAGAL DIMANFAATKAN

## 1. Kerugian Ekonomi dan Hilangnya Pertumbuhan

Pengangguran dan setengah pengangguran menyebabkan potensi produktivitas nasional terbuang. Negara kehilangan pertumbuhan PDB, penerimaan pajak melemah, dan biaya sosial meningkat.

## 2. Keresahan Sosial dan Kejahatan

Pemuda yang frustrasi lebih rentan terhadap protes massal, konflik sosial, hingga aktivitas kriminal. Dalam banyak kasus global, pengangguran pemuda menjadi bahan bakar instabilitas.

## 3. Instabilitas Politik dan Radikalisasi

Ketidakmampuan negara menyediakan pekerjaan dapat memicu ketidakpercayaan pada pemerintah, membuka ruang bagi populisme ekstrem, radikalisasi, dan kebijakan jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

## 4. Bom Waktu Demografi

Jika penduduk usia kerja hari ini menua tanpa tabungan dan jaminan sosial memadai, negara akan menghadapi krisis pensiun dan kesehatan ketika rasio ketergantungan kembali memburuk.



# BELAJAR DARI PENGALAMAN TIONGKOK

Tiongkok sering dijadikan contoh negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi selama beberapa dekade. Keberhasilan tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan melalui kebijakan yang terencana dan disiplin.

## APA YANG DILAKUKAN TIONGKOK?

1. Industrialisasi padat karya untuk menyerap tenaga kerja pedesaan secara masif.
2. Investasi besar-besaran pada infrastruktur dan urbanisasi, menciptakan jutaan lapangan kerja.
3. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri (STEM dan kejuruan).
4. Perencanaan ekonomi jangka panjang melalui rencana lima tahunan.
5. Penegakan hukum dan stabilitas sosial, termasuk penindakan tegas terhadap korupsi.
6. Transisi bertahap ke ekonomi teknologi tinggi dan jasa ketika upah meningkat.

Hasilnya, ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dipertahankan selama puluhan tahun. Namun Tiongkok kini juga menghadapi tantangan baru: populasi menua dan tingkat kelahiran yang menurun—sebuah pengingat bahwa jendela bonus demografi bersifat sementara.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENGHINDARI BENCANA DEMOGRAFI

Berdasarkan analisis tersebut, berikut rekomendasi kebijakan utama agar Indonesia mampu mengelola bonus demografinya secara produktif.

## 1. INVESTASI BESAR PADA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

Rekomendasi pertama adalah pada investasi SDM melalui pendidikan dan keterampilan. Negara perlu memiliki visi pendidikan yang menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan global. Beberapa bidang utama adalah STEM, digital, dan vokasi. Meski demikian, pengembangan keilmuan sosial humaniora juga perlu mendapatkan proporsi yang memadai. Negara perlu mengupayakan perluasan pendidikan kejuruan dan *re-skilling* untuk pemuda dan pekerja yang terdampak PHK. Kebijakan pendidikan perlu lebih sistematis dengan menyesuaikan pendidikan dengan potensi ekonomi lokal yakni pertanian, maritim, industri, maupun jasa. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan tenaga kerja yang relevan, adaptif, dan kompetitif.

## 2. PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM SKALA BESAR

Rekomendasi kedua adalah mendorong penciptaan industri padat karya (manufaktur, konstruksi, pengolahan pangan). Upaya tersebut disertai dengan memperkuat dukungan bagi UMKM dan wirausaha muda (akses pembiayaan, inkubator, pasar). Hal yang tidak kalah penting adalah mengundang dan menarik investasi global dan domestik dengan kepastian hukum yang tegas dan biaya usaha yang efisien. Tujuan penciptaan lapangan kerja dalam skala besar adalah untuk menyerap lonjakan penduduk usia kerja sebelum pengangguran menjadi struktural.

## 3. REFORMASI IKLIM USAHA DAN TATA KELOLA

Rekomendasi ketiga adalah reformasi iklim usaha dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penyederhanaan dan harmonisasikan regulasi pusat–daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum pelaku usaha. Negara perlu lebih tegas dalam memberantas praktik KKN, premanisme, dan pungutan liar yang menciptakan ekonomi biaya tinggi. Digitalisasi birokrasi dan pelayanan keadministrasian bisnis harus disertai dengan penyederhanaan proses bisnis. Ini semua bertujuan menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif serta berkelanjutan.

## 4. KESEIMBANGAN URBANISASI DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Penyeimbangan urbanisasi dan pembangunan kewilayahan harus mengembangkan kota secara terencana dengan perumahan dan transportasi terjangkau. Kebijakan urbanisasi ini juga harus disertai dengan penciptaan lapangan kerja di desa melalui industri pengolahan sumber daya lokal, energi terbarukan, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Pemerintah harus menjamin adanya program pembangunan yang memperkuat infrastruktur ekonomi desa agar migrasi tidak bersifat terpaksa karena keterbatasan sumber mata pencaharian di desa. Kebijakan yang berimbang antara urbanisasi dan pembangunan desa bertujuan untuk mencegah tekanan sosial di kota dan peluang memanfaatkan potensi desa.

## 5. PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Penguatan jaring pengaman sosial kami rekomendasikan melalui pengembangan asuransi pengangguran dan layanan penempatan kerja. Pemerintah harus memperluas cakupan jaminan kesehatan dan pensiun, termasuk pekerja informal dan UMKM. Bonus demografi akan memberikan manfaat seandainya pemerintah memberikan fokus perhatian pada kesehatan remaja, ibu, dan pencegahan *stunting*. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga produktivitas tenaga kerja dan stabilitas sosial.

## 6. STABILITAS SOSIAL DAN PELIBATAN KAUM MUDA

Kaum muda menjadi pilar utama keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Sebagai subjek pembangunan, pemerintah perlu memberikan ruang dan melibatkan pemuda dalam perumusan kebijakan publik. Berkaca dari tantangan utama adanya paham-paham radikal, negara perlu memastikan pencegahan radikalisme dan diskriminasi melalui kebijakan inklusif dan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah perlu pula mendorong partisipasi sipil dan inovasi sosial berbasis komunitas. Tujuan besar dari pelibatan pemuda adalah menjadikan pemuda sebagai aset pembangunan, bukan sumber instabilitas.



## PENUTUP

Bonus demografi adalah kesempatan sekali dalam sejarah. Indonesia masih berada dalam jendela peluang tersebut, tetapi waktu terus berjalan. Tanpa kebijakan yang terarah, konsisten, dan berani menyentuh akar masalah, bonus ini akan berubah menjadi beban sosial dan ekonomi yang berat.

Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan membutuhkan visi jangka panjang, investasi manusia, dan disiplin kebijakan. Tantangan Indonesia bukan kekurangan penduduk usia kerja, melainkan kurangnya pekerjaan bermartabat dan sistem yang mampu menyerap potensi mereka.

Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah bonus demografi menjadi fondasi Indonesia maju—atau warisan masalah bagi generasi mendatang.





# TERJEBAK DI TENGAH: DEINDUSTRIALI- SASI DAN ANCAMAN MIDDLE INCOME TRAP INDONESIA

JUNI 2025



*Selama dua dekade terakhir, Indonesia sering dipuji sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen per tahun. Namun di balik stabilitas tersebut, tersimpan persoalan struktural yang kian mengkhawatirkan: Indonesia berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang diperparah oleh proses deindustrialisasi dini.*

*Fenomena ini bukan sekadar isu teknis ekonomi. Ia menentukan apakah Indonesia mampu naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi—atau justru stagnan, dengan ketimpangan sosial yang makin melebar dan kesempatan kerja berkualitas yang semakin langka.*

## **APA ITU MIDDLE INCOME TRAP DAN MENGAPA BERBAHAYA?**

Middle income trap terjadi ketika suatu negara berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi gagal melakukan transformasi ekonomi lanjutan untuk mencapai pendapatan tinggi. Ciri utamanya adalah:

- produktivitas yang stagnan,
- inovasi rendah,
- ketergantungan pada sektor bernilai tambah rendah,
- serta kegagalan memperkuat rantai nilai industri.

Indonesia saat ini berada tepat di persimpangan tersebut. Dengan PDB per kapita sekitar USD 4.000–5.000, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas (minimal 6–7 persen per tahun) untuk keluar dari jebakan ini. Namun, mesin utama pertumbuhan—manufaktur—justru melemah.

## **DEINDUSTRIALISASI DINI: MESIN PERTUMBUHAN YANG MATI TERLALU CEPAT**

Di banyak negara yang sukses naik kelas, seperti Korea Selatan dan Taiwan, industrialisasi menjadi fondasi peningkatan produktivitas dan upah sebelum ekonomi beralih ke sektor jasa bernilai tinggi. Indonesia mengalami pola berbeda.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia:

- mencapai puncak sekitar 29 persen pada awal 2000-an,
- turun menjadi sekitar 19 persen pada 2023.

Penurunan ini terjadi sebelum Indonesia berhasil membangun basis industri berteknologi menengah–tinggi. Akibatnya, tenaga kerja bergeser ke sektor jasa dan informal yang produktivitas serta upahnya relatif rendah.

# MENGAPA DEINDUSTRIALISASI MEMPERPARAH MIDDLE INCOME TRAP?

01

## Produktivitas dan Upah Mandek

Manufaktur adalah sektor yang paling efektif mendorong produktivitas dan kenaikan upah. Ketika sektor ini melemah, mayoritas tenaga kerja terserap ke pekerjaan informal dan jasa berupah rendah. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk mendorong lonjakan kesejahteraan.

02

## Daya Saing Ekspor Melemah

Tanpa manufaktur bernilai tinggi, ekspor Indonesia didominasi komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Komoditas ini rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak menciptakan nilai tambah besar. Sementara itu, negara seperti Vietnam berhasil mengejar Indonesia melalui ekspor manufaktur.

03

## Lemahnya Inovasi dan Litbang

Manufaktur adalah wahana utama transfer teknologi dan inovasi. Ketika sektor ini menyusut, investasi penelitian dan pengembangan ikut tertinggal. Saat ini, belanja litbang Indonesia hanya sekitar 0,2 persen dari PDB, jauh di bawah negara yang berhasil keluar dari *middle income trap*.

04

## Penyakit Belanda dan Ketergantungan SDA

Lonjakan harga komoditas mendorong eksploitasi sumber daya alam, memperkuat nilai tukar, dan melemahkan daya saing manufaktur. Tanpa kebijakan industri yang kuat, ekonomi semakin bergantung pada SDA dan terjebak dalam siklus jangka pendek.

05

## Ketimpangan dan Kesenjangan Wilayah

Deindustrialisasi mempersempit lapangan kerja formal dan berkualitas, memperlebar kesenjangan pendapatan, serta memperkuat ketimpangan antarwilayah. Jawa dan kota besar diuntungkan oleh sektor jasa, sementara wilayah lain tertinggal.

## RISIKO JANGKA PANJANG JIKA DIBIARKAN DAN TANPA ANTISIPASI

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kemampuan suatu negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*) serta memperkuat basis industrialisasi menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tanpa strategi yang jelas dan konsisten, proses transformasi struktural ekonomi berisiko mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Pembiaran *middle income trap* dan de-industrialisasi akan membawa konsekuensi yang serius, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang terus melambat, dominasi pekerjaan informal dan *gig economy*, defisit perdagangan manufaktur berteknologi tinggi, meningkatnya ketimpangan sosial dan regional, serta kerentanan tinggi terhadap guncangan eksternal global.



Dalam konteks bonus demografi, kegagalan menciptakan pekerjaan produktif di sektor industri tidak hanya menghambat peningkatan kesejahteraan, tetapi juga berpotensi mengubah keunggulan demografis menjadi beban struktural. Kondisi ini dapat berkembang menjadi bom waktu sosial dan fiskal, ditandai oleh meningkatnya pengangguran usia produktif, tekanan terhadap anggaran negara, serta melemahnya kohesi sosial dalam jangka menengah dan panjang.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: STRATEGI KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP

Menghadapi tantangan ini, Indonesia membutuhkan koreksi arah kebijakan yang tegas, konsisten, dan berjangka panjang.

## 1. KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI BARU BERBASIS NILAI TAMBAH

Rekomendasi pertama ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberikan prioritas pada pengembangan industri menengah–tinggi seperti elektronik, otomotif, farmasi, baterai, dan alat kesehatan. Pemerintah secara sistematis harus mendorong integrasi rantai nilai domestik, bukan sekadar *smelter* atau perakitan. Kerangka logis yang dibangun adalah menjadikan hilirisasi sebagai pintu masuk industrialisasi, bukan tujuan akhir. Kebijakan ini ditujukan untuk menghidupkan kembali manufaktur sebagai mesin produktivitas.

## 2. REFORMASI INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK

Pemerintah harus mempercepat pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan konektivitas antardaerah. Langkah konkret yang dapat diambil adalah memangkas biaya logistik dengan menghapus pungutan liar dan tumpang tindih regulasi. Upaya reformasi di bidang infrastruktur dan logistik ini mensyaratkan adanya kepastiaan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mendukung manufaktur dan rantai pasok logistik. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri.

## 3. INVESTASI SERIUS PADA SDM DAN TEKNOLOGI

Kebijakan multisektor ini memberikan fokus pada perluasan dan penyediaan pendidikan vokasi dan *upskilling* SDM yang selaras dengan kebutuhan industri. Pemerintah harus mendorong adopsi Industri 4.0 (otomasi, AI, IoT) melalui beragam skema insentif dan kemitraan. Dari sisi penganggaran keuangan negara, pemerintah harus meningkatkan belanja riset dan kolaborasi universitas–industri yang berbasis outcome dan menghasilkan IP (*Intellectual Property / Hak Kekayaan Intelektual*). Kebijakan ini bertujuan untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas inovasi nasional.

## 4. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI YANG SELEKTIF

Kebijakan ini berkaitan dengan penerapan proteksi cerdas dan sementara bagi industri strategis. Negara harus mengarahkan FDI (*Foreign Direct Investment*) ke manufaktur yang bernilai tambah, bukan ekstraksi SDA semata. Untuk mendukung kebijakan perdagangan yang efektif dan efisien, pemerintah harus membangun rantai pasok dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Tujuan dari paket kebijakan ini adalah memperkuat basis industri nasional tanpa menutup diri dari globalisasi.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: STRATEGI KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP

## 4. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI YANG SELEKTIF

Kebijakan ini berkaitan dengan penerapan proteksi cerdas dan sementara bagi industri strategis. Negara harus mengarahkan FDI (*Foreign Direct Investment*) ke manufaktur yang bernilai tambah, bukan ekstraksi SDA semata. Untuk mendukung kebijakan perdagangan yang efektif dan efisien, pemerintah harus membangun rantai pasok dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Tujuan dari paket kebijakan ini adalah memperkuat basis industri nasional tanpa menutup diri dari globalisasi.

## 5. STABILITAS DAN KONSISTENSI KEBIJAKAN INDUSTRI

Untuk menjamin stabilitas dan konsistensi kebijakan industri dalam negeri, maka pemerintah harus memastikan kebijakan industri lintas pemerintahan dan tidak berubah karena siklus politik. Komitmen tegas untuk mengurangi birokrasi yang panjang dan bertele-tele, korupsi, dan ketidakpastian regulasi harus menjadi perhatian pemerintah. Perkuat koordinasi pusat-daerah dalam kebijakan industri. Kebijakan ini bertujuan untuk: menciptakan kepastian jangka panjang bagi dunia usaha dan investor.



## PENUTUP

*Middle income trap* dan de-industrialisasi bukanlah takdir. Keduanya adalah hasil dari pilihan kebijakan. Menilik kondisi Indonesia saat ini, negara ini masih memiliki modal besar seperti pasar domestik yang luas, potensi bonus demografi, dan kekayaan sumber daya. Namun, tanpa industrialisasi yang terarah dan berkelanjutan, semua modal itu berisiko terbang.

Tantangan Indonesia hari ini bukan sekadar tumbuh, tetapi bertransformasi. Keberhasilan keluar dari jebakan pendapatan menengah akan ditentukan oleh keberanian negara mengembalikan industri sebagai tulang punggung ekonomi—bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai agenda nasional jangka panjang. Perencanaan strategis yang matang berbasis riset dan penyelenggaraan program berbasis outcome dan impact menjadi sebuah keniscayaan yang harus dikawal bersama.





# POPULISME PREDATORIS: ANCAMAN TERSEMBUNYI BAGI DEMOKRASI INDONESIA

JULI 2025

*Dalam berbagai pemilu dan dinamika politik mutakhir, istilah populisme kerap muncul sebagai strategi untuk meraih dukungan publik. Populisme sering dipahami sebagai keberpihakan pada “rakyat kecil” melawan elit. Namun, tidak semua populisme bersifat emansipatoris. Di banyak negara—termasuk yang sedang mengalami kemunduran demokrasi—muncul fenomena yang lebih berbahaya: populisme predatoris.*



*Populisme predatoris bukan sekadar retorika keras atau gaya komunikasi politik. Ia adalah strategi kekuasaan yang menggunakan klaim “mewakili rakyat” untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, melemahkan institusi demokrasi, dan mengalihkan sumber daya publik kepada elit baru, keluarga, atau kroni.*

# APA YANG DIMAKSUD DENGAN POPULISME PREDATORIS?



Populisme predatoris merujuk pada praktik politik di mana pemimpin atau kelompok politik:

- mengklaim melawan elit lama yang korup,
- mengeksploitasi kemarahan dan kekecewaan publik,
- namun pada saat yang sama membangun jaringan kekuasaan yang lebih tertutup dan eksploitatif.

Berbeda dengan populisme tradisional yang dapat membuka ruang bagi kelompok terpinggirkan, populisme predatoris bersifat instrumental dan oportunistik. Tujuannya bukan reformasi, melainkan penguasaan negara dan sumber dayanya.

## CIRI-CIRI UTAMA POPULISME PREDATORIS

- 01 Retorika Anti-Kemapanan yang Palsu**

Pemimpin predatoris bertindak dengan menyerang “elit korup”, tetapi secara diam-diam menciptakan elit baru yang lebih loyal dan tertutup. Ia mengakumulasi jabatan publik, BUMN, dan lembaga negara menjadi sarana patronase bagi keluarga dan kroninya sendiri.
- 02 Pelemahan Institusi Demokrasi**

Mereka merongrong independensi peradilan, kebebasan pers, dan lembaga pemilu melalui perubahan aturan, tekanan politik, hingga kooptasi personal untuk kepentingan kroninya. Demokrasi tetap ada secara formal, tetapi kosong secara substansi.
- 03 Eksploitasi Ekonomi dan Keuangan Negara**

Sifat eksploitatif terhadap ekonomi dan keuangan negara nampak pada anggaran publik yang digunakan untuk proyek besar yang minim manfaat sosial. Program sosial diarahkan untuk subsidi patronase atau pembiayaan kebijakan populis jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Negara menanggung utang dan risiko, sementara keuntungan dinikmati segelintir pihak.
- 04 Pengkambing-hitaman dan Politik Perpecahan**

Mereka menuding kelompok minoritas, akademisi, jurnalis, atau masyarakat sipil yang aktif melintarkan kritik dan protes sebagai penghambat pembangunan. Polarisasi politik dan sosial sengaja dipelihara untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan tata kelola negara.
- 05 Kultus Kepribadian dan Disinformasi**

Narasi kepemimpinan karismatik diperkuat melalui propaganda, manipulasi media, dan disinformasi hingga misinformasi. Mereka mempersepsikan kritik sebagai ancaman, bukan sebagai bagian integral dari proses pendewasaan sistem demokrasi.



Populisme predatoris merusak demokrasi dari dalam. Dampaknya meliputi:

- **Erosi institusi demokrasi, karena hukum dan prosedur dimanipulasi.**

Populisme predatoris mengikis institusi demokrasi dengan memanipulasi hukum, prosedur, dan mekanisme checks and balances demi kepentingan kekuasaan. Aturan formal tetap dipertahankan secara simbolik, tetapi substansinya dikosongkan. Akibatnya, demokrasi melemah dari dalam tanpa runtuh secara terbuka.

- **Pendalaman ketimpangan, akibat konsentrasi kekayaan dan kekuasaan.**

Fenomena ini juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi melalui konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok tertentu. Kebijakan publik diarahkan untuk melindungi elite pendukung populisme, bukan kepentingan masyarakat luas. Ketimpangan yang meningkat ini memperlemah keadilan sosial dan mobilitas ekonomi.

- **Polarisasi sosial yang ekstrem, yang merusak kohesi nasional.**

Populisme predatoris mendorong polarisasi sosial yang ekstrem dengan membelah masyarakat ke dalam identitas “kami” versus “mereka.” Perbedaan politik dan sosial diproduksi menjadi konflik permanen. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak kohesi nasional dan solidaritas sosial.

- **Krisis ekonomi jangka menengah, akibat salah urus dan korupsi sistemik.**

Dari sisi ekonomi, populisme predatoris kerap memicu krisis jangka menengah akibat salah urus, kebijakan tidak berkelanjutan, dan korupsi sistemik. Stabilitas ekonomi dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek. Kepercayaan investor dan daya tahan ekonomi nasional pun melemah.

- **Kemerosotan nilai moral dan etika publik, termasuk normalisasi kebohongan dan relativisme kebenaran.**

Lebih jauh, populisme predatoris menyebabkan kemerosotan nilai moral dan etika publik. Kebohongan, disinformasi, dan relativisme kebenaran dinormalisasi sebagai strategi politik. Situasi ini membuat masyarakat kehilangan pegangan normatif dalam kehidupan demokratis.

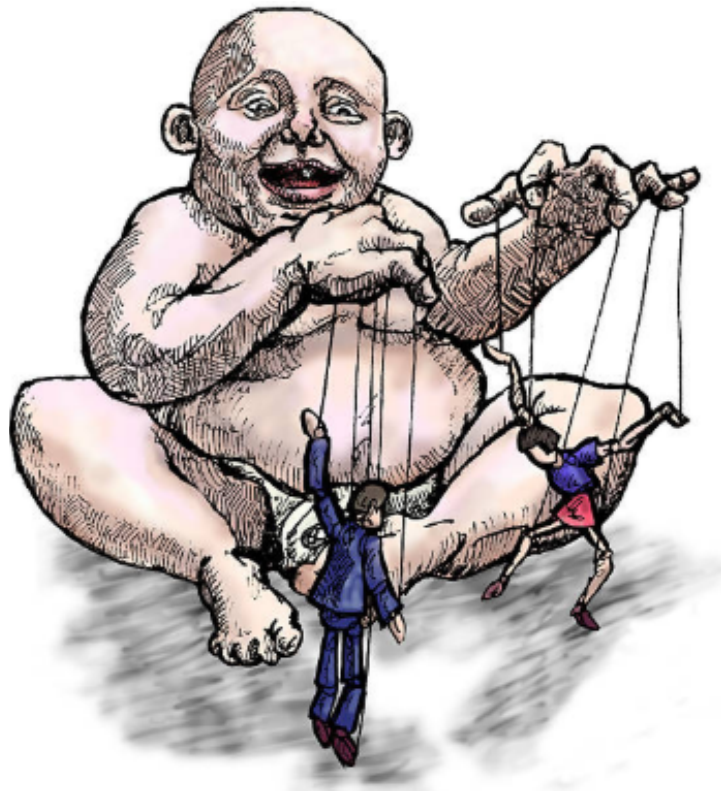
Dalam jangka panjang, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada demokrasi itu sendiri dan menjadi apatis atau justru menerima otoritarianisme sebagai “solusi”.

## KONDISI YANG MEMBUAT POPULISME PREDATORIS TUMBUH SUBUR

Populisme predatoris tidak muncul di ruang hampa.

Ia tumbuh ketika:

- kekecewaan publik terhadap ketimpangan ekonomi tidak ditangani,
- institusi demokrasi lemah dan mudah diintervensi,
- masyarakat sipil dibatasi atau dikooptasi,
- literasi politik dan media rendah,
- dan polarisasi identitas dimobilisasi secara sistematis.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENCEGAH DAN MELAWAN POPULISME PREDATORIS

Menghadapi ancaman ini, Indonesia membutuhkan pendekatan kebijakan yang menyentuh akar struktural, bukan sekadar respons simbolik.

## 1. MEMPERKUAT LEMBAGA DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM

Rekomendasi ini mendorong pemerintah untuk menjamin independensi peradilan dari intervensi politik dan ekonomi. Negara harus melindungi penyelenggara pemilu agar bebas dari manipulasi dan tekanan kekuasaan. Upaya ini searas dengan upaya untuk menegakkan pembatasan masa jabatan dan aturan konstitusional secara konsisten. Pemerintah harus mendorong desentralisasi berbasis prinsip subsidiaritas dengan penguatan kapasitas daerah. Tujuan dari upaya memperkuat lembaga demokrasi dan supremasi hukum adalah untuk menutup ruang konsentrasi kekuasaan yang menjadi fondasi populisme predatoris.

## 2. PENEGAKAN ANTIKORUPSI YANG TEGAS DAN TIDAK SELEKTIF

Rekomendasi ini dilakukan dengan memastikan korupsi tetap diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa. Negara harus berkomitmen dan kebijakan publik disusun untuk memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum yang independen. Kelompok masyarakat sipil dan penyelenggara negara harus menolak pendekatan *impunity* dan penyelesaian kasus korupsi secara transaksional. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan eksploitasi negara sebagai sumber rente politik.

## 3. MELAWAN DISINFORMASI DAN POLITIK PASCA-KEBENARAN

Komunikasi publik & politik dilandasi dengan etika publik yang diarahkan untuk melawan beragam disinformasi/misinformasi yang menyesatkan. Kebijakan komunikasi publik yang etis harus mampu menciptakan ruang publik yang mengintegrasikan pendidikan berpikir kritis dan literasi media dalam kebijakan pendidikan di berbagai level. Negara harus merekognisi dan mendukung jurnalisme independen dan berbasis fakta. Pemerintah memiliki regulasi yang mengatur platform digital untuk mengurangi penyebaran disinformasi dan ruang gema ekstrem. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membangun ruang publik yang rasional dan berbasis fakta.

#### 4. MENGUATKAN MASYARAKAT SIPIL DAN PLURALISME POLITIK

Masyarakat sipil yang berdaya adalah salah satu pilar utama sistem demokrasi. Rekomendasi selanjutnya menghadapi populisme predatoris adalah dengan menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi sesuai konstitusi negara. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara berhak dan harus dilindungi ketika menyuarakan kritik, pandangan, dan platform politiknya. Kebijakan dipuayakan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi atas kerja-kerja aktivisme, akademisi, dan jurnalisme. Dalam aspek politik prosedural, pemerintah berkewajiban untuk memastikan sistem multipartai berfungsi sebagai mekanisme *check and balances*, bukan kartel politik. Penguatan masyarakat sipil dan pluralisme politik bertujuan untuk menjadikan masyarakat sipil sebagai penyangga demokrasi, bukan musuh kekuasaan.

#### 5. MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI SEBAGAI AKAR POPULISME

Untuk mengatasi situasi ekonomi yang timpang dan berisiko terciptanya populisme maka kami merekomendasikan beberapa kebijakan yakni: mendorong kebijakan ekonomi inklusif yang membuka mobilitas sosial. Negara harus mampu untuk membatasi konsentrasi ekonomi dan rente melalui penegakan kebijakan yang mengatur persaingan usaha secara adil. Berkaitan dengan program-program sosial negara untuk meningkatkan taraf hidup warga, negara perlu mendesain program bantuan sosial yang transformatif dan bukan untuk mendukung patronase politik. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan menghilangkan “bahan bakar utama” populisme predatoris yaitu ketidakadilan struktural.



## PENUTUP

*Populisme predatoris adalah peringatan serius bagi demokrasi Indonesia. Ia tidak selalu datang dengan wajah otoriter yang kasar, tetapi sering menyamar sebagai “keberpihakan pada rakyat”. Justru karena itu, ancamannya lebih sulit dikenali dan lebih merusak.*

*Demokrasi tidak runtuh dalam satu peristiwa besar, tetapi tergerus perlahan oleh praktik yang dinormalisasi. Artikel ini menegaskan bahwa melawan populisme predatoris bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, media, akademisi, dan warga negara secara luas.*

*Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah demokrasi Indonesia tetap hidup dan bermakna—atau sekadar menjadi prosedur tanpa substansi.*



# EKONOMI KOMPLEK- SITAS:

## JALAN ALTERNATIF INDONESIA KELUAR DARI JEBAKAN EKONOMI SEDERHANA

*Selama puluhan tahun, pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada logika sederhana: meningkatkan produksi, menekan biaya, dan memperbesar ekspor. Pendekatan ini memang berhasil menurunkan kemiskinan, tetapi kini mulai menunjukkan keterbatasan. Ketergantungan pada komoditas mentah, lemahnya inovasi, deindustrialisasi dini, serta birokrasi yang rumit menandakan bahwa mesin pertumbuhan lama tidak lagi memadai.*



JULI 2025

*Dalam konteks ini, ekonomi kompleksitas menawarkan kerangka berpikir alternatif—bukan sekadar mengganti kebijakan, tetapi mengubah cara kita memahami cara kerja ekonomi.*

# APA ITU EKONOMI KOMPLEKSITAS?

Ekonomi kompleksitas memandang ekonomi sebagai sistem adaptif kompleks, mirip ekosistem alam atau otak manusia. Ia menolak asumsi bahwa ekonomi selalu stabil dan rasional. Sebaliknya, ekonomi dipahami sebagai hasil interaksi jutaan aktor—individu, perusahaan, lembaga—yang terus belajar, beradaptasi, dan bereaksi satu sama lain.

**Pendekatan ini bertumpu pada lima prinsip utama:**

1. **Dinamika non-keseimbangan:** ekonomi selalu berubah dan jarang stabil. Dalam ekonomi kompleksitas, perekonomian dipahami sebagai sistem yang terus bergerak dan jarang mencapai titik keseimbangan statis. Perubahan teknologi, preferensi, kebijakan, dan ekspektasi pelaku ekonomi berlangsung secara simultan dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, fluktuasi, ketidakpastian, dan krisis bukan anomali, melainkan karakter inheren dari sistem ekonomi.
2. **Emergensi:** pola besar (pertumbuhan, krisis) muncul dari interaksi kecil. Pola-pola makroekonomi seperti pertumbuhan, ketimpangan, atau krisis tidak dirancang secara terpusat, melainkan muncul dari interaksi mikro antarindividu, perusahaan, dan institusi. Keputusan kecil yang tampak tidak signifikan dapat terakumulasi menjadi dampak sistemik. Dengan demikian, memahami ekonomi memerlukan perhatian pada proses interaksi, bukan hanya hasil akhir.
3. **Adaptasi:** pelaku ekonomi belajar dari pengalaman. Pelaku ekonomi dalam kerangka ekonomi kompleksitas bersifat belajar dan adaptif, bukan sepenuhnya rasional dan statis. Individu dan organisasi menyesuaikan strategi mereka berdasarkan pengalaman masa lalu, informasi baru, dan respons lingkungan. Proses pembelajaran ini membuat perilaku ekonomi bersifat dinamis dan sering kali tidak dapat diprediksi secara linear.
4. **Lingkar umpan balik:** kebijakan hari ini membentuk perilaku esok hari. Kebijakan ekonomi tidak hanya menghasilkan dampak langsung, tetapi juga membentuk ekspektasi dan perilaku pelaku ekonomi di masa depan. Respons tersebut kemudian menciptakan umpan balik yang dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas kebijakan awal. Tanpa pemahaman atas mekanisme ini, intervensi kebijakan berisiko menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
5. **Ketergantungan jalur (*path dependence*):** sejarah kebijakan menentukan pilihan masa depan. Pilihan kebijakan dan institusi di masa lalu membatasi sekaligus mengarahkan kemungkinan kebijakan di masa depan. Sekali suatu jalur pembangunan terbentuk, perubahan arah menjadi semakin mahal dan sulit, meskipun jalur tersebut tidak lagi optimal. Dalam ekonomi kompleksitas, sejarah bukan latar belakang pasif, melainkan faktor aktif yang membentuk dinamika ekonomi saat ini.

Dengan sudut pandang ini, kegagalan ekonomi sering bukan karena kurangnya kompleksitas, tetapi karena kompleksitas yang salah arah dan tidak fungsional.

# KOMPLEKSITAS VS EFISIENSI: DI MANA INDONESIA BERMASALAH ?



Sistem ekonomi berkembang untuk menangani kompleksitas—namun jika berlebihan, ia justru menjadi sumber ketidakefisienan.

Indonesia menghadapi paradoks ini:

- regulasi menumpuk tanpa fungsi jelas,
- birokrasi semakin rumit tetapi pelayanan tidak membaik,
- rantai pasok panjang namun rapuh,
- koordinasi lintas lembaga lemah.

Ekonomi kompleksitas menekankan bahwa sistem yang sehat bukan yang paling rumit, melainkan yang paling adaptif dan efisien. Kompleksitas yang tidak menambah nilai harus dipangkas.

# PELAJARAN INTERNASIONAL: KOMPLEKSITAS YANG DIKELOLA DENGAN BAIK

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kompleksitas dapat menjadi kekuatan bila dikelola dengan tepat.

## JERMAN

Jerman membangun industri bernilai tinggi melalui UKM spesialis (Mittelstand), pendidikan vokasi, dan inovasi bertahap.

## SWISS

Swiss fokus pada ceruk pasar berteknologi tinggi dengan volume kecil, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan desentralisasi kebijakan.

## SINGAPURA

Singapura menyederhanakan tata kelola dan logistik untuk menopang ekonomi global yang sangat kompleks.

## KOREA SELATAN

Korea Selatan naik cepat dalam tangga kompleksitas melalui R&D agresif, dukungan negara, dan integrasi industri.

Sebaliknya, Venezuela dan Yunani menunjukkan bagaimana kompleksitas kebijakan tanpa efisiensi di mana kontrol harga berlapis dan birokrasi berbelit, justru menghancurkan tata ekonomi.





## POTENSI DAN TANTANGAN INDONESIA

### MODAL BESAR

Indonesia memiliki modal besar untuk masuk ke ekonomi kompleksitas:

- bonus demografi,
- sumber daya alam,
- pasar domestik besar,
- posisi strategis dalam rantai pasok global.

### TANTANGAN

Namun tantangan strukturalnya juga nyata:

1. Ketergantungan pada komoditas bernilai rendah.
2. Infrastruktur dan logistik mahal (biaya logistik  $\pm 24\%$  PDB).
3. Regulasi tumpang tindih dan korupsi.
4. Kesenjangan keterampilan dan rendahnya investasi R&D.

**Tanpa koreksi, kompleksitas Indonesia akan terus bersifat “mahal dan rapuh”, bukan produktif dan tangguh.**

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MEMBANGUN EKONOMI KOMPLEKSITAS YANG FUNGSIONAL

Berdasarkan kerangka ekonomi kompleksitas, berikut rekomendasi kebijakan utama untuk Indonesia.

## 1. SEDERHANAKAN KOMPLEKSITAS REGULASI DAN BIROKRASI

Rekomendasi pertama berkaitan dengan penyederhanaan kompleksitas regulasi dan birokrasi di Indonesia. Pemerintah harus segera melakukan audit dan menghapus regulasi yang tumpang tindih dan tidak fungsional. Bersamaan dengan itu, perlu pula mendorong penerapan *regulatory sandbox* untuk industri teknologi dan manufaktur maju. Hal yang tidak kalah penting adalah penerapan digitalisasi tata kelola yang disertai dengan penyederhanaan proses dan bukan sekadar memindahkan kerumitan ke sistem digital. Tujuan dari kebijakan penyederhanaan ini adalah mengurangi biaya koordinasi dan meningkatkan adaptivitas sistem.

## 2. NAIK TANGGA KOMPLEKSITAS INDUSTRI SECARA BERTAHAP

Rekomendasi kedua ini mendasarkan pada pendekatan *process based economy* di mana menjadikan hilirisasi sebagai pintu masuk menuju industri berteknologi menengah–tinggi seperti baterai, kimia dasar, dan elektronik. Negara perlu membangun ekosistem industri yang saling mendukung baik di aspek pendidikan, logistik, maupun R&D di sekitar zona ekonomi khusus. Ekonomi berbasis proses mengasumsikan ada tahapan pembangunan ekonomi, untuk itu perlu menghindari lompatan kebijakan yang tidak didukung kapasitas domestik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan kompleksitas industri yang produktif, bukan semu.

## 3. INVESTASI SERIUS PADA SDM DAN RISET

SDM adalah faktor penentu dan kunci dalam pengelolaan ekonomi di suatu negara. Rekomendasi berkaitan dengan faktor krusial ini adalah perluasan pendidikan vokasi dan sistem magang ala Jerman. Sistem magang ala Jerman, yang secara resmi dikenal sebagai *Duales Ausbildungssystem* (Sistem Pendidikan Ganda), adalah model pelatihan kejuruan yang menggabungkan pendidikan teoritis di sekolah dengan praktik kerja langsung di perusahaan. Sejalan dengan investasi total pada SDM, perlu pula bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja R&D secara bertahap hingga mendekati 1% PDB. Kemitraan strategis dengan perguruan tinggi sebagai insitusi *knowledge producer* harus diorng untuk mewujudkan kemitraan universitas–industri di sektor strategis berbasis IP. Serangkaian kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan adaptasi dan inovasi nasional.

#### **4. REFORMASI INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK SEBAGAI SISTEM**

Sistem penunjang utama dalam ekonomi kompleksitas adalah infrastruktur dan logistik yang handal. Rekomendasi kebijakan untuk itu adalah mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, listrik) dengan infrastruktur digital. Pemerintah harus berkomitmen untuk memangkas biaya logistik melalui platform logistik nasional dan penegakan hukum. Sebagai negara berbasis kepulauan dengan sebaran sumber daya di berbagai wilayahnya, pemerintah harus memprioritaskan konektivitas antardaerah di luar Jawa. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat rantai pasok kompleks menjadi efisien dan tangguh.

#### **5. PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF, BUKAN SEKADAR BESAR**

Sistem tata organisasi yang lincah dan adaptif sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi dinamika global yang berubah dengan sangat cepat. Rekomendasi kebijakan untuk menghadapi situasi tersebut adalah pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas lembaga berbasis data dan umpan balik cepat. Pengukuran kinerja kebijakan ditinjau dari dampak sistemik, bukan kepatuhan prosedural dan administratif semata. Pemberantasan korupsi sebagai sumber “kompleksitas parasit” harus dilakukan dengan tegas dan tidak tebang pilih. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjadikan negara Republik Indonesia sebagai pengelola kompleksitas, bukan sumber/sebab terjadinya permasalahan ekonomi yang kompleks.

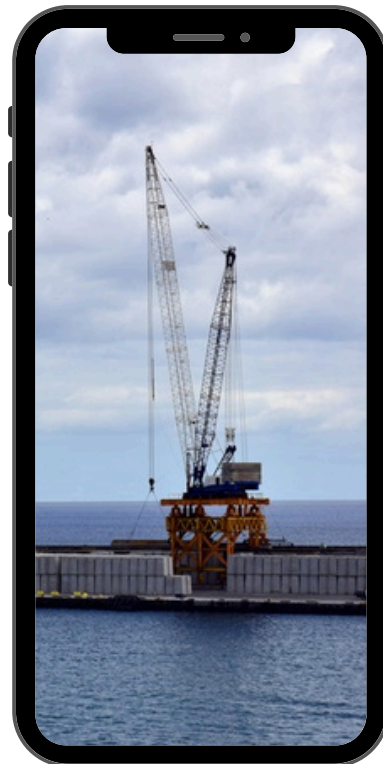
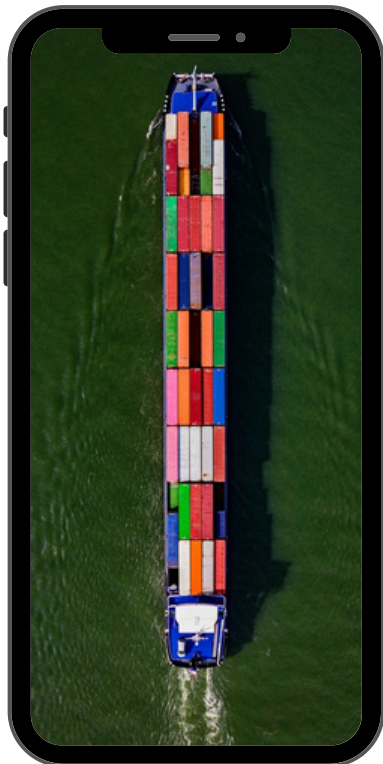


## PENUTUP

Ekonomi kompleksitas mengajarkan satu pelajaran kunci: masalah ekonomi modern jarang diselesaikan dengan kebijakan tunggal dan sederhana. Solusinya terletak pada kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan menyederhanakan diri ketika diperlukan.

Bagi Indonesia, pendekatan ini menawarkan jalan keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas dan birokrasi mahal. Tantangannya bukan menambah kompleksitas baru, tetapi menata ulang kompleksitas yang ada agar bekerja untuk produktivitas, inovasi, dan ketahanan nasional.

Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah kompleksitas Indonesia menjadi mesin kemajuan—atau beban yang menghambat masa depan.



# DATA PRIBADI, PERDAGA- NGAN, DAN KEDAULATA N DIGITAL INDONESIA

JULI 2025



*Di era ekonomi digital, data pribadi bukan sekadar informasi teknis. Ia adalah aset strategis, sumber kekuatan ekonomi, sekaligus elemen penting kedaulatan negara. Karena itu, ketentuan dalam perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat yang mewajibkan Indonesia mengakui perlindungan data AS sebagai “memadai” dan menjamin kelancaran transfer data pribadi ke wilayah AS memunculkan perdebatan serius.*

*Pertanyaan kuncinya: apakah pengaturan tersebut sejalan dengan kepentingan warga negara dan kedaulatan digital Indonesia—atau justru mengorbankannya demi kelancaran perdagangan?*

# KONTEKS PERJANJIAN DAN MASALAH HUKUMNYA

Sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan, Indonesia diminta:

1. Memberikan kepastian hukum atas transfer data pribadi warga negara Indonesia ke AS, dan
2. Mengakui bahwa AS memiliki standar perlindungan data yang memadai.

Ketentuan ini problematik karena hingga kini **Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif di tingkat federal**. Perlindungan data di AS bersifat sektoral (kesehatan, keuangan, konsumen di negara bagian tertentu), sementara kewenangan negara sangat kuat untuk mengakses data melalui regulasi seperti **CLOUD Act**.

Di sisi lain, Indonesia telah memiliki **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** yang menegaskan bahwa:

- data pribadi adalah milik subjek data (warga negara),
- persetujuan pemilik data merupakan syarat utama pemrosesan dan transfer,
- negara berkewajiban melindungi data warga negaranya.

**Dengan demikian, pengakuan otomatis terhadap rezim perlindungan data negara lain berpotensi bertentangan dengan semangat dan mandat UU PDP.**



## RISIKO UTAMA PENYERAHAN DATA KE YURISDIKSI ASING

Jika data pribadi warga negara dikelola oleh entitas swasta di luar negeri, sejumlah risiko strategis muncul.

- 01 Hilangnya Kedaulatan Data**

Data yang berada di luar negeri tunduk pada hukum negara tempat data tersebut disimpan. Pemerintah asing dapat memaksa akses data berdasarkan hukum nasional mereka, tanpa kontrol efektif dari Indonesia.
- 02 Kerentanan Privasi dan Keamanan**

Standar perlindungan data yang berbeda membuka peluang kebocoran, penyalahgunaan, atau akses tidak sah. Ketika insiden terjadi, negara asal kehilangan kendali penuh atas penanganannya.
- 03 Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Warga**

Warga Indonesia akan kesulitan mengajukan gugatan atau memperoleh pemulihan hukum jika data mereka disalahgunakan oleh perusahaan asing, karena perbedaan yurisdiksi dan rezim hukum.
- 04 Risiko Pengawasan dan Geopolitik**

Data dapat digunakan untuk pengawasan massal, pengumpulan intelijen, manipulasi opini publik, atau menjadi alat tawar dalam konflik geopolitik dan siber.
- 05 Kerentanan Ekonomi dan Strategis**

Ketergantungan pada infrastruktur data asing menciptakan ketergantungan ekonomi jangka panjang dan melemahkan ekosistem digital domestik.

# BELAJAR DARI PENDEKATAN GLOBAL

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara-negara besar memandang data sebagai isu strategis, bukan sekadar isu teknis.

## TIONGGOK

Tiongkok menerapkan lokalisasi data yang ketat, klasifikasi data nasional, dan pembatasan keras terhadap transfer lintas batas.

## UNI EROPA

Uni Eropa menempatkan hak privasi sebagai hak fundamental melalui GDPR, memberlakukan denda besar, dan hanya mengizinkan transfer data ke negara dengan perlindungan “setara”.

## USA

Amerika Serikat justru mendorong arus data bebas lintas batas, sembari mempertahankan kewenangan negara yang luas untuk mengakses data perusahaan AS di mana pun berada.

Perbandingan ini menunjukkan satu hal: negara yang ingin menjaga kedaulatan digital tidak menyerahkan data begitu saja dalam perjanjian dagang.

## IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Bagi Indonesia, isu ini melampaui soal teknologi dan perdagangan. Ia menyentuh:

- perlindungan hak asasi warga negara,
- keamanan nasional dan siber,
- daya saing ekonomi digital domestik,
- serta posisi tawar Indonesia dalam geopolitik global.

Tanpa kerangka perlindungan yang kuat, Indonesia berisiko menjadi penyedia data mentah bagi ekonomi digital global, tanpa kendali dan nilai tambah yang sepadan.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENJAGA KEDAULATAN DATA INDONESIA

Berdasarkan analisis tersebut, kami merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut.

## 1. TEGASKAN PRINSIP KEDAULATAN DATA DALAM PERJANJIAN DAGANG

Kedaulatan data dalam bidang perdagangan dimulai dari pemerintah harus memiliki sikap dan posisi berani untuk melakukan penolakan atas pengakuan otomatis terhadap rezim perlindungan data negara lain. Negara harus memastikan setiap perjanjian perdagangan mematuhi UU PDP. Pemerintah harus memastikan dan menjadikan perlindungan data sebagai klausul *non-negotiabel* dalam kepentingan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk : memastikan kepentingan warga negara tidak dikorbankan oleh kepentingan perdagangan jangka pendek.

## 2. TERAPKAN KEBIJAKAN LOKALISASI DATA STRATEGIS

Rekomendasi kedua adalah mewajibkan tersedianya penyimpanan (*storage*) domestik untuk data sensitif seperti kependudukan, kesehatan, biometrik, dan keuangan. Pemberian izin transfer lintas batas hanya dapat dilakukan setelah memenuhi hasil penilaian risiko dan izin dari regulator. Tujuan dari penerapan kebijakan lokalisasi data strategis adalah untuk menjaga kontrol negara atas data strategis.

## 3. PERKUAT MEKANISME PERSETUJUAN DAN HAK SUBJEK DATA

Rekomendasi ketiga adalah memastikan persetujuan (*consent*) warga atas penggunaan data pribadinya bersifat eksplisit, sadar, dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Negara harus hadir dalam menyediakan regulasi dan pengawasan terkait dengan kewajiban transparansi penuh tentang lokasi, tujuan, dan risiko transfer data. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hak warga sebagai pemilik data.

## 4. BANGUN KERANGKA PERJANJIAN DATA BILATERAL YANG SETARA

Rekomendasi keempat berhubungan dengan kerangka kerjasama bilateral yang setara dengan negara lain. Jika transfer lintas batas diperlukan, maka harus melakukannya melalui perjanjian data bilateral dengan standar perlindungan yang setara dan mekanisme penegakan bersama. Dalam proses negosiasi, wajib menyertakan klausul ganti rugi dan penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi sebagai bagian dari mitigasi risiko di awal kerjasama. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi asimetri kekuasaan hukum.

## 5. KEMBANGKAN INFRASTRUKTUR DAN INDUSTRI DATA NASIONAL

Rekomendasi kelima adalah tentang infrastruktur dan industri data nasional. Pada isu ini, pemerintah harus mendorong pusat data, *cloud* nasional, dan ekosistem keamanan siber domestik. Pemerintah wajib memberikan insentif bagi perusahaan yang memproses dan menyimpan data di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan strategis pada penyedia asing.

## 6. TINGKATKAN KAPASITAS PENGAWASAN DAN KEAMANAN SIBER

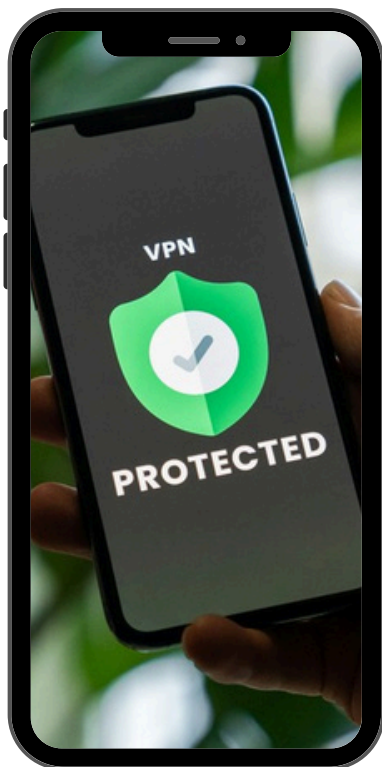
Dalam konteks *global trade*, data adalah komoditas yang menjadi objek transaksi dalam membangun relasi maupun kerjasama. Untuk itu, kami merekomendasikan bahwa pemerintah perlu memperkuat otoritas perlindungan data dengan kewenangan audit dan sanksi tegas. Secara teknis kementerian terkait perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan standar enkripsi, audit keamanan, dan pelaporan insiden. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan perlindungan data berjalan efektif, bukan simbolik.



## PENUTUP

Di abad ke-21, kedaulatan tidak hanya diukur dari wilayah fisik, tetapi juga dari kendali atas data warganya. Perjanjian perdagangan yang mengabaikan dimensi ini berisiko menggerus hak warga negara dan posisi strategis Indonesia di masa depan.

Indonesia tidak anti-perdagangan dan tidak anti-teknologi. Namun keterbukaan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak, keamanan nasional, dan kemandirian digital. Keputusan kebijakan hari ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi pemain berdaulat dalam ekonomi digital global—atau sekadar penyedia data bagi kekuatan lain.





# MEMAKNAI KEMBALI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ERA DIGITAL DAN MASYARAKAT YANG CAIR

AGUSTUS 2025



*Peringatan kemerdekaan Indonesia pada 2025 berlangsung di tengah perubahan mendasar cara dunia bekerja.*

*Globalisasi digital, ketergantungan teknologi, dan bangkitnya aktor non-negara menggeser makna kedaulatan yang selama ini bertumpu pada wilayah, bendera, dan batas fisik.*

*Dalam konteks inilah, kemerdekaan perlu dimaknai ulang—bukan sebagai otonomi mutlak, melainkan kemampuan mengelola ketergantungan secara strategis.*

*Konsep masyarakat cair—yang menggambarkan kehidupan modern yang serba sementara, cepat berubah, dan lintas batas—menjadi lensa penting untuk memahami tantangan kemerdekaan hari ini.*

*Kekuasaan tidak lagi hanya dimiliki negara; ia mengalir melalui jaringan digital, platform global, data, algoritma, dan sistem keuangan internasional.*

# KEDAULATAN DIGITAL SEBAGAI DIMENSI BARU KEMERDEKAAN

Di era digital, kemerdekaan nasional mencakup kendali atas infrastruktur digital, aliran data, dan tata kelola siber. Negara yang tidak menguasai ketiganya akan rentan terhadap intervensi asing—baik melalui pengawasan data, serangan siber, maupun tekanan ekonomi.

Tiga pilar utama kedaulatan digital adalah:

1. Lokalisasi dan perlindungan data untuk memastikan data warga negara tidak sepenuhnya tunduk pada hukum asing.
2. Keamanan siber guna melindungi infrastruktur kritis seperti pemilu, jaringan listrik, dan sistem pembayaran.
3. Otonomi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi global yang dapat mempengaruhi kebijakan dan opini publik.

**Pengalaman global menunjukkan bahwa negara-negara yang serius menjaga kedaulatan digital—melalui regulasi privasi, keamanan siber, dan pengembangan teknologi domestik—lebih mampu melindungi kepentingan nasionalnya.**



## **KEMANDIRIAN EKONOMI DALAM DUNIA YANG SANGAT TERHUBUNG**

Pandemi, perang dagang, dan konflik geopolitik menyingkap rapuhnya rantai pasok global. Ketergantungan tunggal pada negara atau platform tertentu kini menjadi risiko strategis. Karena itu, kemerdekaan ekonomi di era digital tidak berarti menutup diri, melainkan membangun ketahanan melalui diversifikasi.

Kemandirian ekonomi masa kini mencakup tiga fundamen utama yaitu :

- ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi sumber bahan baku dan pasar,
- penguatan ekonomi digital domestik agar nilai tambah tidak seluruhnya lari ke luar negeri,
- eksperimen sistem keuangan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang hegemonik.

## **KEMANDIRIAN BUDAYA DAN INFORMASI**

Dalam masyarakat cair, identitas dan narasi beredar cepat melalui platform digital. Disinformasi, manipulasi algoritma, dan homogenisasi budaya menjadi ancaman nyata bagi kohesi sosial dan keberagaman budaya Indonesia.

Kemerdekaan budaya hari ini berarti:

- menjaga kedaulatan media dan ruang publik digital,
- melindungi budaya lokal dari cultural cleansing dan narasi palsu,
- sekaligus tetap menjamin kebebasan berekspresi dan hak warga untuk berpendapat.

## BANGKITNYA “KEKUATAN CAIR” DAN TANTANGAN TERHADAP NEGARA

Era digital melahirkan kekuatan cair yang memiliki karakteristik sebagai aktor non-negara yang luwes, sulit dilacak, dan beroperasi lintas batas.

Mereka mencakup:

- **perusahaan teknologi global** yang menguasai data dan infrastruktur,
- **kelompok peretas dan hacktivist** yang mampu melumpuhkan sistem negara,
- **jaringan keuangan global dan kripto** yang dapat menghindari sanksi,
- **kelompok kriminal transnasional** yang membangun “pemerintahan bayangan”.

Kekuatan cair ini menantang monopoli kekuasaan negara melalui arbitrase regulasi, pengendalian informasi, dan perang hibrida. Dalam situasi ini, kedaulatan tidak hancur, tetapi berubah bentuk.

## KEMERDEKAAN SEBAGAI KESEIMBANGAN DINAMIS

Kemerdekaan di era masyarakat cair tidak lagi soal kontrol total, melainkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kendali.

Negara yang bertahan adalah negara yang:

- cukup cair untuk beradaptasi dengan teknologi dan perubahan cepat,
- namun cukup “viskos” untuk memperlambat aliran yang mengancam stabilitas melalui hukum, standar, dan aliansi.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENJAGA KEMERDEKAAN DI ERA DIGITAL

Berdasarkan analisis di atas, kami mengajukan rekomendasi kebijakan berikut.

## 1. TEGASKAN KEDAULATAN DIGITAL NASIONAL

Rekomendasi kebijakan pertama adalah sikap tegas dengan penerapan kebijakan lokalisasi data strategis dan perlindungan privasi yang ketat. Negara harus membangun pusat data dan infrastruktur *cloud* nasional yang andal. Negara harus memperkuat kapasitas keamanan siber dan respons insiden nasional. Tujuan kebijakan ini adalah memastikan kendali negara atas aset digital strategis.

## 2. KELOLA KETERGANTUNGAN TEKNOLOGI SECARA STRATEGIS

Rekomendasi kedua berkaitan dengan kemandirian teknologi secara strategis. Pemerintah perlu melakukan diversifikasi penyedia teknologi dan infrastruktur digital. Pemerintah harus didorong untuk mengembangkan teknologi dalam negeri melalui insentif riset dan inovasi. Mitigasi risiko perlu disadari untuk dilakukan sedari awal kebijakan, untuk itu perlu menerapkan *risk assessment* atas ketergantungan platform global untuk layanan publik. Tujuan kebijakan ini mengurangi risiko ketergantungan tunggal dan tekanan eksternal.

## 3. PERKUAT KETAHANAN EKONOMI DAN RANTAI PASOK

Rekomendasi ketiga meliputi proses penguatan ketahanan ekonomi dan rantai pasok, Pemerintah perlu Diversifikasi mitra dagang dan sumber bahan baku sebagai bagian mitigasi risiko. Pemerintah harus membangun industri strategis domestik berbasis nilai tambah. Selanjutnya adalah mengintegrasikan kebijakan perdagangan dengan keamanan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan global.

## 4. LINDUNGI RUANG INFORMASI DAN BUDAYA

rekomendasi keempat adalah memperkuat regulasi platform digital untuk melawan disinformasi tanpa membungkam kebebasan berekspresi. Pemerintah harus menyiapkan perangkat kebijakan yang mendukung produksi konten lokal dan literasi digital publik. Inisiatif ini akan berjalan seiring dengan perlindungan kelompok rentan dan minoritas dari serangan narasi digital.

## 5. LINDUNGI RUANG INFORMASI DAN BUDAYA

rekomendasi keempat adalah memperkuat regulasi platform digital untuk melawan disinformasi tanpa membungkam kebebasan berekspresi. Pemerintah harus menyiapkan perangkat kebijakan yang mendukung produksi konten lokal dan literasi digital publik. Inisiatif ini akan berjalan seiring dengan perlindungan kelompok rentan dan minoritas dari serangan narasi digital.. Tujuan program ini adalah untuk menjaga kohesi sosial dan keberagaman budaya.

#### 4. LINDUNGI RUANG INFORMASI DAN BUDAYA

rekomendasi keempat adalah memperkuat regulasi platform digital untuk melawan disinformasi tanpa membungkam kebebasan berekspresi. Pemerintah harus menyiapkan perangkat kebijakan yang mendukung produksi konten lokal dan literasi digital publik. Inisiatif ini akan berjalan seiring dengan perlindungan kelompok rentan dan minoritas dari serangan narasi digital.. Tujuan program ini adalah untuk menjaga kohesi sosial dan keberagaman budaya.

#### 5. BANGUN NEGARA YANG ADAPTIF DAN LINCAH

Rekomendasi ini untuk merespons lanskap organisasi publi yang berubah karena dinamika global. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga berbasis data dan respons cepat. negara harus memiliki dan mengembangkan strategi siber serta regulasi yang fleksibel namun tegas. Masyarakat adalah subyek-subyek otonom yang turut menggerakkan bagaimana data disusun dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk membangun sistem dan kedaulatan yang solid, maka negara harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam tata kelola digital. Rekomendasi kebijakan ini bertujuan agar menjadikan negara memiliki kemampuan mengelola kompleksitas dan perubahan yang cepat.

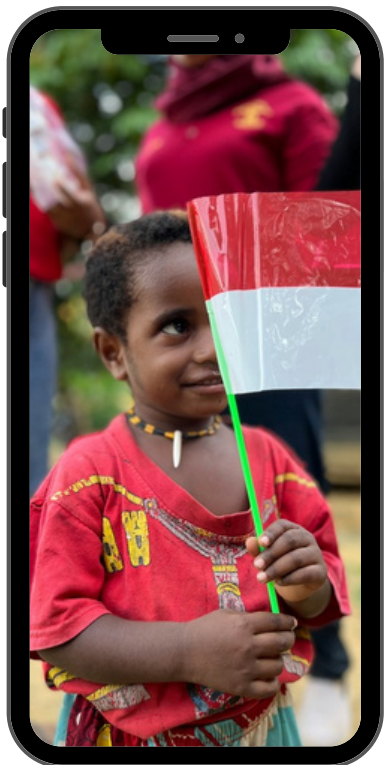


## PENUTUP

Kemerdekaan Indonesia di abad ke-21 bukanlah kondisi statis yang selesai pada 17 Agustus 1945. Ia adalah proses yang terus dinegosiasikan di tengah arus digitalisasi, globalisasi, dan kekuatan cair.

Tantangan hari ini menuntut definisi kemerdekaan yang lebih matang: bukan sekadar bebas dari penjajahan, tetapi mampu mengendalikan ketergantungan dan melindungi kepentingan warga di dunia yang saling terhubung.

Keputusan kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi subjek berdaulat dalam era digital—atau sekadar objek dari kekuatan global yang cair dan tak kasatmata.





# PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN:

## MENCARI JALAN TENGAH PEMBANGUNAN INDONESIA

SEPTEMBER 2025



*Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia relatif berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun di balik capaian tersebut, persoalan mendasar masih membayangi: manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.*

*Ketimpangan antarwilayah, antarkelompok sosial, dan antara sektor formal dan informal masih menjadi tantangan serius.*

*Dilema klasik pembangunan kembali mengemuka: bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperlebar kesenjangan, dan sebaliknya, bagaimana mengurangi ketimpangan tanpa mematikan insentif berusaha dan investasi.*

*Jawaban atas dilema ini kerap dirumuskan dalam konsep pertumbuhan inklusif—pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas kesempatan dan keadilan sosial.*

# MENGAPA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN TIDAK OTOMATIS SEJALAN?



Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali terkonsentrasi di sektor tertentu, wilayah tertentu, dan kelompok tertentu. Tanpa kebijakan korektif, pertumbuhan justru memperkuat akumulasi kekayaan di tangan segelintir pelaku ekonomi. Di sisi lain, kebijakan redistribusi yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan ketergantungan, pemborosan anggaran, dan bahkan korupsi.

Karena itu, tantangan utama Indonesia bukan memilih antara pertumbuhan atau pemerataan, melainkan merancang kebijakan yang mampu menghubungkan keduanya secara produktif.

# EMPAT PILAR PERTUMBUHAN INKLUSIF INDONESIA - #1

## Pilar 1: Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan yang berkualitas bukan sekadar tinggi secara angka, tetapi menciptakan lapangan kerja yang luas dan bernilai tambah. Investasi infrastruktur publik—jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan internet—menjadi fondasi untuk menurunkan biaya logistik dan membuka akses ekonomi ke daerah tertinggal.

Di saat yang sama, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sangat krusial. UMKM menyerap tenaga kerja terbesar, namun masih menghadapi hambatan permodalan, teknologi, dan akses pasar. Tanpa intervensi negara yang tepat, pertumbuhan hanya akan dinikmati sektor besar dan terintegrasi global.

Inovasi dan teknologi juga berperan penting. Ekonomi digital dan startup berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan membuka sektor baru, tetapi manfaatnya harus diupayakan agar tidak hanya terkonsentrasi di kota besar dan kelompok terdidik.



# EMPAT PILAR PERTUMBUHAN INKLUSIF INDONESIA - #2

## Pilar 2: Investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertumbuhan yang inklusif mensyaratkan kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang merata dan berkualitas—dari PAUD hingga vokasi dan perguruan tinggi—merupakan kunci memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Selain itu, dunia kerja yang terus berubah menuntut program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama bagi pekerja di sektor tradisional dan mereka yang terdampak otomatisasi. Tanpa kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi justru akan menghasilkan pengangguran struktural.

Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau juga menjadi fondasi penting. Sistem jaminan kesehatan nasional mencegah keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan dan menjaga produktivitas tenaga kerja.



# EMPAT PILAR PERTUMBUHAN INKLUSIF INDONESIA - #3

## Pilar 3: Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan

Perlindungan sosial berfungsi sebagai penyangga agar kelompok rentan tidak tertinggal terlalu jauh. Program seperti BPNT, PKH, dan bantuan langsung tunai memiliki peran penting dalam mengurangi dampak langsung kemiskinan.

Namun perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada bantuan konsumtif. Tanpa integrasi dengan pemberdayaan ekonomi, bantuan justru berisiko menciptakan ketergantungan dan diselewengkan untuk kepentingan politik. Karena itu, data mikro yang akurat, mutakhir, dan lintas sektor menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan bersifat transisional menuju kemandirian.

Kelompok rentan—perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat—perlu didorong melalui kebijakan afirmatif agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Integrasi kebijakan TJSL, keuangan berkelanjutan, dan program pemerintah menjadi kunci.



# EMPAT PILAR PERTUMBUHAN INKLUSIF INDONESIA - #4

## Pilar 4: Kerangka Kebijakan yang Adil

Pertumbuhan dan pemerataan hanya dapat berjalan seiring jika lapangan permainan ekonomi adil. Sistem perpajakan yang progresif menjadi instrumen penting untuk redistribusi yang sehat, termasuk pengenaan pajak atas kekayaan dan penindakan serius terhadap ekonomi ilegal seperti judi daring, penyelundupan, tambang ilegal, dan narkoba.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga krusial. Korupsi bukan hanya persoalan moral, tetapi penghambat langsung pertumbuhan dan pemerataan, karena mengalihkan sumber daya publik ke segelintir orang.

Selain itu, kebijakan upah yang adil dan perlindungan pekerja—disertai pembenahan sistem jaminan sosial agar transparan dan efisien—diperlukan untuk menahan pelebaran kesenjangan pendapatan.



# RETERKAITAN EKONOMI FORMAL DAN INFORMAL

Ekonomi Indonesia ditopang oleh interaksi antara:

- usaha formal yang terhubung ke pasar global, dan
- usaha informal/UMKM yang bertumpu pada pasar domestik.

Kebijakan yang hanya berfokus pada salah satunya akan menciptakan ketimpangan struktural. Tantangannya adalah membangun jembatan antara ekonomi formal dan informal, sehingga UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai yang lebih luas.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN: TUJUH LANGKAH MENDESAR

Berdasarkan analisis di atas, Perkumpulan Amerta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
2. Harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih.
3. Peninjauan program sosial yang rawan korupsi, menciptakan ketergantungan, dan tidak memberikan ungkitan ekonomi.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan digital, terutama di daerah dengan biaya logistik tinggi dan digital exclusion.
5. Penegakan hukum tegas terhadap ekonomi ilegal: judi daring, narkoba, mafia migas, mafia ekspor-impor, dan mafia proyek.
6. Integrasi data lintas fungsi dan pengembangan digital government sebagai fondasi kebijakan tepat sasaran.
7. Pemberian insentif pada kegiatan bernilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi komoditas, riset dan pengembangan, serta ekonomi digital.

## PENUTUP

Pertumbuhan dan pemerataan bukanlah dua tujuan yang saling meniadakan. Tantangan Indonesia hari ini adalah mengubah pertumbuhan menjadi mesin pemerataan, bukan membiarkannya memperdalam kesenjangan.

Hal ini menuntut kebijakan yang konsisten, terintegrasi, dan berani menyentuh akar struktural—mulai dari kualitas pertumbuhan, investasi SDM, perlindungan sosial transformatif, hingga penegakan hukum yang adil.

Seperti dirangkum dalam pesan kunci kajian ini:

**Jangan hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi kejarlah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja luas dan berkualitas, disertai investasi besar pada sumber daya manusia dan perlindungan bagi yang paling rentan.**

Keputusan kebijakan hari ini akan menentukan apakah Indonesia mampu tumbuh sekaligus adil—atau terus bergulat dengan pertumbuhan yang timpang.



# APAKAH GERAKAN SOSIAL AKAN KEMBALI TERJADI DI INDONESIA?

SEPTEMBER 2025



*Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali didahului oleh gelombang gerakan sosial.*

*Reformasi 1998, misalnya, tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan puncak dari akumulasi krisis ekonomi, ketidakadilan politik, dan kekecewaan publik yang terpendam lama.*

*Pertanyaannya hari ini bukan sekadar apakah gerakan sosial akan muncul kembali, melainkan dalam bentuk apa, dengan skala seperti apa, dan dipicu oleh kondisi apa.*

*Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini tidak berada di ambang gerakan sosial berskala revolusioner, namun berada dalam kondisi ketegangan sosial yang tinggi dan berkelanjutan.*

***Pola yang lebih dominan bukan satu ledakan besar, melainkan apa yang dapat disebut sebagai “seribu gerakan kecil”—mobilisasi lokal, sektoral, dan berbasis isu yang terus bermunculan.***

# BAHAN BAKAR UTAMA

## GERAKAN SOSIAL: KELUHAN DAN KETIDARADILAN

*Keluhan dapat dipahami sebagai ekspresi rasa lelah, kekesalan, hingga kekecewaan. Dalam lintas sejarah nasional dan global, tidak ada gerakan sosial yang muncul tanpa keluhan. Di Indonesia, keluhan tersebut hadir dalam berbagai dimensi.*

01

### **Keluhan Ekonomi**

Pelemahan daya beli, pengangguran (terutama di kalangan pemuda), ketimpangan ekonomi yang lebar, lonjakan harga pangan, serta persepsi korupsi yang merampas sumber daya publik menjadi sumber kekecewaan yang nyata. Yang sering kali paling memicu bukan kemiskinan absolut, melainkan “kekurangan relatif”—perasaan bahwa kehidupan hari ini lebih buruk dari harapan atau dibandingkan kelompok lain.

02

### **Keluhan Politik**

Melemahnya penegakan hukum, kekerasan aparat, pembatasan kebebasan sipil, serta proses politik yang dipersepsikan tidak adil memperkuat rasa alienasi warga. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi sebagian publik merasakan jarak yang semakin lebar dengan pusat pengambilan keputusan.

06

### **Keluhan Sosial dan Identitas**

Diskriminasi berbasis agama, etnis, gender, dan status sosial terus menjadi sumber konflik laten. Isu-isu ini mudah dimobilisasi karena menyentuh identitas dan martabat kelompok.

## PELUANG POLITIK: KAPAN GERAKAN BISA MEMBESAR?



Keluhan saja tidak cukup. Gerakan sosial tumbuh ketika masyarakat percaya bahwa perubahan mungkin terjadi. Faktor-faktor yang membuka peluang tersebut antara lain:

- pembelahan elite, ketika elite politik tidak lagi solid;
- pergeseran aliansi, termasuk perubahan dukungan internasional;
- celah akses politik, seperti janji reformasi yang setengah hati;
- persepsi lemahnya kapasitas negara, baik karena ketidakmampuan maupun keengganan menggunakan represi ekstrem;
- serta efek penularan global, ketika keberhasilan gerakan di negara lain memberi inspirasi.

Saat ini, sebagian faktor tersebut belum bertemu dalam satu momentum besar di Indonesia.

# BAGAIMANA GERAKAN SOSIAL BEROPERASI DI ERA DIGITAL

Era digital telah mengubah wajah gerakan sosial secara mendasar. Sifat komunikasi yang sangat interaktif telah mengubah mode gerakan sosial dan aktivisme berbasis digital

## STRUKTUR TANPA PEMIMPIN TUNGGAL

Berbeda dengan gerakan klasik yang hierarkis, banyak gerakan hari ini berbentuk jaringan terdesentralisasi. Tidak ada satu pemimpin yang dominan; koordinasi terjadi melalui isu, tagar, dan tujuan bersama. Struktur ini membuat gerakan lebih lentur dan sulit dipatahkan.

## MOBILISASI CEPAT DAN BIAYA RENDAH

Media sosial memungkinkan mobilisasi dalam hitungan jam, bukan minggu. Partisipasi tidak selalu membutuhkan kehadiran fisik—cukup dengan menyebarkan informasi, menandatangani petisi daring, atau donasi digital.

## KONTROL NARASI

Gerakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media arus utama. Mereka dapat membingkai isu, menyebarkan dokumentasi langsung, dan membangun identitas kolektif secara real time.

## FAKTOR PENGHAMBAT GERAKAN NASIONAL

Meskipun keluhan meluas, ada sejumlah faktor yang menahan eskalasi menjadi gerakan nasional:

- stabilitas politik relatif dan legitimasi negara yang masih signifikan;
- tidak adanya peristiwa pemicu nasional yang menyatukan berbagai keluhan;
- oposisi yang terfragmentasi, tanpa figur atau agenda pemersatu;
- kapasitas negara untuk kooptasi dan represi, termasuk di ruang digital.

Karena itu, skenario paling mungkin bukan revolusi, melainkan mobilisasi yang terus-menerus, terlokalisasi, dan berbasis isu spesifik.

## SKENARIO INDONESIA SAAT INI: “SERIBU GERAKAN KECIL”

Pola yang terlihat adalah:

- aksi buruh menuntut upah,
- protes petani dan masyarakat adat atas konflik lahan,
- demonstrasi mahasiswa menentang undang-undang tertentu,
- gerakan lingkungan melawan tambang dan proyek ekstraktif,
- mobilisasi kelompok keagamaan atas isu moral dan identitas.

Gerakan-gerakan ini sering berhasil menekan kebijakan tertentu, tetapi belum terhubung dalam satu agenda nasional yang menyeluruh.



# **REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENGELOLA KETEGANGAN SOSIAL SECARA DEMOKRATIS**

Berdasarkan analisis di atas, Perkumpulan Amerta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut.

## **1. MENANGANI AKAR KELUHAN, BUKAN SEKADAR GEJALANYA**

Menangani akar keluhan sosial, bukan sekadar gejalanya, memerlukan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan serta biaya hidup secara transparan, dan penguatan pemberantasan korupsi sebagai isu krusial bagi legitimasi negara, dengan tujuan utama mengurangi bahan bakar utama ketidakpuasan sosial.

## **2. MEMPERLUAS RUANG PARTISIPASI DAN DIALOG PUBLIK**

Memperluas ruang partisipasi dan dialog publik dilakukan dengan melibatkan serikat buruh, organisasi mahasiswa, petani, masyarakat adat, serta kelompok sipil dalam proses perumusan kebijakan, disertai penggunaan mekanisme konsultasi publik yang bermakna dan bukan sekadar simbolik, dengan tujuan menyalurkan aspirasi masyarakat secara konstruktif sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

## **3. MENJAGA KEBEBASAN SIPIL DAN RUANG DIGITAL**

Menjaga kebebasan sipil dan ruang digital menuntut perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat, pembatasan penggunaan pendekatan represif terhadap aksi damai, serta penegasan bahwa pengawasan ruang digital harus tunduk pada prinsip hukum dan hak asasi manusia, dengan tujuan mencegah eskalasi konflik yang dipicu oleh represi berlebihan.

## **4. MEMBANGUN KAPASITAS NEGARA YANG RESPONSIF**

Membangun kapasitas negara yang responsif dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara dalam merespons keluhan masyarakat secara cepat dan adil, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan penegakan hukum di tingkat lokal, dengan tujuan utama meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

## **5. MENGANTISIPASI KRISIS SEBAGAI PEMICU**

Mengantisipasi krisis sebagai pemicu ketidakstabilan dilakukan dengan menyiapkan skenario kebijakan untuk menghadapi krisis ekonomi, konflik elektoral, atau kebijakan kontroversial, serta membangun early warning system sosial berbasis data dan pemantauan masyarakat sipil, dengan tujuan mencegah satu krisis berkembang menjadi katalisator nasional yang destruktif.

## PENUTUP

Indonesia hari ini adalah negara dengan masyarakat sipil yang aktif dan terus bergerak, tetapi belum berada di ambang ledakan sosial berskala nasional. Namun tekanan struktural—ketimpangan, ketidakadilan, dan krisis kepercayaan—terus mendidih di bawah permukaan.

Gerakan sosial kemungkinan besar akan terus hadir, bukan sebagai satu gelombang besar, melainkan dalam bentuk banyak gerakan kecil yang menuntut akuntabilitas negara. Tantangan bagi pemerintah bukan memadamkan gerakan tersebut, melainkan mengelolanya secara demokratis dan menjadikannya bagian dari mekanisme koreksi kebijakan.

Sejarah menunjukkan bahwa gerakan sosial bukan musuh negara. Ia sering kali merupakan alarm dini bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.





# MENALAR REFORMASI KEPOLISIAN INDONESIA: DARI KRISIS KEPERCAYAAN MENUJU INSTITUSI YANG AKUNTABEL

OKTOBER 2025



*Wacana reformasi kepolisian kembali menguat dalam diskursus publik Indonesia.*

*Berbagai peristiwa—mulai dari dugaan keterlibatan aparat dalam ekonomi ilegal, penggunaan kekerasan berlebihan dalam unjuk rasa, hingga persepsi keberpihakan politik dalam pemilu—mendorong pertanyaan mendasar: apakah desain kelembagaan kepolisian Indonesia saat ini masih relevan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi?*

*Reformasi kepolisian bukan isu teknis semata. Ia menyentuh jantung relasi negara–warga: soal rasa aman, keadilan, dan kepercayaan.*

*Kajian ini bertujuan membantu publik memahami akar persoalan reformasi kepolisian dan pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia, tanpa jargon berlebihan namun tetap berbasis analisis kelembagaan.*

# MENGAPA REFORMASI KEPOLISIAN KEMBALI MENDESAK?



Setidaknya ada lima faktor utama yang membuat isu ini kembali mengemuka.

**Pertama**, posisi kelembagaan kepolisian yang berada langsung di bawah Presiden, berbeda dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, menimbulkan perdebatan soal akuntabilitas sipil dan kontrol demokratis.

**Kedua**, inisiatif reformasi yang datang dari dalam institusi kepolisian sendiri—melalui pembentukan tim internal—memunculkan kekhawatiran konflik kepentingan dan reformasi yang bersifat kosmetik.

**Ketiga**, dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam ekonomi ilegal seperti judi daring dan narkoba yang terus berulang, meskipun ada penindakan kasus per kasus, menciptakan persepsi “ganti pemain, bukan ganti sistem”.

**Keempat**, penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengendalian massa, yang sering hanya berujung pada sanksi bagi pelaku lapangan, sementara rantai komando dan pemberi perintah luput dari pertanggungjawaban.

**Kelima**, persepsi keberpihakan politik dalam pemilu dan pilkada, baik secara terbuka maupun terselubung, yang dinilai mencederai prinsip netralitas aparat dan kualitas demokrasi.

## MASALAH INTI: AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

### **Budaya Impunitas**

Salah satu sumber utama krisis kepercayaan publik adalah ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten atas penyalahgunaan wewenang. Proses hukum sering kali baru berjalan ketika kasus menjadi viral, dan hasilnya dirasakan publik sebagai formalitas administratif, bukan keadilan substantif.

### **Pengawasan Internal yang Lemah**

Pengawasan internal dinilai lambat, tertutup, dan bias. Sementara itu, pengawasan eksternal—oleh lembaga lain atau masyarakat—menghadapi hambatan hukum, politik, dan kelembagaan.

### **Minimnya Transparansi**

Kurangnya keterbukaan dalam penggunaan anggaran, catatan disiplin personel, pengerahan aparat, dan pelaporan insiden memperkuat kecurigaan publik. Transparansi kerap digunakan selektif untuk kasus tertentu, bukan sebagai prinsip tata kelola.

## PENGGUNAAN KERUATAN DAN GEJALA MILITERISASI

Banyak kritik diarahkan pada ketidakjelasan kebijakan penggunaan kekuatan. Dalam sejumlah kasus, aparat dinilai sigap melindungi pihak kuat atau kepentingan tertentu, tetapi lamban terhadap korban.

Pengadaan peralatan militer—kendaraan lapis baja, senjata berat—memupuk mentalitas militeristik yang tidak sejalan dengan fungsi polisi sebagai pelindung masyarakat sipil. Kerusuhan Agustus 2025 menjadi salah satu contoh bagaimana pendekatan keras justru memperburuk situasi.

## TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DAN BEBAN BERLEBIH

Kepolisian juga menghadapi **tumpang tindih kewenangan** dengan berbagai lembaga:

- penanganan narkoba dengan BNN,
- pencucian uang dan pajak dengan DJP, PPATK, dan KPK,
- penanggulangan terorisme dengan BNPT dan Densus 88.

Akibatnya, kepolisian memikul beban yang terlalu luas—mulai dari kejahatan ringan hingga terorisme—yang berkontribusi pada fenomena **over-policing** untuk pelanggaran kecil, tetapi **under-policing** terhadap kejahatan serius.

## PILIHAN MODEL TATA KELOLA KEPOLISIAN

Kajian ini mengidentifikasi tiga pendekatan utama.

### 1. Model Pengendalian Lokal (di bawah pemerintah daerah)

Model ini unggul dalam akuntabilitas dan responsivitas terhadap masyarakat, tetapi rentan terhadap politisasi lokal, ketimpangan sumber daya antarwilayah, dan fragmentasi penanganan kejahatan lintas daerah.

### 2. Model di Bawah Kementerian Pemerintah Pusat

Model ini menjanjikan standarisasi, profesionalisme, dan koordinasi nasional, namun berisiko menciptakan aparat yang terasa “asing” bagi komunitas lokal, birokratis, dan rawan disalahgunakan oleh kekuasaan pusat.

### 3. Model Hibrida

Model ini menggabungkan keduanya: pembagian kewenangan yang lebih rasional, dengan kepolisian pusat menangani kejahatan besar dan lintas wilayah, sementara kepolisian daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan DPRD, bekerja berdasarkan standar nasional.

# **REKOMENDASI KEBIJAKAN: ARAH REFORMASI KEPOLISIAN YANG REALISTIS**

Berdasarkan analisis di atas, Perkumpulan Amerta merekomendasikan agenda reformasi Kepolisian Republik Indonesia berikut.

## **1. BANGUN AKUNTABILITAS EKSTERNAL YANG NYATA**

Reformasi kepolisian perlu dimulai dengan membangun akuntabilitas eksternal yang nyata melalui mekanisme pengawasan independen yang memiliki kewenangan substansial. Pertanggungjawaban harus diberlakukan secara berjenjang hingga level komando dan pimpinan, bukan hanya pada pelaku lapangan. Langkah ini bertujuan memutus budaya impunitas yang selama ini melemahkan kepercayaan publik.

## **2. PERJELAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN**

Kebijakan penggunaan kekuatan perlu diperjelas melalui aturan pengerahan dan penggunaan kekuatan yang transparan, terukur, dan berbasis hak asasi manusia. Kecenderungan militerisasi harus dihentikan dengan memprioritaskan pendekatan de-eskalasi dalam penanganan situasi konflik. Langkah ini bertujuan menurunkan tingkat kekerasan sekaligus meningkatkan legitimasi publik terhadap kepolisian.

## **3. RASIONALISASI KEWENANGAN ANTAR-LEMBAGA**

Rasionalisasi kewenangan antar-lembaga perlu dilakukan dengan mengalihkan kewenangan tertentu kepada institusi yang lebih tepat, seperti penanganan narkoba kepada BNN dan urusan lalu lintas kepada dinas transportasi. Kepolisian kemudian dapat difokuskan pada fungsi inti penegakan hukum dan penanganan kejahatan serius. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas serta fokus operasional kepolisian.

## **4. TERAPKAN PENEGAKAN HUKUM BERBASIS DATA**

Penegakan hukum perlu diarahkan berbasis data dengan mengurangi pendekatan agresif yang luas dan tidak terarah. Prioritas penanganan difokuskan pada kejahatan serius dan pelaku berulang melalui analisis data yang akurat. Pendekatan ini bertujuan mengatasi over-policing dan under-policing secara bersamaan.

## **5. PILIH MODEL TATA KELOLA HIBRIDA SEBAGAI JALAN TENGAH**

Model tata kelola hibrida dapat dipilih sebagai jalan tengah dengan menempatkan kepolisian nasional pada peran penetapan standar, pelatihan, serta penanganan kejahatan lintas wilayah. Sementara itu, kepolisian daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dan parlemen daerah dalam kerangka akuntabilitas lokal. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan profesionalisme nasional dengan sensitivitas terhadap konteks dan kebutuhan lokal.

## **6. REFORMASI BUDAYA ORGANISASI**

Reformasi budaya organisasi kepolisian perlu dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia, etika profesi, dan orientasi pelayanan publik secara konsisten dalam seluruh jenjang karier. Perlindungan yang kuat terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower) juga harus dijamin. Langkah ini bertujuan membangun profesionalisme kepolisian secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

## PENUTUP

Reformasi kepolisian bukan sekadar memindahkan struktur atau mengganti pimpinan. Ia adalah transformasi sistemik—mencakup aturan, budaya, dan relasi kuasa. Tanpa reformasi yang menyentuh akar persoalan, krisis kepercayaan publik akan terus berulang.

Sebaliknya, reformasi yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada akuntabilitas dapat menjadikan kepolisian sebagai penjaga hukum yang profesional, adil, dan dipercaya masyarakat. Dalam negara demokratis, kepolisian yang kuat bukan yang paling ditakuti, tetapi yang paling dapat dipercaya.



# MENJAJARI KEDAULATAN ENERGI INDONESIA: DARI KETERGANTUNGAN FOSIL MENUJU TRANSISI YANG BERDAULAT DAN ADIL

OKTOBER 2025

*Kedaulatan energi semakin menjadi isu strategis bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global, krisis iklim, dan perubahan geopolitik. Lonjakan harga energi akibat konflik internasional, tekanan transisi rendah karbon, serta ketimpangan akses energi antarwilayah menegaskan bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi kedaulatan nasional.*

*Dalam konteks ini, kedaulatan energi tidak identik dengan swasembada atau isolasi dari pasar global. Kedaulatan energi adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mengendalikan arah, tata kelola, dan manfaat sistem energi agar mendukung tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.*



# APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEDAULATAN ENERGI?



Kedaulatan energi melampaui konsep keamanan energi atau kemandirian pasokan. Ia bertumpu pada lima pilar utama:

## **1. Kontrol dan tata kelola demokratis**

Negara dan komunitas memiliki kewenangan nyata dalam menentukan prioritas energi melalui kebijakan transparan, regulator akuntabel, dan partisipasi publik

## **2. Keamanan dan ketahanan energi**

Sistem energi harus tangguh terhadap guncangan—geopolitik, harga global, bencana alam—melalui diversifikasi sumber dan desentralisasi.

## **3. Kedaulatan ekonomi**

Energi harus menciptakan nilai tambah domestik: lapangan kerja, rantai pasok nasional, industri hijau, dan model kepemilikan lokal.

## **4. Keadilan dan transisi yang adil**

Perubahan sistem energi tidak boleh mengorbankan pekerja, masyarakat lokal, dan kelompok rentan, terutama di wilayah penghasil energi fosil.

## **5. Keberlanjutan lingkungan**

Pengelolaan energi harus selaras dengan tujuan iklim jangka panjang dan mencegah jebakan aset fosil terlantar (*stranded assets*).

Dengan kerangka ini, kedaulatan energi justru membutuhkan keterbukaan strategis, bukan penutupan diri—terutama dalam pendanaan dan alih teknologi.

# MENGAPA KEDAULATAN ENERGI PENTING BAGI INDONESIA?

*Kedaulatan energi akan memberikan jaminan bagaimana suatu negara dan bangsa akan bergerak dan melaju menuju pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, kedaulatan energi memiliki implikasi luas:*

- 01** **Kemandirian geopolitik** Ketergantungan Indonesia pada impor energi fosil, khususnya minyak dan gas, menempatkan posisi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik global dan strategi negara pengekspor. Kedaulatan energi memperkuat daya tawar Indonesia dalam hubungan internasional serta memberi ruang kebijakan yang lebih mandiri tanpa harus tunduk pada tekanan harga, embargo, atau konflik global yang berada di luar kendali domestik.
- 02** **Ketahanan ekonomi** Dengan memperkuat penguasaan dan pengelolaan energi di dalam negeri, Indonesia dapat menekan defisit neraca perdagangan energi dan mengurangi beban fiskal subsidi. Nilai tambah dari sektor energi—mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi—dapat berputar di dalam ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri hulu–hilir, dan meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang.
- 03** **Pemberdayaan komunitas.** Kedaulatan energi membuka ruang bagi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam pengelolaan sumber daya energi. Model energi berbasis komunitas memungkinkan pemanfaatan sumber energi terbarukan skala kecil yang selaras dengan kebutuhan lokal, memperkuat ekonomi rakyat, serta mengurangi konflik sosial yang kerap muncul akibat pendekatan ekstraktif terpusat.
- 04** **Aksi Iklim** Dalam kerangka transisi energi, kedaulatan energi memastikan bahwa peralihan menuju energi terbarukan tidak semata digerakkan oleh kepentingan pasar global atau korporasi besar. Transisi yang berdaulat memungkinkan Indonesia merancang jalur dekarbonisasi yang adil, bertahap, dan inklusif, sehingga tujuan penurunan emisi sejalan dengan penciptaan kesejahteraan, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi nasional.

# TANTANGAN STRUKTURAL TATA KELOLA ENERGI DI INDONESIA

## 1. Geografi Kepulauan dan Infrastruktur

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam membangun jaringan energi terintegrasi. Banyak pulau bergantung pada microgrid berbasis diesel yang mahal dan tidak berkelanjutan. Infrastruktur jaringan listrik nasional—terutama milik PLN—banyak yang sudah tua dan belum siap untuk sistem energi terbarukan yang terdesentralisasi.

## 2. Tantangan Ekonomi dan Finansial

Transisi energi membutuhkan investasi ratusan miliar dolar. Namun subsidi bahan bakar fosil menciptakan distorsi pasar, membuat energi terbarukan tampak mahal dan membebani APBN. Struktur tarif listrik yang sering berada di bawah biaya produksi juga melemahkan kesehatan keuangan PLN dan menahan inovasi.

## 3. Regulasi dan Tata Kelola

Ketidakpastian regulasi, dominasi BUMN energi fosil, serta lemahnya koordinasi pusat–daerah menciptakan inersia kebijakan. Transisi energi sering terhambat bukan oleh teknologi, tetapi oleh politik dan kelembagaan.

## 4. Teknologi dan SDA

Intermitensi energi surya dan angin menuntut investasi besar pada penyimpanan energi. Di sisi lain, konflik lahan dan ketergantungan impor mineral kritis menjadi tantangan baru dalam pengembangan energi terbarukan.

## 5. Sosial dan Budaya

Puluhan tahun ketergantungan pada batu bara membentuk mentalitas kutukan sumber daya. Lobi energi fosil kuat, sementara keterlibatan masyarakat dan kesiapan tenaga kerja terampil masih terbatas.

## 6. Dilema Prioritas

Indonesia terjebak antara tiga tujuan yang saling menekan:

- kedaulatan dan keamanan energi,
- keterjangkauan dan akses energi murah,
- keberlanjutan dan komitmen iklim.

Jalan pintas membangun pembangkit batu bara memang murah secara jangka pendek, tetapi menghancurkan dua tujuan lainnya.

# PETA JALAN KEDAULATAN ENERGI INDONESIA

Kajian ini merumuskan peta jalan bertahap hingga 2045.

## FASE 1: FONDASI DAN MODERNISASI (2025–2030)

Fokus pada reformasi regulasi, modernisasi jaringan, penghentian pembangkit batu bara baru, percepatan energi terbarukan, serta program percontohan *just transition* di wilayah tambang. Inisiatif seperti **mikrogrid surya–baterai** untuk pulau terpencil menjadi kunci.

## FASE 2: DESENTRALISASI DAN PERUBAHAN SISTEM (2031–2040)

Energi terbarukan menjadi mayoritas pasokan. Jaringan listrik regional diperkuat, penyimpanan energi skala besar dikembangkan, dan industri hijau domestik—baterai, panel surya, kendaraan listrik—mulai matang.

## FASE 3: KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN (2041–2045)

Indonesia mencapai sistem kelistrikan nol emisi, wilayah bekas tambang bertransformasi menjadi pusat ekonomi hijau, dan Indonesia berpotensi menjadi eksportir energi bersih dan produk hijau bernilai tambah di kawasan ASEAN.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN UTAMA: INDONESIA YANG BERDAULAT ENERGI

Berdasarkan analisis situasi dan kondisi tata kelola energi di Indonesia, Perkumpulan Amerta merekomendasikan langkah kebijakan berikut:

## **1. SAHKAN UNDANG-UNDANG TRANSISI ENERGI YANG ADIL**

Undang-Undang Transisi Energi yang Adil diperlukan sebagai payung hukum terpadu untuk memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang, baik bagi negara, pelaku usaha, maupun masyarakat. Regulasi ini harus mencakup penyederhanaan perizinan energi terbarukan, mekanisme penutupan dini PLTU secara terencana, serta perlindungan sosial dan ekonomi bagi pekerja dan daerah yang terdampak transisi. Tanpa landasan hukum yang kuat, transisi energi berisiko berjalan parsial dan tidak konsisten.

## **2. REFORMASI SUBSIDI ENERGI**

Reformasi subsidi energi perlu dilakukan secara bertahap dengan mengalihkan dukungan fiskal dari energi fosil menuju pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan perlindungan kelompok rentan. Skema subsidi harus lebih tepat sasaran agar tidak memperkuat ketergantungan pada energi kotor sekaligus tetap menjaga daya beli masyarakat. Reformasi ini penting untuk menciptakan insentif ekonomi yang selaras dengan tujuan kedaulatan dan keberlanjutan energi.

## **3. MODERNISASI DAN DESENTRALISASI JARINGAN ENERGI**

Investasi besar pada modernisasi jaringan melalui smart grid, mikrogrid berbasis komunitas, dan sistem energi pulau yang mandiri menjadi kunci memperkuat ketahanan energi nasional. Pendekatan desentralisasi memungkinkan daerah terpencil dan kepulauan mengurangi ketergantungan pada pasokan terpusat dan energi impor. Dengan sistem jaringan yang fleksibel dan adaptif, integrasi energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih andal dan merata.

#### **4. PERKUAT TATA KELOLA DAN KOORDINASI.**

Kedaulatan energi membutuhkan tata kelola yang solid melalui penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik kepentingan, khususnya yang melibatkan BUMN energi, perlu dikurangi dengan memperjelas mandat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas publik. Koordinasi yang efektif akan mempercepat implementasi kebijakan dan mencegah tumpang tindih regulasi yang menghambat transisi energi.

#### **5. BANGUN INDUSTRI HIJAU DAN RANTAI NILAI DOMESTIK**

Pengembangan industri hijau harus diarahkan pada penguatan rantai nilai domestik, termasuk manufaktur panel surya, baterai, dan kendaraan listrik berbasis sumber daya nasional. Kebijakan industri perlu memastikan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penerapan standar lingkungan yang ketat. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menjadi motor industrialisasi berkelanjutan.

#### **6. PASTIKAN TRANSISI YANG BERKEADILAN**

Transisi menuju kedaulatan energi harus menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama dengan melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan. Pembagian manfaat ekonomi perlu dijamin agar komunitas terdampak memperoleh keuntungan nyata, bukan sekadar menanggung biaya sosial dan lingkungan. Program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja sektor energi fosil juga menjadi kunci agar transisi tidak menciptakan ketimpangan baru.



## PENUTUP

Kedaulatan energi adalah proyek nasional lintas generasi. Ia menuntut keberanian politik untuk meninggalkan kenyamanan jangka pendek energi fosil dan berinvestasi pada sistem energi yang adil, tangguh, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki sumber daya alam, posisi geopolitik, dan potensi manusia untuk memimpin transisi energi di kawasan—jika mampu menata tata kelola dan mengelola konflik kepentingan secara tegas.

Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah energi menjadi sumber kedaulatan dan kesejahteraan bersama, atau justru beban dan ketergantungan baru di masa depan.



# MENILIKI “JEJAK HITAM” ORDE BARU:

## PELAJARAN PENTING BAGI MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

NOVEMBER 2025

*Selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966–1998), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan pembangunan infrastruktur yang masif.*

*Namun di balik narasi stabilitas dan pembangunan tersebut, tersembunyi sisi gelap yang membentuk fondasi rapuh negara: korupsi sistemik, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), eksploitasi sumber daya alam secara masif, serta ketimpangan ekonomi yang ekstrem.*



*Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengulang nostalgia atau membuka luka lama semata.*

*Sebaliknya, kajian ini bertujuan membaca Orde Baru sebagai pelajaran sejarah hidup, agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam konteks politik, ekonomi, dan pembangunan hari ini.*



## PELANGGARAN HAM DAN REPRESI SISTEMIK

Untuk menjaga sistem korup tersebut, Orde Baru mengandalkan represi negara. Militer dengan doktrin dwifungsi berperan bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga pengendali kehidupan politik dan sosial.

Beberapa catatan kelam yang tidak bisa dihapus dari sejarah:

- Pembantaian 1965–1966, yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang, menjadi fondasi kekuasaan awal Orde Baru.
- Pembungkaman kebebasan sipil, melalui sensor pers, pembatasan organisasi, dan undang-undang anti-subversi.
- Penahanan tanpa proses hukum, termasuk pembuangan politik ke Pulau Buru.
- Kekerasan terhadap kelompok minoritas, terutama warga keturunan Tionghoa, yang mencapai puncaknya pada kerusuhan Mei 1998 dengan pemerkosaan dan pembunuhan yang terstruktur.
- Perampasan ruang hidup masyarakat adat, atas nama pembangunan dan konsesi sumber daya alam.

Pelanggaran HAM bukan ekses, melainkan instrumen politik untuk mempertahankan sistem kekuasaan yang timpang.



## PEMBANGUNAN EKSTRAKTIF DAN KERUSAKAN LINGKRUNGAN

Model pembangunan Orde Baru bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara masif: minyak dan gas, kayu, pertambangan, serta agribisnis monokultur.

Akibatnya:

- Deforestasi besar-besaran (hingga 1,5–2 juta hektare per tahun).
- Kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Pencemaran sungai, udara, dan kawasan pesisir.
- Konflik agraria yang meluas dan berlarut-larut.

Pendapatan jangka pendek dari SDA menutupi kelemahan struktural ekonomi dan menciptakan “Dutch disease”: sektor pertanian dan manufaktur diabaikan, sementara ekonomi menjadi rapuh dan tidak berdaya saing.



## ILUSI PERTUMBUHAN DAN KERUNTUHAN 1997-1998

Pertumbuhan tinggi selama Orde Baru menciptakan ilusi keberhasilan. Namun krisis keuangan Asia 1997 membuka borok sistemik:

- Rupiah anjlok lebih dari 80%.
- Perbankan kolaps akibat kredit berbasis koneksi, bukan kelayakan.
- Kemiskinan dan pengangguran melonjak drastis.

Krisis ini memutus “kontrak sosial” Orde Baru: stabilitas dan pembangunan ditukar dengan kebebasan. Ketika stabilitas runtuh, legitimasi kekuasaan ikut runtuh. Demonstrasi mahasiswa, kerusuhan sosial, dan tekanan internasional akhirnya memaksa Soeharto mundur pada Mei 1998.



## **MENGAPA MEMAHAMI JEJAK HITAM ORDE BARU RELEVAN HARI INI?**

Memahami jejak hitam Orde Baru tetap relevan hari ini karena warisan pola kekuasaan dan pengelolaan ekonomi-politiknya tidak sepenuhnya terputus oleh reformasi institusional. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan rezim tidak otomatis menghapus cara berpikir, praktik birokrasi, dan logika kekuasaan yang telah mengakar lama. Tanpa kesadaran kritis, pola-pola lama berpotensi muncul kembali dalam bentuk yang lebih halus dan adaptif terhadap konteks demokrasi elektoral.

Salah satu pola yang berisiko berulang adalah normalisasi korupsi atas nama stabilitas politik dan pembangunan. Pada masa Orde Baru, praktik rente dan kolusi dilegitimasi sebagai “biaya” menjaga pertumbuhan dan ketertiban. Logika serupa dapat kembali muncul ketika korupsi dianggap wajar demi kelancaran proyek strategis atau stabilitas pemerintahan.

Pola lain yang berpotensi berulang adalah pengabaian hak asasi manusia dengan dalih pembangunan dan kepentingan nasional. Sejarah Orde Baru memperlihatkan bagaimana represi, kekerasan negara, dan pembungkaman kritik dipandang sebagai instrumen pembangunan. Dalam konteks hari ini, risiko tersebut muncul ketika pembatasan kebebasan sipil dibenarkan atas nama investasi, keamanan, atau percepatan ekonomi.

Ketergantungan pada ekstraksi sumber daya alam juga merupakan warisan struktural Orde Baru yang masih membayangi. Model pembangunan berbasis eksploitasi SDA jangka pendek memang menghasilkan pertumbuhan cepat, tetapi menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan kerentanan ekonomi. Tanpa transformasi ekonomi yang serius, pola ekstraktivisme ini dapat terus direproduksi dengan aktor dan teknologi yang berbeda.

Di atas semua itu, terdapat godaan otoritarianisme yang dibungkus narasi efisiensi, ketertiban, dan kepastian. Orde Baru menunjukkan bagaimana stabilitas dan pertumbuhan dapat digunakan untuk membenarkan konsentrasi kekuasaan. Oleh karena itu, refleksi atas Orde Baru bukanlah nostalgia masa lalu, melainkan peringatan dini agar demokrasi tidak terkikis perlahan oleh pola-pola lama yang tampil dalam wajah baru.

# **REKOMENDASI KEBIJAKAN: AGAR SEJARAH BURUK TIDAK BERULANG**

Berdasarkan pelajaran dari praktik pemerintahan Orde Baru, Perkumpulan Amerta merekomendasikan:

## **1. TEGAKKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI AGENDA SISTEMIK.**

Korupsi harus diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara dan demokrasi, bukan sekadar pelanggaran hukum individual. Penguatan lembaga antikorupsi dan mekanisme pengawasan independen menjadi kunci untuk memutus jejaring rente yang bersifat struktural dan lintas sektor. Upaya penegakan hukum juga harus disertai dengan pengejaran serta pemulihan aset hasil korupsi, termasuk yang diwariskan lintas generasi, agar keadilan bersifat substantif.

## **2. PASTIKAN SUPREMASI HAM DAN HUKUM.**

Negara perlu secara bermartabat mengakui dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Impunitas aparat dan elite harus dihentikan melalui penegakan hukum yang adil dan setara. Prinsip dasarnya adalah bahwa stabilitas dan pembangunan tidak boleh dibangun di atas rasa takut, represi, atau penghapusan hak-hak warga negara.

## **3. REFORMASI MODEL PEMBANGUNAN.**

Paradigma pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam perlu ditinggalkan dan digantikan dengan ekonomi yang bertumpu pada nilai tambah, inovasi, dan keberlanjutan. Perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan harus dipandang sebagai investasi sosial dan ekologis jangka panjang, bukan hambatan pembangunan. Reformasi ini penting untuk mencegah reproduksi ketimpangan dan konflik struktural seperti yang terjadi di masa lalu.

## **4. CEGAH KONSENTRASI KEKUASAAN POLITIK DAN EKONOMI.**

Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan terbukti membuka ruang bagi otoritarianisme dan korupsi sistemik. Oleh karena itu, mekanisme checks and balances perlu diperkuat, baik di ranah politik maupun ekonomi. Pembatasan konflik kepentingan dan praktik nepotisme dalam kebijakan publik serta pengelolaan BUMN menjadi syarat utama untuk menjaga demokrasi dan keadilan ekonomi.

## **5. BANGUN DEMOKRASI SUBSTANTIF.**

Demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur elektoral semata, melainkan harus diwujudkan secara substantif melalui perlindungan kebebasan pers, kebebasan akademik, dan ruang gerak masyarakat sipil. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan strategis perlu diperluas agar kebijakan mencerminkan kepentingan bersama, bukan kehendak segelintir elite. Dengan demikian, demokrasi menjadi mekanisme koreksi dini agar kesalahan sejarah tidak terulang.

## PENUTUP

Orde Baru mengajarkan satu pelajaran fundamental: pertumbuhan tanpa keadilan, kekuasaan tanpa akuntabilitas, dan pembangunan tanpa keberlanjutan pada akhirnya akan runtuh. Indonesia hari ini menghadapi pilihan yang sama—apakah belajar dari sejarah, atau mengulangnya dalam bentuk baru.

Mengingat “jejak hitam” Orde Baru bukan untuk terjebak di masa lalu, tetapi untuk memastikan bahwa demokrasi, HAM, dan keadilan sosial tidak lagi menjadi korban atas nama stabilitas dan pembangunan semu.



# BANJIR DAN LONGSOR SUMATRA:

## RETIKA HUJAN MENGUNGKAP KEGAGALAN TATA KELOLA

DESEMBER 2025



*Banjir dan longsor besar yang melanda berbagai wilayah Sumatera pada akhir November 2025 kembali menelan korban jiwa, merusak pemukiman, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.*

*Seperti bencana-bencana sebelumnya, peristiwa ini sering disebut sebagai “bencana alam akibat hujan ekstrem”.*

*Namun kajian ini menunjukkan kesimpulan yang jauh lebih mengkhawatirkan: banjir dan longsor di Sumatera bukan semata-mata bencana alam, melainkan bencana kebijakan.*

*Hujan hanya menjadi pemicu. Akar masalahnya adalah kerusakan lanskap, tata kelola lahan yang gagal, dan model pembangunan ekstraktif yang dibiarkan berlangsung selama puluhan tahun.*

# AKAR MASALAH LINGKUNGAN: MENGAPA AIR LANGSUNG MENGAMUK

## **Deforestasi Skala Besar**

Sejak 1990-an, Sumatera telah kehilangan jutaan hektare hutan alam akibat konversi menjadi perkebunan sawit, karet, dan pertambangan. Hilangnya kanopi dan sistem perakaran membuat hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir di permukaan sambil menggerus tanah.

## **Degradasi Lahan Gambut**

Pengeringan gambut untuk perkebunan menciptakan paradoks bencana:

- saat hujan → banjir besar,
- saat kemarau → kebakaran hebat.

Gambut yang seharusnya menjadi “spons air” berubah menjadi medium aliran cepat yang rapuh.

## **Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Eksplorasi hulu tanpa pengelolaan terpadu membuat masyarakat di hilir menanggung risiko. Tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa aktivitas di hulu mempertimbangkan dampaknya ke wilayah hilir.



## **MENGAPA BANJIR DISERTAI KAYU GELONDONGAN?**

Salah satu ciri paling mematikan dari banjir Sumatra adalah aliran kayu gelondongan dalam jumlah besar.

Kayu-kayu ini berasal dari:

- penebangan liar dan semi-legal di hulu,
- sisa pembukaan lahan yang ditinggalkan dekat sungai,
- longsor di lereng yang gundul akibat deforestasi,
- serta jalan logging dan pertambangan yang mempercepat aliran air ke sungai.

Saat banjir datang, sungai berubah menjadi saluran transportasi kayu, menjadikan banjir bukan sekadar aliran air, melainkan aliran material destruktif.

## **MENGAPA KAYU MEMBUAT BANJIR JAUH LEBIH MEMATIKAN**

Pada kasus banjir di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) kayu gelondongan mengubah banjir menjadi senjata untuk:

- menghancurkan rumah,
- merobohkan jembatan dan jalur evakuasi,
- menimbulkan kematian akibat benturan, bukan tenggelam.

Lebih berbahaya lagi, kayu sering membentuk bendungan sementara di sungai atau jembatan. Ketika bendungan ini runtuh, banjir bandang terjadi tanpa peringatan, menghantam permukiman yang sedang beristirahat.

## MODEL EKONOMI EKSTRAKTIF SEBAGAI MESIN BENCANA

Banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra pada akhir 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai konsekuensi ekologis dari model pembangunan yang bersifat ekstraktif. Ketergantungan jangka panjang pada perkebunan sawit, eksploitasi kayu, dan pertambangan telah membentuk struktur ekonomi yang mengorbankan daya dukung lingkungan. Dalam model ini, sumber daya alam diperas untuk kepentingan pasar, sementara kapasitas ekosistem untuk menyerap dan mengatur air terus melemah.

Masalah ini diperparah oleh rendahnya nilai tambah lokal dari aktivitas ekstraktif tersebut. Keuntungan ekonomi cenderung mengalir keluar daerah, bahkan keluar negeri, sementara masyarakat setempat hanya menerima manfaat terbatas. Sebaliknya, risiko ekologis—mulai dari degradasi lahan, banjir, hingga longsor—ditanggung oleh komunitas lokal yang paling rentan dan memiliki daya adaptasi paling rendah.

Perkebunan monokultur memperparah kerentanan ekologis Sumatra dengan menciptakan lanskap yang tidak stabil secara hidrologi. Tanah yang memadat akibat praktik budidaya intensif mengurangi daya serap air, aliran drainase menjadi cepat dan destruktif, serta hilangnya keanekaragaman hayati melemahkan fungsi alami ekosistem. Dalam kondisi seperti ini, hujan lebat yang sebelumnya dapat diredam oleh hutan kini dengan mudah berubah menjadi banjir dan longsor yang berulang.



# KEGAGALAN TATA KELOLA: MENGAPA INI TERUS TERJADI

*Rezim pemerintahan berganti, namun kondisi tata kelola lahan di Indonesia selalu menyisakan masalah uang tak kunjung menemukan jalan keluar. Kami mengidentifikasi 3 alasan mengapa pemerintah Indonesia selalu gagal dalam mengelola kebijakan dan praktik tata guna lahan.*

01

## **Perencanaan Ruang yang Lemah**

Lemahnya perencanaan tata ruang tercermin dari terus berkembangnya permukiman di dataran banjir, pemberian izin usaha di kawasan lindung, serta tumpang tindih perizinan lintas sektor. Dokumen rencana tata ruang kerap disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi tidak dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, fungsi ekologis kawasan resapan air dan penyangga bencana terabaikan, sementara risiko banjir dan longsor meningkat secara sistemik.

02

## **Manipulasi Regulasi dan Korupsi**

Dalam praktiknya, regulasi lingkungan seperti izin penggunaan lahan, AMDAL, hingga penegakan hukum sering kali dapat “dinegosiasikan” melalui relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Korupsi melemahkan fungsi perlindungan lingkungan dengan menjadikan aturan sebagai komoditas, bukan instrumen pengendalian risiko. Penebangan liar dan pembukaan lahan ilegal pun kerap berlangsung dengan perlindungan jaringan politik dan ekonomi, sehingga degradasi ekosistem terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

03

## **Otoritas yang Terfragmen-tasi**

Pengelolaan hutan, sumber daya air, pertambangan, dan perkebunan berada di bawah kewenangan lembaga yang berbeda dengan mandat dan kepentingan yang sering kali tidak selaras. Ketiadaan satu otoritas terpadu yang bertanggung jawab atas pencegahan banjir menyebabkan kebijakan berjalan sektoral dan reaktif. Dalam kondisi ini, tidak ada pihak yang secara jelas bertanggung jawab ketika kerusakan lingkungan berujung pada bencana yang berulang.

# PERUBAHAN IKLIM: PENGGANDA RISIKO, BUKAN AKAR MASALAH



Perubahan iklim memperparah curah hujan dan ketidakpastian, tetapi tidak menyebabkan banjir sendirian.

Perubahan iklim memang meningkatkan intensitas dan ketidakpastian curah hujan, sehingga memperbesar peluang terjadinya banjir dan longsor. Namun, perubahan iklim bukanlah penyebab tunggal bencana, melainkan bertindak sebagai pengganda risiko terhadap kerusakan lingkungan yang sudah ada. Ketika hujan ekstrem terjadi di atas lanskap yang terdegradasi—hutan yang hilang, tanah yang padat, dan daerah resapan yang rusak—dampaknya menjadi jauh lebih destruktif.

Oleh karena itu, banjir yang berulang tidak dapat dijelaskan hanya dengan variabel iklim semata, tetapi harus dipahami sebagai kegagalan sistemik dalam pengelolaan lanskap. Mengabaikan adaptasi perubahan iklim, seperti perlindungan daerah tangkapan air dan pemulihan ekosistem, dalam konteks lanskap yang telah rusak merupakan kesalahan kebijakan yang serius. Tanpa integrasi antara adaptasi iklim dan rehabilitasi lingkungan, risiko banjir akan terus meningkat meskipun upaya mitigasi iklim dilakukan.

**LANSKAP YANG RUSAK**  
+  
**IKLIM YANG EKSTREM**  
=  
**RISIKO BANJIR SISTEMIK.**

# **REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENCEGAH BANJIR SUMATRA TERULANG**

Berdasarkan analisis yang mengapa banjir Sumatera terjadi dan menelan begitu banyak korban jiwa dan materi, maka Perkumpulan Amerta merekomendasikan beberapa kebijakan strategis yaitu :

## **1. RESET TATA KELOLA.**

Reset tata kelola harus dimulai dengan pengakuan bahwa banjir besar merupakan kegagalan tata kelola, bukan semata bencana alam, sehingga menuntut respons kebijakan yang serius dan sistemik. Langkah lanjutan perlu dilakukan melalui audit administratif, sipil, dan pidana terhadap seluruh perizinan di wilayah hulu pasca-banjir mematikan untuk mengungkap tanggung jawab struktural. Pada saat yang sama, pertanggungjawaban politik menteri dan kepala daerah harus diwajibkan di hadapan parlemen sebagai bagian dari pemulihan akuntabilitas publik.

## **2. PERKUAT OTORITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS).**

Penguatan otoritas Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dilakukan dengan menjadikannya pusat komando lintas sektor dalam pengelolaan hulu-hilir secara terpadu. Otoritas DAS harus dibekali kewenangan nyata untuk membekukan izin bermasalah, menegakkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta menembus sekat kelembagaan yang selama ini menghambat pencegahan banjir dan kerusakan ekosistem.

## **3. LANGKAH DARURAT PENCEGAHAN.**

Langkah darurat pencegahan perlu segera diberlakukan melalui moratorium total terhadap penebangan di wilayah hulu, pembukaan lahan di lereng dengan kemiringan lebih dari 25 derajat, serta seluruh aktivitas ekonomi dalam radius 200–500 meter dari sempadan sungai. Penegakan zona penyangga sungai harus dilakukan secara tegas dan tidak dapat dinegosiasikan, mengingat fungsi ekologisnya yang krusial dalam mengendalikan aliran air dan mencegah erosi serta longsor.

Selain pembatasan aktivitas, penegakan hukum harus diarahkan pada pemutusan rantai kejahatan lingkungan. Kayu yang disita di bantaran sungai perlu dilelang secara transparan dan hasilnya dialokasikan khusus untuk dana restorasi ekosistem. Pada saat yang sama, mafia perizinan harus dikriminalkan secara serius, dengan mengaitkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa sebagai bentuk tanggung jawab jabatan dan korporasi, bukan sekadar pelanggaran administratif.

#### **4. PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM.**

Pemulihan fungsi ekosistem harus melampaui pendekatan simbolik dengan menghentikan praktik penanaman semu dan mengalihkan fokus pada pemulihan hidrologis yang nyata. Lahan gambut perlu direstorasi melalui pembasahan kembali (rewetting) dan pelarangan monokultur di gambut dalam guna mengembalikan fungsi alaminya sebagai penyimpan air. Pada saat yang sama, sistem monokultur harus diubah menjadi mozaik agroforestri dan diversifikasi hasil hutan agar lanskap menjadi lebih stabil, produktif, dan resilien secara ekologis.

#### **4. PERBAIKI INSENTIF EKONOMI.**

Perbaikan insentif ekonomi perlu dilakukan dengan menjadikan kerusakan lingkungan sebagai aktivitas yang mahal melalui penerapan pajak berbasis risiko Daerah Aliran Sungai (DAS). Skema pembayaran jasa ekosistem (payment for ecosystem services/PES) harus diterapkan untuk memberi insentif nyata bagi pihak yang menjaga fungsi ekologis. Selain itu, bank dan lembaga asuransi perlu diwajibkan mengaitkan pembiayaan dan perlindungan risiko dengan tingkat kesehatan DAS agar logika pasar selaras dengan perlindungan lingkungan.



## PENUTUP

Indonesia tidak kekurangan undang-undang, rencana, atau dana. Yang kurang adalah penegakan hukum, integrasi kelembagaan, dan keberanian politik. Banjir di Sumatra bukan takdir alam, melainkan hasil dari pilihan pembangunan.

Selama hutan terus ditebang, gambut dikeringkan, izin dinegosiasikan, dan tanggung jawab kabur, banjir mematikan akan terus berulang. Mitigasi banjir bukan soal teknis semata, melainkan soal keadilan atas tanah, reformasi ekonomi, dan disiplin negara.

Banjir dengan kayu gelondongan adalah pesan keras dari hulu. Pertanyaannya: apakah negara akan mendengarnya—atau kembali menunggu bencana berikutnya?



430984656



# INDONESIA DI PERSIMPANGAN 2026:

## KETIKA STIMULUS GAGAL MENGHIDUPKAN EKONOMI RAKYAT

DESEMBER 2025



*Menutup tahun 2025, Indonesia menghadapi situasi yang paradoksal. Di satu sisi, indikator makroekonomi tampak relatif stabil: pertumbuhan PDB terjaga, inflasi resmi terkendali, dan sistem perbankan likuid.*

*Namun di sisi lain, daya beli masyarakat melemah, usaha mikro dan kecil (UMKM) terjepit, dan ketimpangan struktural semakin mengeras.*

*Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan ketiadaan stimulus, melainkan salah arah kebijakan.*

*Berbagai intervensi negara—mulai dari program makan bergizi gratis (MBG), pelonggaran likuiditas perbankan, hingga ekspansi sektor ekstraktif—gagal menghasilkan efek pengganda yang kuat di ekonomi riil.*

***Akibatnya, uang beredar di sistem,  
tetapi tidak berputar di kantong rakyat.***

## STIMULUS KONSUMSI TANPA PENGHASILAN: ILUSI PERBAIKAN

Program MBG memberikan manfaat nyata dalam mencegah kelaparan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam jangka pendek. Namun secara ekonomi, MBG adalah subsidi konsumsi, bukan pencipta pendapatan.

Makanan gratis menggantikan sebagian biaya makan, tetapi:

- tidak menambah arus kas rumah tangga,
- tidak menciptakan pekerjaan produktif,
- tidak memperkuat permintaan terhadap produk UMKM lokal.

Daya beli sejati bergantung pada penghasilan tunai yang stabil, bukan sekadar akses terhadap konsumsi. Tanpa penciptaan mata pencaharian, stimulus konsumsi hanya menunda masalah.

## LIKUIDITAS PERBANKAN YANG TERJEBAK DI MENARA GADING

Pemerintah telah meningkatkan likuiditas perbankan dengan harapan kredit mengalir ke UMKM. Kenyataannya, transmisi kredit terputus.

Dalam operasional bisnisnya, bank lebih memilih:

- obligasi pemerintah,
- korporasi besar,
- instrumen berisiko rendah,

sementara UMKM dianggap berisiko tinggi, tidak bankable, dan bermargin kecil. Hambatan agunan, pembukuan informal, serta suku bunga riil yang tinggi membuat kredit—bahkan yang bersubsidi—tidak menarik.

Hasilnya, uang berputar di sektor keuangan, bukan di ekonomi riil.

## INFLASI TERSEMBUNYI DAN EROSI DAYA BELI

Inflasi resmi mungkin rendah, tetapi rumah tangga menghadapi inflasi yang dirasakan jauh lebih tinggi. Harga pangan berprotein, transportasi, bahan bakar memasak, sewa, pendidikan, dan kesehatan terus naik, sementara pendapatan bersifat stagnan, informal, dan tidak stabil.

Fenomena ini menjelaskan paradoks ekonomi 2025 di mana orang membelanjakan lebih banyak uang, tetapi mendapatkan lebih sedikit barang dan jasa.

## UMKM: TERJEPIT DARI DUA ARAH

### SISI PERMINTAAN

Dari sisi permintaan, UMKM menghadapi penurunan daya beli masyarakat yang mendorong konsumen menekan belanja non-esensial dan menjadi semakin sensitif terhadap harga. Perubahan perilaku konsumsi ini berdampak langsung pada turunnya omzet toko-toko lokal, terutama UMKM yang bergantung pada pasar domestik dan konsumsi harian. Dalam kondisi seperti ini, ruang UMKM untuk mempertahankan margin keuntungan menjadi semakin sempit.

### SISI PASOKAN

Dari sisi pasokan, tekanan terhadap UMKM semakin berat akibat kenaikan biaya input dan logistik yang tidak diimbangi dengan kemampuan menaikkan harga jual. Dominasi platform digital yang mengutamakan skala ekonomi membuat UMKM kalah bersaing dengan pelaku usaha besar, sementara banjir produk impor berharga murah semakin menggerus pangsa pasar produk lokal. Kombinasi tekanan pasokan ini memperlemah daya tahan UMKM dan meningkatkan risiko gulung tikar secara massal.

**Kondisi ini menciptakan kematian perlahan, bukan kolaps mendadak: margin menyusut, volume menyusut, dan usaha bertahan hidup tanpa prospek naik kelas.**

# **EKONOMI EKSTRAKTIF: BESAR DI ANGKA, KECIL DI DAMPAK (1)**



Ekonomi ekstraktif di Indonesia kerap tampak impresif dalam statistik makro, terutama melalui kontribusi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit terhadap ekspor dan Produk Domestik Bruto. Namun, dominasi sektor ini dalam penggunaan lahan dan arus perdagangan tidak berbanding lurus dengan terciptanya kemakmuran yang luas dan merata. Hal ini mencerminkan karakter ekonomi ekstraktif yang besar di angka, tetapi kecil dalam dampak kesejahteraan.

Masalah utamanya terletak pada model ekonomi enklave yang melekat pada sektor-sektor tersebut. Kegiatan produksi bersifat padat modal dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah, rantai pasok lokal yang pendek, serta keterkaitan terbatas dengan ekonomi sekitar. Akibatnya, sebagian besar keuntungan mengalir ke pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan ke luar negeri, sementara daerah penghasil hanya menerima limpahan manfaat yang minimal.

Di sisi lain, nilai ekonomi terbesar justru ditangkap pada tahapan teknologi, pengolahan lanjutan, branding, dan distribusi global yang sebagian besar berada di luar Indonesia. Ketika biaya lingkungan dan sosial—seperti degradasi ekosistem, konflik lahan, dan dampak kesehatan—diperhitungkan secara serius, nilai bersih kesejahteraan masyarakat justru menurun. Dengan demikian, peningkatan PDB sektor ekstraktif tidak selalu mencerminkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

## **EKONOMI EKSTRAKTIF: BESAR DI ANGKA, KECIL DI DAMPAK (2)**



Masalah ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arsitektur kekuasaan yang membentuk perilaku birokrasi. Birokrasi yang tidak produktif sering kali dipersepsikan sebagai persoalan budaya kerja, padahal akar utamanya terletak pada desain insentif dan relasi politik yang menyertainya. Dalam struktur seperti ini, birokrasi lebih berfungsi sebagai perpanjangan kekuasaan daripada sebagai mesin pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

Insentif yang ada tidak mendorong kinerja dan inovasi, melainkan kepatuhan dan penghindaran risiko. Gaji tidak dikaitkan dengan capaian kinerja, promosi lebih ditentukan oleh loyalitas politik, dan ketakutan akan sanksi membuat aparat cenderung bermain aman. Akibatnya, keberhasilan birokrasi diukur dari penyerapan anggaran, bukan dari kualitas hasil atau dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

Di atasnya, bohir politik—oligarki yang dilindungi kekuasaan—mengubah uang menjadi kendali kebijakan melalui pembiayaan politik, pengadaan terpusat, izin diskresioner, dan penegakan hukum selektif. Dalam sistem ini, reformasi teknis tanpa reformasi politik akan selalu kandas.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN: MITIGASI STRUKTURAL MENUJU 2026

Berdasarkan analisis tersebut, Perkumpulan Amerta merekomendasikan agenda kebijakan berikut.

## **1. ALIHKAN FOKUS DARI KONSUMSI KE MATA PENCAHARIAN.**

Fokus kebijakan perlu dialihkan dari pendekatan populis berbasis konsumsi jangka pendek. Program-program bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak hanya mendorong belanja sesaat, tetapi memperkuat kemandirian ekonomi. Prioritas utama harus diberikan pada penciptaan pekerjaan produktif dengan upah layak. Selain itu, belanja sosial negara perlu dihubungkan dengan pengadaan berbasis UMKM lokal agar manfaatnya menggerakkan ekonomi riil dan mata pencaharian masyarakat.

## **2. PULIHKAN TRANSMISI KREDIT KE UMKM.**

Transmisi kredit ke UMKM perlu dipulihkan melalui penerapan skema pembiayaan berbasis revenue sharing dan penjaminan negara agar risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha kecil. Persyaratan formalitas UMKM juga harus disederhanakan secara nasional untuk memperluas akses terhadap pembiayaan resmi. Selain itu, insentif bagi perbankan perlu dikaitkan dengan realisasi kredit produktif yang benar-benar mengalir ke sektor riil, bukan sekadar pada pengelolaan likuiditas.

## **3. TANGANI INFLASI YANG DIRASAKAN .**

Inflasi yang dirasakan masyarakat perlu ditangani secara langsung dengan mengendalikan komponen biaya hidup utama seperti logistik, energi rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan. Perlindungan terhadap pendapatan riil pekerja informal dan kelompok menengah bawah harus diperkuat agar kenaikan harga tidak segera menggerus daya beli. Kebijakan fiskal sebaiknya diarahkan untuk menahan biaya hidup secara struktural, bukan semata-mata menambah konsumsi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

#### **4. REFORMASI TOTAL EKONOMI EKSTRAKTIF.**

Reformasi total ekonomi ekstraktif perlu dilakukan dengan mewajibkan integrasi industri lokal dan skema transfer teknologi agar nilai tambah tidak berhenti di tahap ekstraksi. Praktik ekonomi enklave harus dihentikan melalui kewajiban pengadaan dan penguatan rantai pasok lokal di wilayah produksi. Selain itu, biaya lingkungan dan sosial yang selama ini ditanggung masyarakat harus diinternalisasi ke dalam struktur harga dan pajak sektor ekstraktif agar mencerminkan biaya riil pembangunan.

#### **5. REFORMASI BIROKRASI BERBASIS OUTCOME.**

Reformasi birokrasi perlu diarahkan berbasis outcome dengan menetapkan mandat hasil yang terukur bagi setiap lembaga, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Keputusan-keputusan berisiko rendah perlu diotomatisasi untuk menutup ruang rente dan mempercepat pelayanan publik. Pada saat yang sama, diferensiasi gaji dan jenjang karier harus diterapkan berdasarkan kinerja nyata agar birokrasi terdorong untuk produktif dan berorientasi hasil.

#### **6. PUTUS MATA RANTAI BOHIR POLITIK.**

Memutus mata rantai bohir politik memerlukan penerapan transparansi radikal dalam pembiayaan politik agar relasi antara kekuasaan dan modal dapat diawasi publik. Penegakan hukum persaingan usaha dan antimonopoli harus diperkuat untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada segelintir aktor. Pada saat yang sama, desentralisasi harus diarahkan pada pemerataan peluang ekonomi dan kewirausahaan, bukan pada perluasan praktik korupsi dan rente di tingkat lokal.

## PENUTUP

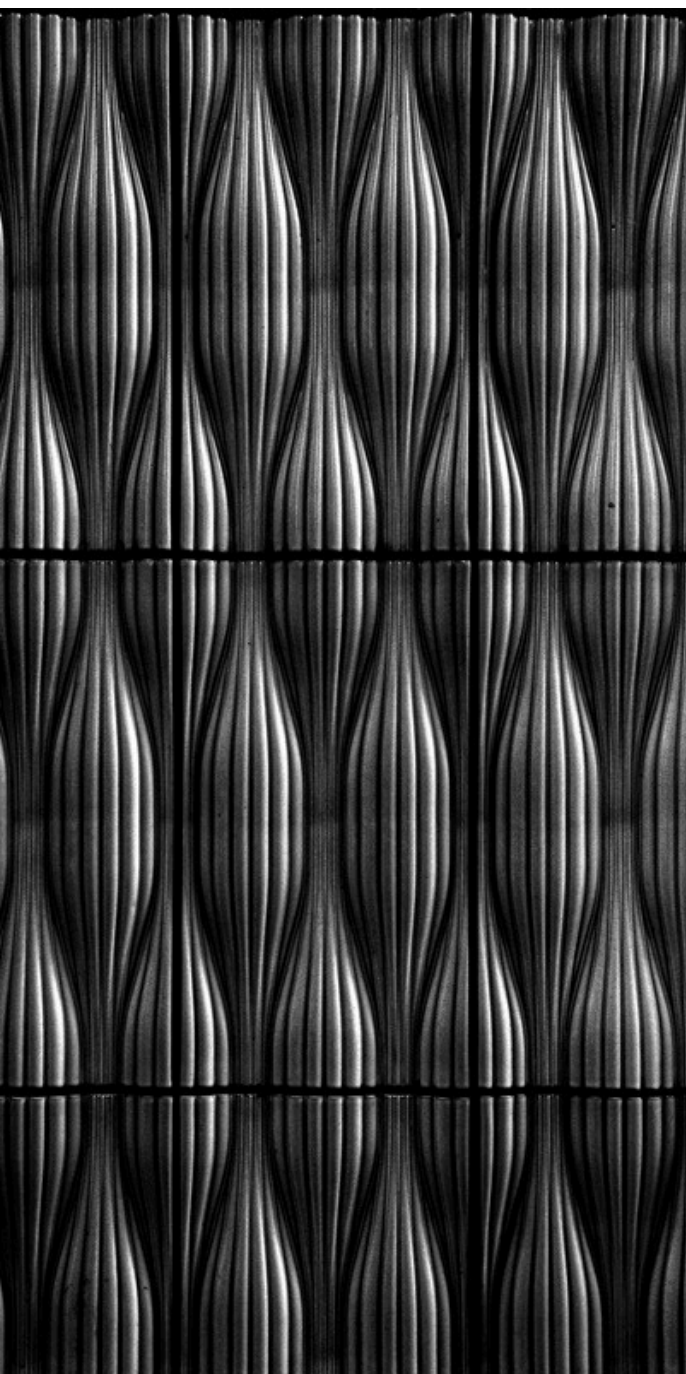
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, anggaran, atau program. Yang hilang adalah sirkulasi ekonomi yang adil dan produktif. Selama kebijakan hanya menahan gejolak jangka pendek tanpa memperbaiki mata pencaharian, daya beli akan terus melemah, UMKM akan mati perlahan, dan ketimpangan akan mengeras.

Tahun 2026 adalah titik penentu: apakah Indonesia berani melakukan koreksi struktural, atau kembali mengulang siklus stabilitas semu yang mahal secara sosial dan politik.

Pilihan itu bersifat politis—dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh warga negara.



# EPILOG



Dinamika politik dan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 bukanlah rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil akumulasi pilihan kebijakan, kualitas tata kelola, dan kapasitas institusi dalam merespons tantangan struktural. Buku ini menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan angka, tanpa keadilan distribusi dan akuntabilitas politik, berisiko menciptakan fondasi pembangunan yang rapuh.

Berbagai analisis dalam buku ini memperlihatkan pola yang konsisten: melemahnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, meningkatnya beban fiskal, serta gejala pembusukan politik adalah sinyal dini yang tidak boleh diabaikan. Kebijakan publik yang dirancang tanpa orientasi jangka panjang dan tanpa pengawasan yang kuat cenderung menghasilkan manfaat semu, sekaligus mewariskan risiko sosial, ekonomi, dan politik bagi generasi berikutnya.

# EPILOG



Memasuki 2026, tantangan utama Indonesia bukan semata merumuskan kebijakan baru, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik. Pengawasan kebijakan—oleh masyarakat sipil, akademisi, media, dan warga negara—menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk melihat kebijakan publik sebagai proses bersama, bukan monopoli kekuasaan. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh janji normatif, melainkan oleh keberanian kolektif untuk belajar, mengoreksi, dan menjaga agar arah pembangunan tetap berada di jalur keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan demokratis.

